

**MENANGKAL RADIKALISME PADA PERGURUAN
TINGGI**



Disusun Oleh:

Ketua

Dr. Hj. Sulistyorini, M. Ag

ID: 201912650108101

Anggota

Laelatuzz Zuhriyah, M. Fil.I

ID: 202805860101024

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG

Juli 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, hanya atas kehendakNya buku ini dapat terselesaikan. Disamping itu, terselesainya buku ini juga berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini.

Dalam penyusunan buku ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus hati dan penghargaan yang setinggi-tingginya, karena sudah diberi kesempatan untuk mengembangkan keilmuan dan penelitian yang ada pada diri penulis, ucapan terima kasih disampaikan kepada yang terhormat:

Penulisan buku ini sudah diusahakan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri penulis, namun tidak menutup kemungkinan masih ada kurang sempurna di sana sini bahkan kekeliruan yang tidak disengaja. Karena itu saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan buku ini sangat diharapkan dan akan penulis terima dengan senang hati disertai ucapan terima kasih.

Akhirnya penulis berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia pada umumnya, khususnya bagi para pengelola perguruan tinggi Islam di Jawa Timur khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Tulungagung, 24 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I RADIKALISME PADA PERGURUAN TINGGI

A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Radikalisme	1
C. Sejarah Radikalisme di Indonesia	9
D. Ciri-Ciri Kelompok Radikalisme	13
E. Faktor faktor Kemunculan Radikalisme	19
F. Solusi Mengatasi Radikalisme	26
G. Radikalisme di Perguruan Tinggi	31
H. Faktor Penyebab Radikalisme di Perguruan Tinggi	43

BAB II KEPEMIMPINAN PADA PERGURUAN TINGGI

A. Pendahuluan	53
B. Pengertian Kepemimpinan	53
C. Fungsi dan Tugas Kepemimpinan	57
D. Tugas Kepemimpinan	63
E. Syarat-syarat Kepemimpinan	73
F. Peran dan Tanggung Jawab Pemimpin.....	80
G. Kepemimpinan di Perguruan Tinggi	83
H. Peran Pemimpin Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Gerakan Radikalisme	91

BAB III MODERASI BEERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI

A. Pendahuluna	97
B. Konsep Moderasi Beragama.....	97
C. Konsep Dasar Beragama : Adil dan Berimbang	99
D. Indikator Moderasi Beragama	108
E. Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama.....	122
F. Moderasi di antara Radikalisme dan Liberalisme	141
G. Respon Terhadap Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan	147

BAB IV MODERASI BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI

A. Konsep Kebijakan Pendidikan	155
B. Kebijakan Pemimpin dalam Radikalisme di Perguruan Tinggi.....	163
C. Model Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia	171
D. Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan.....	190

BAB V STUDI EMPIRIS MENANGKAL RADIKALISME PADA PERGURUAN TINGGI

DAFTAR RUJUKAN	217
-----------------------------	------------

BAB I

RADIKALISME PADA PERGURUAN TINGGI

A. Pendahuluan

Dalam terminologi klasik, teks-teks agama menyebut radikalisme dengan istilah “*al-ghulwu*”, “*al-tasyaddud*”, dan “*al-tanattu*”. Allah berfirman, “*Katakanlah: Hai Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu.*” (QS Al-Ma'idah [5]: 77). Rasulullah bersabda, “*Jauhilah perilaku melampaui batas. Sesungguhnya kerusakan umat terdahulu disebabkan oleh perilaku yang melampaui batas dalam agama.*” Hadis sahih ini muncul dalam rangka mengkritik perilaku sahabat yang melewati batas dalam melempar jamrah (dalam ibadah haji) dengan menggunakan batu yang besar. Meskipun hadis ini muncul dalam konteks historis yang spesifik, beberapa ulama menyatakan bahwa hadis ini berlaku untuk semua bentuk radikalisme.

Radikalisme merupakan satu paham yang identik dengan kekerasan. Di Indonesia baru-baru ini telah muncul berbagai macam gerakan radikal baik atas nama agama maupun yang lainnya. Gerakan-gerakan dikatakan radikal

terlihat dari aksi-aksi kekerasan yang dilakukan. Bahkan tidak mengakui keyakinan orang lain dan cenderung menganggap keyakinan sendiri yang paling benar. Tindakan lain yang juga menjadi salah satu sorotan aksi gerakan radikal adalah menghancurkan segala hal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya, termasuk penghinaan terhadap kitab suci umat beragama.

B. Pengertian Radikalisme

Istilah radikalisme merupakan pengembangan dari kata “radikal” yang berasal dari bahasa latin “*radix*” atau akar. Dengan kata lain, “radikal” mengacu pada hal-hal fundamental, dasar, dan esensial dari berbagai macam gejala. Jadi, radikalisme dapat dipahami sebagai suatu sikap seseorang yang menginginkan perubahan terhadap sesuatu dengan cara menghancurkan yang telah ada dan mengganti dengan sesuatu perubahan yang baru, yang sangat berbeda dengan sebelumnya. Biasanya cara yang digunakan adalah dengan membalikkan nilai-nilai yang ada secara cepat dengan kekerasan dan tindakan-tindakan yang ekstrim atau dengan tindakan-tindakan yang sangat

merusak.¹ Sedangkan radikalisme (*al-tatarruf*) secara etimologi artinya adalah berdiri di posisi ekstrim dan jauh dari posisi tengah-tengah, atau melewati batas kewajaran.

Radikalisme menurut bahasa berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Namun, dalam artian lain, esensi radikalisme adalah konsep sikap jiwa dalam mengusung perubahan. Sementara itu radikalisme menurut pengertian lain adalah inti dari perubahan itu cenderung menggunakan kekerasan.² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme memiliki tiga arti: a) paham atau aliran yang radikal dalam politik, b) paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau *drastic*, c) sikap ekstrem dalam aliran politik.

Radikalisme adalah suatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis

¹ Amien Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 17.

² Kasjim Salenda, *Terorisme dan Jihad* (Jogyakarta: al-Zikra, 2011), h. 93.

dengan menggunakan cara kekerasan.³ Sedangkan radikalisme menurut Kartodirdjo dimaknai berbeda diantara kelompok kepentingan⁴. Sementara itu radikalisme menurut Cross (2013) yaitu sebagai: 1) Istilah dalam lingkup gerakan sosial maupun politik yang berarti sebuah proses, praktik, atau serangkaian keyakinan dari keadaan non-radikal menjadi radikal. Praktik radikalisme sering diasosiasikan dengan sejumlah taktik dan strategi yang berada di luar lingkup aksi protes politis maupun religius yang dapat diterima, bahkan menjurus ilegal. 2) Radikalisme merepresentasikan sisi ekstrim dari (kurva) distribusi aksi politik yang dapat diterima dan radikalisme dapat melibatkan aksi kekerasan atas dasar keyakinan, bukan personal. 3) Radikalisme dapat merujuk pada keyakinan tentang cara terbaik untuk meraih tujuan gerakan. Keyakinan radikal mengembangkan perasaan bahwa cara yang diterima (oleh masyarakat) untuk mengubah keadaan tidaklah cukup dan langkah-langkah luar biasa harus ditempuh.

³ Ariwidodo, E. *Shifting Paradigm of Modern Islam Fundamentalism as Islamized Space Autonomy in Indonesia*, *Kars Journal of Social and Islamic Culture*, 2017, 249-283.

⁴ Kartodirdjo, S. *Ratu Adil*. Sinar Harapan, Jakarta. 1985, 32

Radikalisme adalah kelompok-kelompok yang memaksakan kehendak melalui kekerasan, baik itu radikalisme ideologi maupun radikalisme separatis. Kalau itu dibiarkan akan merusak keutuhan bangsa. Apapun istilahnya, tindakan radikal tidak dapat dibenarkan. Karena itu adalah penyalahgunaan agama, politisasi agama, dan memberikan tafsir-tafsir agama yang tidak moderat, yang radikal, (Wakil Presiden Ma'ruf Amin). Di Indonesia memang ada kelompok radikal, kelompok yang ingin menggantikan Pancasila dan UUD karena itu dianggap tidak cocok, dianggap thaghut, dianggap bagian dari gerakan kafir. Nah itu yang dilakukan. Supaya diingat, pemerintah tidak pernah mengatakan umat Islam itu radikal. Justru pemerintah menganggap umat Islam sebagai umat yang toleran dan mampu menjaga kerukunan antar umat beragama. Justru karena umat Islam tidak radikal itulah maka negara ini sampai sekarang terjaga dengan baik. Karena pada umumnya umat Islam itu setuju dan sangat menerima NKRI berdasar Pancasila, (Menko Polhukam Mahfud MD). Radikalis adalah orang yang berpikir menyelesaikan ketidaksepahaman atau permasalahan dengan cara kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun, itu radikal. Agama mengajarkan kita

menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Jadi, kalau ada orang membawa bendera Islam, tapi bicaranya radikal, maunya main hantam, maunya main bunuh, ya udahlah, itu bukan ajaran Rasulullah, (Menteri Agama Fakhru Rozi).

Kemunculan radikalisme juga dipercaya akibat adanya doktrin politik yang dianut oleh gerakan sosial-politik yang mendukung kebebasan individu dan kolektif, dan emansipasi dari kekuasaan rezim otoriter dan masyarakat yang terstruktur secara hierarkis. Sedangkan dalam ranah keagamaan, radikalisme adalah gerakan yang berusaha merombak total tatanan sosial dan juga politik yang sudah ada dengan menggunakan kekerasan. Dalam lingkup keagamaan, radikalisme merupakan gerakan keagamaan yang berusaha merombak secara total tatanan sosial dan politik yang ada dengan jalan menggunakan kekerasan.⁵ Studi ilmu sosial mengartikan radikalisme sebagai pandangan yang ingin melakukan perubahan yang mendasar sesuai dengan interpretasinya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dianutnya.⁶

⁵ Hasani, I. & Naipospos, B. T. (2010). *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Pustaka Masyarakat, Jakarta.

⁶ Rubaidi, A. *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Logung Pustaka. 2007.

Kemudian Hafid menguraikan bahwa radikalisme merupakan sikap yang membawa pada tindakan untuk melemahkan serta mengubah tatanan yang sudah mapan dan menggantinya dengan gagasan atau pemahaman yang baru, terkadang gerakan perubahan ini disertai dengan tindak kekerasan.⁷

Bila dilihat dari pemahaman agama, gerakan radikalisme agama dapat dimaknai sebagai gerakan berpandangan kolot dan jumud serta kaku aturan, menggunakan kekerasan atau memaksakan pendapat tentang pandangan keagamaan, serta menganggap hanya pemahaman agamanya saja yang benar dan paling sesuai Al-Qur'an dan hadis.⁸ Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, paham keagamaan serta paham politik.⁹

⁷ Hanafi, H. *Islam in the Modern World: Tradition, Revolution and Culture*. Dar Kebaa Bookshop. Cairo, 2000.

⁸ Hafid, W. *Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal)*. Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI 1(1). 2020. 31-46.

⁹ Zainuddin Fanani, *Radikalisme Keagamaan & Perubahan Sosial*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2003, h. 27

Permasalahan radikalisme Islam di Indonesia makin mengakar menjadi besar karena pendukungnya makin meningkat.¹⁰ akibat konstelasi politik, lambat laun konsep radikalisme di Indonesia berbeda tujuan serta tidak mempunyai pola yang seragam. Paham radikalisme di Indonesia ada yang sekedar memperjuangkan implementasi syari'at Islam tanpa keharusan mendirikan negara Islam, namun ada pula paham yang memperjuangkan berdirinya negara Islam Indonesia. Selain itu paham ini memperjuangkan berdirinya paham kekhilafahan yang salah arti dengan menggunakan pola organisasi beragam.¹¹

Dari uraian singkat ini, bisa disimpulkan bahwa radikalisme merupakan suatu gagasan, ide, atau gerakan yang menghendaki perubahan secara menyeluruh baik dalam lingkup sosial, politik, maupun keagamaan dengan mengandalkan cara-cara kekerasan. Radikalisme adalah fanatik kepada satu pendapat serta menegasikan pendapat orang lain, abai terhadap historisitas Islam, tidak dialogis, dan harfiah dalam memahami teks agama tanpa

¹⁰ Asrori, A. *Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas*. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. (2), 2015. 253-268.

¹¹ Turmudi, E. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta:LIPI Press. 2005.

mempertimbangkan tujuan esensial syariat (*mag-tisid al-syarat*).

C. Sejarah Radikalisme di Indonesia

Pada awal penyebaran Islam di Nusantara oleh para Wali Songo, situasi damai dan kondisi toleran terjadi melalui interaksi keragaman budaya kehidupan lokal, bahkan pada masanya Islam dapat hidup damai berdampingan dengan umat lain dan kepercayaan lain.¹² Pada masa pasca kemerdekaan RI separatisme mengatasnamakan Islam mulai terlihat melalui gerakan pemberontakan yang terjadi seperti Kartosuwiryo tahun 1950 dengan nama DI/TII. Operasi ini berhasil digagalkan, namun kembali muncul pada di awal-awal masa pemerintahan Soeharto melalui intelijen Ali Moertopo dengan operasi khususnya. Saat itu, Ali dibantu oleh Bakin untuk merekrut mantan anggota DI/TII dan mengajak mereka melakukan aksi-aksi Komando Jihad yang bertujuan memojokkan Islam. Belakangan ini karena faktor kontigensi yang ada bermunculanlah sekte, aliran, dan mazhab baru yang mengatasnamakan Islam berkembang

¹² Asrori, A. *Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas*. 253-268.

pesat sesuai dengan latar belakang kebudayaan dan kondisi lingkungan pendukung didaerah penganutnya.¹³

Sekitar tahun 1976, kelompok Komando Jihad melakukan peledakan tempat ibadah. Setahun kemudian, Front Pembebasan Muslim Indonesia melakukan hal yang sama. Pada tahun 1978, kelompok Pola Perjuangan Revolusioner Islam semakin memperburuk keadaan dengan melakukan banyak tindakan teror. Setelah Soeharto memundurkan diri, Indonesia mulai masuk pada era demokrasi dan kebebasan. Di masa ini, kelompok radikal menjadi lebih militan dan vokal. Apalagi kehadiran media elektronik secara tidak langsung membuat eksistensi mereka lebih terlihat. Pasca reformasi 98 yang ditandai dengan bebasnya filter demokrasi dan kebebasan berpendapat lebih didahulukan dibanding penegakan hukum, maka radikalisme telah menjadi lahan subur ditandai munculnya kelompok paham baru termasuk paham agama mengatasnamakan Islam radikal.

Dr. Azhari dan Noordin M. Top memimpin beberapa gerakan berbau radikal yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Ambon, Poso, dan yang lainnya. Lambat laun, gerakan-gerakan radikalisme mulai memiliki

¹³ Ibid

tujuan yang berbeda. Ada gerakan yang ingin mengimplementasikan syariat Islam di Negara Indonesia, ada yang ingin mendirikan negara Islam Indonesia, ada pula yang ingin mendirikan “*kekhalifahan Islam*”. Disamping itu, pola organisasinya pun jadi lebih beragam. Mulai dari gerakan moral ideologi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Majelis Mujahidin Indonesia, hingga gerakan yang bergaya militer seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Laskar Jihad.

Paham radikalisme dikalangan umat beragama Islam seringkali disamakan dengan paham keagamaan padahal berbeda konteks dan tujuan dari apa yang diajarkan Islam, pencetus radikalisme lahir dari berbagai kontigensi, mulai dari permasalahan ekonomi, kondisi politik, ketidakadilan sosial dan hukum dan isu marjinal pada kehidupan masyarakat. Pola organisasi paham radikal bervariasi mulai dari gerakan moral ideologi hingga militan bergaya militer. Organisasi ini memiliki tujuannya, tetapi yang menjadi penyamaan tujuan adalah mengganti kekuasaan negara dengan cara menggulingkan pemerintahan dan politik yang sah.

Menurut Hanafi kegagalan Marxisme ketika berpartisipasi dalam perjuangan politik didunia Islam turut

mendorong munculnya radikalisme dalam dunia Islam¹⁴. Marxisme telah memberikan kontribusi dalam sektor industrialisasi dan gerakan pembebasan beberapa negara muslim dari kolonialisme.¹⁵ Namun, marxisme memiliki keterbatasan tidak mampu menyentuh hati masyarakat dan terlanjur diaplikasikan tanpa proses adaptasi dengan lingkungan masyarakat Muslim. Model kolonialisme baru dan agresi negara barat disejumlah negara Muslim ikut menjadi faktor eksternal bagi kemunculan kembali radikalisme di era milenium.¹⁶ Kalangan Islam yang merasa terancam oleh ekspansi militer asing seperti zionisme dan kolonialisme gaya baru merasa perlu melakukan perlawanan dengan bermodalkan *spirit* perjuangan jihad yang diambil dari tradisi pemikiran Islam.¹⁷

Radikalisme yang berujung pada terorisme menjadi masalah penting bagi umat Islam Indonesia dewasa ini. Dua isu itu telah menyebabkan Islam dicap sebagai agama teror dan umat Islam dianggap menyukai jalan kekerasan suci

¹⁴ Hanafi, H. *Islam in the Modern World: Tradition, Revolution and Culture*. Dar Kebaa Bookshop. Cairo. 2000.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Masduqi, I. *Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren*. Jurnal Pendidikan Islam 2(1). 1-20. 2013

¹⁷ Ibid

untuk menyebarkan agamanya. Sekalipun anggapan itu mudah dimentahkan, namun fakta bahwa pelaku teror di Indonesia adalah seorang Muslim garis keras sangat membebani psikologi umat Islam secara keseluruhan. Berbagai aksi radikalisme terhadap generasi muda kembali menjadi perhatian serius oleh banyak kalangan di tanah air. Bahkan, serangkaian aksi para pelaku dan simpatisan pendukung, baik aktif maupun pasif, banyak berasal dari berbagai kalangan. Oleh sebab itu perlu adanya upaya dalam rangka menangkal gerakan radikalisme di Indonesia. Disini peran NU di uji, sejauh mana peran NU dalam menghadapi gerakan tersebut. Dengan semangat toleransi dalam menebarkan Islam yang penuh kedamaian serta rahmatanlilAlamin.

D. Ciri-Ciri Kelompok Radikal

Untuk bisa memahami paham dan sikap radikal secara menyeluruh, kita harus mengenali ciri-cirinya terlebih dulu. Sebab, jika radikalisme sudah teraktualisasi dalam sikap, paham, dan tindakan akan selalu bisa ditandai dengan ciri-cirinya. Syahrin Harahap dalam buku Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme Dan Terorisme menjelaskan bahwa secara garis besar ada 10 ciri kaum

radikal, yaitu: *pertama*, kelompok radikalisme umumnya memahami teks dengan cara yang kaku dan tekstual, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lompat. Contohnya seperti petunjuk kitab suci mengenai kaum kafir mereka jadikan sebagai dasar untuk mengkafirkan orang lain yang tidak seagama atau tidak sepaham. *Kedua* Ekstrem adalah sikap selalu berbeda dengan arus umum, yang *mainstream*, terutama pemerintah. Hal ini didasarkan pada sikapnya yang kaku. Sedangkan fundamentalis adalah orang yang berpegang teguh pada dasar-dasar sesuatu secara kaku dan tekstual. *Ketiga eksklusif*, kelompok radikalisme selalu menganggap bahwa paham dan cara yang mereka anut adalah yang paling benar. Sedangkan paham dan cara pandang orang lain selalu dianggap salah dan keliru. *Keempat* Karena sikap eksklusifnya, kelompok radikalisme mempunyai semangat yang sangat tinggi untuk mengoreksi, menolak, bahkan melawan yang lain. *Kelima* Kaum radikalisme membenarkan cara-cara kekerasan dan menakutkan dalam mengoreksi orang lain, serta dalam menegakkan dan mengembangkan paham maupun ideologinya.

Ciri *keenam* Kesetiaan kelompok radikalisme tidak terhalang oleh jarak sama sekali. Oleh karena itu, tindakan

kelompok ini bisa dikontrol dari jarak jauh. Di sisi lain, karena kesetiaan yang kuat, mereka rela mengorbankan diri sendiri untuk membalas apa yang dialami kelompoknya di negara lain. Misalnya seperti muslim di Indonesia yang ingin menuntut pembalasan atas pembantaian muslim di Rohingnya. *Ketujuh* “Musuh” kelompok radikalisme seringkali tidak jelas identitasnya karena mereka menganggap orang yang tidak sepaham sebagai musuh. Artinya, siapa saja yang memiliki keyakinan, prinsip, pendapat, dan latar belakang yang berbeda berpotensi menjadi musuh kelompok radikal. *Kedelapan* sebagai imbas dari identitas musuh yang tidak jelas, mereka melakukan all out war atau perang mati-matian terhadap musuh agamanya serta yang melakukan kemungkaran. Bagi mereka, membunuh dan mengusir musuh menjadi syarat perang agama. *Kesembilan* Kelompok radikal menganggap negara agama (seperti kekhilafahan dalam Islam) mampu mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera karena menjadikan agama sebagai dasar negara dan hukumnya secara eksplisit. Dan *kesepuluh* Kaum radikal sangat menekankan *tauhiidiyyah hakimiyyah* dan menghukum kafir orang-orang yang tidak menjadikan agama sebagai dasar hukum bernegara dan

bermasyarakat. Misalnya seperti kelompok radikalisme Islam yang menjadikan QS. Al-Maidah ayat 44, 45, dan 47 sebagai dasar dari tindakannya.

Ada beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal: 1) Intoleran (tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain) 2) Fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah) 3) Eksklusif (membedakan diri dari umat Islam umumnya) dan 4) Menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.¹⁸ Tahapan perubahan paham, sikap dan tindakan ini bisa digambarkan dalam proses intoleran, radikal, dan teroris. 1) Intoleran memiliki suatu pandangan yang benci keragaman dan perbedaan. Pada tahap ini intoleransi masih berujud pada paham. Ini awal masuk paham radikal. Tidak menghargai perbedaan dan cenderung menyalahkan orang lain (terpapar dari sisi pikiran/pemahaman). 2) Radikal adalah suatu sikap yang mulai aktif menyalahkan orang lain seperti membid'ahkan dan mengkafirkan dan benci kepada aliran yang berbeda (terpapar dari sisi sikap). 3) Teroris adalah tindakan yang mulai mewujudkan radikalisme dalam tindakan dan aksi kekerasan. Menyikapi perbedaan

¹⁸ *Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja BUMN dan Perusahaan Swasta*, 2020, Tim penyusun, 10

dengan tindakan pembunuhan. Jadi, dapat dikatakan bahwa radikalisme merupakan embrio bagi terorisme yang diawali dengan memiliki sikap intoleran dan berlanjut pada sikap radikal. Terorisme tidak terjadi mendadak dan instan. Seseorang menjadi pelaku teror karena melalui sejumlah tahapan. Tahapan itulah yang disebut dengan radikalisasi.¹⁹

Sedangkan menurut Masduki ciri-ciri radikalisme antara lain (1) Mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul seakan-akan kelompok ini adalah orang suci yang tak pernah melakukan kesalahan *ma'sum* padahal hanya manusia biasa, sementara kebenaran oleh manusia bersifat relatif dan hanya Allah yang tahu kebenaran absolut. (2) Radikalisme mempersulit tata cara Islam yang dianut, bahwa sejatinya ajaran Islam bersifat *samhah* atau toleran dengan menganggap perilaku, hukum dan ibadah. Memahami hukum sunnah seakan-akan wajib dan yang makruh seakan-akan haram atau sebaliknya. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. (3) Kelompok radikal bersikap berlebihan dalam menjalankan

¹⁹ Ibid

ritual agama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah mereka mengesampingkan metode “*Bi al-hikmah*” seperti yang digunakan oleh Nabi SAW, sehingga dakwah yang dilakukan justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan. (4) Mutlak dalam berinteraksi, keras dalam berbicara terutama terkait apa yang diyakininya dan emosional dalam berdakwah atau menyampaikan pendapat.

Karakteristik seperti ini sangat bertolak belakang dengan kesantunan dan kelembutan bagaimana Nabi ketika menyampaikan suatu wahyu. (5) Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain diluar golongannya yang tidak sepaham. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatif dan mengabaikan aspek positifnya walaupun berdampak baik. (6) Paham dari kelompok ini mudah mengkafirkan atau memberi label *takfiri* orang atau kelompok lain yang berbeda pendapat. Pada masa lampau sikap seperti ini identik dengan golongan *Khawarij*, kemudian pada masa kontemporer identik dengan istilah “*Jamaah Takfir wa Bid’ah*” dan kelompok puritan. Kelompok ini mengkafirkan orang lain yang berbuat maksiat, mengkafirkan pemerintah demokratis, mengkafirkan rakyat yang menjalankan penerapan

demokrasi, mengkafirkan umat Islam di Indonesia yang menjunjung tradisi lokal, dan mengkafirkan semua orang bahkan kelompok yang berbeda pandangan dengan mereka, sebab mereka yakin bahwa pendapat mereka adalah pendapat yang paling benar yang sesuai dengan Allah dan Rasul-Nya.²⁰

E. Faktor-Faktor Kemunculan Radikalisme

Menurut McCauley dan Moskalenko (2008) faktor-faktor yang mempengaruhi radikalisme dapat diketahui dari proses radikalisasi itu sendiri. Pada tingkat individual radikalisasi disebabkan oleh kemalangan diri (*personal grievances*) dan kemalangan yang diterima identitas kelompoknya (*identity group grievances*). Individu juga dapat mengalami radikalisasi melalui kelompok kecil yang melakukan pertemuan *face to face*. Kelompok politik dan public teradikalisasi melalui konflik Negara dan melalui konflik dengan kelompok lain. Kemalangan diri tidak ikut serta dalam mendorong pada aksi kekerasan. Kemalangan diri yang dianggap sebagai kemalangan kelompok dapat mendorong aksi kekerasan. Penyebab individu dapat

²⁰ Masduqi, I. (2013) *Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren*. Jurnal Pendidikan Islam 2(1). 1-20.

melakukan aksi kekerasan adalah terjadinya kemalangan politis (*political grievance*) yang dapat mengarah pada keikutsertaan individu pada kelompok radikal. Radikalisasi di dalam kelompok terjadi nilai budaya dalam kelompok berupa cenderung mengumpulkan argument dari satu sudut pandang dalam melihat permasalahan. Serta adanya tekanan dalam kelompok agar para anggota menyamakan opini sesuai dengan semua opini seluruh anggota. Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa radikalisasi juga dapat disebabkan oleh komparasi sosial yang terjadi di dalam kelompok.

Sedangkan menurut Khammami paham radikalisme berkembang di Indonesia disebabkan tiga faktor utama. Faktor pertama adalah perkembangan global bahwa kelompok radikal menjadikan situasi di Timur Tengah sebagai inspirasi untuk mengangkat senjata dan aksi teror atas dasar penderitaan sesama muslim. Kondisi di Afghanistan, pencaplokan Palestina oleh Zionis, Irak, Yaman, Syria, dan seterusnya dipandang sebagai campuran kerjasama Amerika Israel dengan bantuan blok pendukungnya.²¹ Adapun faktor kedua adalah terkait

²¹ Khammami, Z. *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Teraju. Jakarta. 2002.

dengan kian tersebar luasnya paham Wahabisme yang mengagungkan budaya Islam ala Arab yang konservatif. Wahabisme dianggap bukan sekadar aliran, pemikiran, atau ideologi, melainkan mentalitas yang membuat batas kelompok yang sempit dari kaum muslimin sendiri, sehingga dengan mudah mereka mengatakan diluar kelompok mereka yang berbeda sikap, pandangan dan pemikiran adalah kafir, musuh, dan wajib diperangi. Faktor ketiga adalah karena kemiskinan atau keadilan sosial. Kondisi ini tidak berpengaruh langsung terhadap merebaknya aksi radikalisme, namun perasaan termarjinalkan adalah hal utama yang kemungkinan membuat keterkaitan kuat antara kemiskinan yang terjadi dan laten radikalisme. Situasi seperti itu menjadi persemaian subur bagi radikalisme dan terorisme.²²

Radikalisme muncul di Indonesia disebabkan perubahan tatanan sosial dan politik yang tidak sepaham dengan kelompok radikal²³. Ideologi baru yang dianut lebih keras dan tidak mengenal toleransi, sebab banyak dipengaruhi oleh mazhab pemikiran Muhammad bin Abdul

²² Ibid

²³ Asrori, A. *Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas*. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam. (2), 2015. 253-268.

Wahab atau Wahabi yang saat ini menjadi ideologi resmi pemerintah Arab Saudi²⁴. Menurut Al-Qardawi bahwa kemunculan radikalisme atau gerakan “*al-tatharruf*” disebabkan oleh (1) Pengetahuan agama yang parsial bahkan melalui proses belajar yang doktriner pada kalangan pelajar atau mahasiswa dari sekolah atau perguruan tinggi berlatar belakang umum (2) Literal dalam memahami konsep agama sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari perspektif subjektif saja tetapi dan minim wawasan tentang esensi agama (3) Berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang memberatkan umat (4) Lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwa paham radikal sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat, dan semangat zaman (5) Radikalisme muncul sebagai reaksi terhadap bentuk yang dianggap radikalisme yang lain seperti sikap radikal kaum sekular yang menolak agama. (6) Perlawanan terhadap ketidakadilan perlakuan sosial, ekonomi, hukum dan politik ditengah masyarakat.²⁵

Radikalisme muncul dari respon rasa frustrasi dan pemberontakan terhadap ketidakadilan sosial yang

²⁴ Ibid

²⁵ Al-Qardhawi, S., Y.). *Al-Shahwah al-Islamiyah bayn al-Juhud wa al-attarruf*. Bank al-Taqwa. Cairo. 1986

disebabkan oleh lemah dan mandulnya kinerja lembaga hukum.²⁶ Lembaga hukum di Indonesia yang masih carut marut, tebang pilih dalam penanganan kasus, putusan pengadilan dalam menjatuhkan vonis hukum yang tidak adil, serta keberpihakan hukum dapat menjadi stimulus penyebab paham radikalisme berkembang. Kegagalan pemerintah dalam menegakkan keadilan akhirnya direspon oleh kalangan radikal dengan tuntutan penerapan syari'at Islam. Dengan harapan, bila menerapkan aturan syari'at kelompok yang merasa terzalimi ini akan mampu menegakkan keadilan, namun tuntutan penerapan syariah pasti diabaikan oleh negara terutama Indonesia karena tidak sesuai dengan paham bernegara, sehingga mereka frustrasi dan akhirnya memilih cara kekerasan dalam menyampaikan tujuannya²⁷.

Pendapat agak berbeda dikemukakan oleh Khammami bahwa kemunculan radikalisme dari sisi agama disebabkan karena dua faktor yaitu *pertama* faktor internal dari dalam umat Islam karena adanya penyimpangan norma agama dengan pemahaman agama yang totalistik sempit dan formalistik yang bersikap kaku dalam memahami

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

konsep agama. Paham ini memandang agama dari satu arah yaitu tekstual, tanpa melihat dari sumber lain. Faktor *kedua* berasal dari kondisi eksternal diluar umat Islam yang menjadi pendukung untuk melakukan penerapan syari`at Islam dalam sendi-sendi kehidupan.²⁸ Ada beberapa faktor yang menyebabkan proses radikalisasi berjalan dari intoleransi, radikalisme ke terorisme. Faktor-faktor tersebut: 1. Pertama, Faktor domestik, yakni kondisi dalam negeri yang semisal kemiskinan, ketidakadilan atau merasa kecewa dengan pemerintah. 2. Kedua, faktor internasional, yakni pengaruh lingkungan luar negeri yang memberikan daya dorong tumbuhnya sentimen keagamaan seperti ketidakadilan global, politik luar negeri yang arogan, dan imperialisme modern negara adidaya. 3. Ketiga, faktor kultural yang sangat terkait dengan pemahaman keagamaan yang dangkal dan penafsiran kitab suci yang sempit dan leksikal (*harfiyah*).²⁹

Pada masa sekarang ini media online dan media sosial online menunjang terjadinya radikalisasi. Qin (2010) menyatakan bahwa sebagian besar kelompok teroris

²⁸ Khammami, Z. *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam*....., 43

²⁹ *Panduan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kerja BUMN dan Perusahaan Swasta*...., 17

memfokuskan kegiatan mereka pada ranah aktivisme seperti penyebaran propaganda, publisitas, perekrutan, pengembangan jaringan, dan mobilisasi. Hal tersebut mendukung penelitian Thompson (2011) bahwa media sosial digunakan sebagai alat untuk meradikalisasi oleh individu maupun kelompok demi perubahan politis dan sosial. Media sosial efektif menghubungkan orang-orang dengan sumber informasi berbeda serta membuat individu seolah terlibat langsung dalam suatu kejadian. Maka penggunaan media sosial dapat meningkatkan reaksi emosional agar terlibat dan menjadi pendukung gerakan radikal. Dengan demikian dapat diringkas bahwa media sosial dapat digunakan sebagai penyebaran paham atau propaganda, rekrutmen anggota baru, dan menyebarkan ketakutan untuk menimbulkan asumsi bahwa kelompok tersebut kuat. Peran media sosial lainnya yaitu mempertahankan pendapat kelompok dengan membagikan opini dari media massa yang sesuai dengan opini kelompok dan menghalangi pendapat berbeda meskipun berasal dari anggota kelompok.

F. Solusi Mengatasi Radikalisme

Paham radikal akan berkembang ditengah masyarakat ketika ketidakadilan sosial dan hukum, kondisi kemiskinan serta penyimpangan paham islam yang sempit, maka dibutuhkan keterlibatan semua pihak dari pemangku kepentingan masyarakat dan pemerintahan negara Indonesia. Negara diharapkan hadir secara cepat dan tanggap dalam meredam konflik atas nama agama dan SARA sekaligus memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat³⁰. Negara melalui perangkat aparturnya wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebenar-benarnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dari sisi perlakuan hukum, pelayanan fasilitas dan pemenuhan kebutuhan segenap warga negara. Pembinaan mental dan spiritual generasi muda di lembaga pendidikan formal maupun nonformal agar terhindar dari paham radikal.

Al-Qardhawi berupaya menawarkan solusi-solusi yang harus ditempuh guna mengatasi masalah radikalisme: *Pertama*, menghormati aspirasi kalangan Islamis melalui

³⁰ Hafid, W. *Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal)*....., 48

cara-cara yang demokratis. *Kedua*, memperlakukan mereka secara manusiawi dan penuh persaudaraan. *Ketiga*, tidak melawan mereka dengan sikap yang sama-sama ekstrem dan radikal. Artinya, kalangan radikal ekstrem dan kalangan sekuler ekstrem harus ditarik ke posisi moderat agar berbagai kepentingan dapat dikompromikan. *Keempat*, dibutuhkan masyarakat yang memberi kebebasan berpikir bagi semua kelompok sehingga akan terwujud dialog sehat dan saling mengkritik antar isme-isme secara simpatik. *Kelima*, menjauhi sikap saling mengafirkan dan tidak membalas pengafiran dengan pengafiran. *Keenam*, mempelajari agama secara benar sesuai dengan metode-metode yang sudah ditentukan oleh para ulama Islam dan mendalami esensi agama agar menjadi Muslim yang bijaksana. *Ketujuh*, tidak memahami Islam secara parsial dan reduktif.³¹

Caranya adalah dengan mempelajari esensi tujuan syariat (maqosid syari'ah). Dengan mengamalkan esensinya, umat Islam tidak akan terikat pada hal-hal yang bersifat atribut jubah dan celana di atas mata kaki adalah contoh pemahaman agama yang simbolis. Sejatinya, Nabi

³¹ Al-Qardhawi, S., Y.). *Al-Shahwah al-Islamiyah bayn al-Juhud wa al-attarruf*.....32

tidak pernah menentukan jenis-jenis pakaian, tetapi Nabi memakai berbagai model pakaian yang simpel dan fleksibel. *Pertama* Pengenalan tentang ilmu pengetahuan sudah seharusnya ditekankan kepada siapapun termasuk pada generasi muda. Pasalnya, pemikiran generasi muda masih mengembara karena didorong oleh rasa keingintahuannya. Memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum, tetapi juga ilmu agama. Karena ilmu agama dapat membangun pondasi yang kuat terhadap sikap, perilaku dan keyakinan pada Tuhan. Dengan catatan, ilmu umum dan ilmu agama ini harus seimbang agar bisa menciptakan pemikiran yang seimbang. *Kedua* setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan, langkah berikutnya adalah memaksimalkan pemahaman yang baik dan benar. Dengan begitu, pemikiran masyarakat Indonesia akan semakin kokoh, kuat, dan tidak mudah dipengaruhi oleh paham-paham radikalisme. *Ketiga* Kesenjangan sosial dapat memicu kemunculan paham radikalisme dan tindakan terorisme. Dengan demikian kesenjangan sosial harus diminimalisir, terutama kesenjangan antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah harus merangkul pihak media yang menjadi perantara mereka dengan rakyat, selain itu pemerintah juga harus melakukan aksi nyata secara

langsung kepada rakyat. Sementara itu, rakyat harus selalu mendukung dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Keempat menjaga persatuan dan kesatuan bisa dilakukan untuk menangkal radikalisme dan terorisme di masyarakat. Salah satu contohnya adalah dengan memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. *Kelima* Aksi perdamaian dari negara, individu, maupun organisasi dapat mencegah munculnya tindakan terorisme. Umumnya tindakan terorisme ini berawal dari pemikiran radikalisme yang menyimpang dan menimbulkan konflik. *Keenam* Kita juga harus berperan aktif untuk melaporkan kemunculan pemahaman radikalisme dan tindak terorisme di sekitar kita kepada pihak berwajib. Misalnya, jika di dekat rumahmu muncul pemahaman baru tentang keagamaan yang menimbulkan keresahan di masyarakat, langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah melaporkannya kepada tokoh masyarakat atau polisi. Dengan begitu, nantinya para tokoh masyarakat atau polisi dapat mengambil tindakan pencegahan awal seperti berdiskusi tentang pemahaman baru tersebut atau yang lainnya.

Ketujuh Dengan meningkatkan pemahaman hidup kebersamaan kita dapat terus mempelajari dan memahami cara bermasyarakat di tengah banyaknya perbedaan. Hal ini dapat memicu tumbuhnya sikap solidaritas dan toleransi tanpa harus mengesampingkan peraturan yang berlaku di masyarakat. *Kedelapan* Cara lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah radikalisme dan tindakan terorisme yaitu dengan selalu menyaring informasi yang ada di internet. Informasi-informasi yang tersebar di berbagai media sosial sering kali mengundang kebingungan dan keanehan karena kebenarannya tidak pasti. Oleh karena itu, kita harus menyaring informasi dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. *Kesembilan* Selanjutnya, kita dapat ikut aktif mengedukasi masyarakat tentang radikalisme dan terorisme.

Sedangkan Masduqi menyarankan agar Pendidikan pengajaran agama Islam yang terinfiltrasi oleh paham radikal perlu dilakukan reorientasi ke arah yang sesuai dengan spirit Islam yang mengajarkan saling menghargai dan persaudaraan. Perencanaan tentang konsep pendidikan Islam yang seimbang dengan penerapan prinsip "*Hablum minallah-hablum minannas*" toleran, inklusif, humanis dan multikulturalis yang mengajarkan kasih sayang sesama

mahluk ciptaan Tuhan, kesantunan, menghormati orang lain, dan kerukunan harus dimulai sejak pendidikan dasar, sehingga dimasa mendatang pastinya dapat mendorong terwujudnya keharmonisan dalam bernegara³². Oleh karena itu, kita membantu masyarakat memahami apa yang dimaksud dengan paham radikalisme. Selain itu, kita juga bisa menjelaskan tentang budaya radikal, dampak negatif yang ditimbulkan, dan cara-cara untuk menghindari pengaruh radikalisme. Radikalisme bertujuan untuk membuat perubahan drastis dengan menggunakan kekerasan. Perbuatan ini bertentangan dengan agama karena pada dasarnya semua agama mengajarkan perdamaian dan kasih sayang kepada umatnya.

G. Radikalisme di Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi adalah sumber ilmu sekaligus wadah pemasok utama sumber daya manusia bangsa. Di sinilah calon-calon intelektual digembleng dan dibina untuk mempersiapkan generasi penerus yang akan membawa bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Dengan posisinya yang sedemikian strategis,

³² Masduqi, I. (2013) *Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren*.....23

Perguruan Tinggi selayaknya steril dari semua paham yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila sebagai ideologi bangsa, atau kegiatan-kegiatan lain yang bertolak belakang dengan peran dan fungsi luhur lembaga.

Ironisnya, pada akhir-akhir ini perguruan tinggi telah mulai dirasuki virus-virus berbahaya yang ditandai dengan munculnya paham radikalisme keagamaan di kalangan mahasiswa. Hal ini sebagaimana dilansir oleh Badan Intelijen Negara (BIN) pada tahun 2017 yang menyebutkan ada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang terpapar radikalisme. Selain itu, ada 39% mahasiswa di 15 provinsi menunjukkan ketertarikannya pada paham radikal yang dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yakni: rendah, sedang, dan tinggi. Meski ketertarikan tersebut masih sebatas empati, namun pencegahan sejak dini perlu dilakukan agar kecenderungan tersebut tidak berkembang menjadi partisipasi."³³

Pada awal munculnya gerakan atau paham radikal di Perguruan Tinggi, analisis tertuju pada Perguruan Tinggi umum (sekuler). Ada banyak penelitian yang menguatkan kesimpulan itu, misalnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Litbang Departemen Agama tahun 1996 pada empat perguruan tinggi sekuler (UI, UGM, Unair, dan Unhas). Laporan penelitian yang dilakukan oleh Litbang Departemen Agama tahun 1996 pada empat perguruan tinggi sekuler (UI, UGM, Unair, dan Unhas) itu menunjukkan terjadi peningkatan aktivitas keagamaan di empat kampus umum sekaligus menjadi tempat yang paling potensial berkembangnya aktivitas keislaman (religius) yang cenderung eksklusif dan radikal. Dengan demikian, revivalisme Islam tidak muncul dari kampus-kampus berbasis keagamaan, tetapi dari kampus-kampus sekuler (umum).

Perguruan tinggi umum lebih mudah menjadi target perekrutan gerakan-gerakan radikal, daripada perguruan tinggi berbasis keagamaan yang dianggap lebih sulit. Dalam pengukuhan guru besarnya, Masdar Hilmy menegaskan gerakan radikalisme lebih sering menyerang mahasiswa di universitas umum dengan

jurusan eksakta (matematika, fisika, kimia, dan biologi). "Mahasiswa eksakta di universitas umum lebih mengandalkan ilmu logika dalam setiap memutuskan segala hal, kalau di UIN yang sudah sering diberi wawasan tentang madzab dalam Islam maka akan lebih bisa mengambil keputusan tentang tawaran bergabung gerakan radikalisme," katanya.

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya ini mencontohkan gerakan radikalisme yang dilakukan kelompok bawah tanah memberikan pesan bahwa kelompok bawah tanah jarang tersentuh oleh kebijakan pemerintah. Ini menjadi pemicu radikalisme, tidak adanya persamaan persepsi antara kebijakan dengan kelompok atau golongan, adanya dorongan rasa ingin tahu tanpa diimbangi perhatian dari orang tua untuk mahasiswa. "Gerakan radikalisme yang lebih sering ditujukan pada mahasiswa karena masa itulah sering terjadi pemberontakan dalam diri untuk memenuhi kebutuhan dan tidak stabilnya emosi mahasiswa serta keluarga yang tidak ada perhatian dan lingkungan yang tidak Islami," ujarnya. (Antara Jatim, 6/4/2016).

Perkembangan terakhir tentang radikalisme, ternyata bukan saja di Perguruan tinggi umum

(sekuler), sebagaimana di awal perkembangannya dulu di Indonesia. Ternyata faktanya menunjukkan gerakan radikal pun sudah marak dan subur di kampus-kampus berbasis keagamaan. M Zaki Mubarak menguraikan secara rinci tentang radikalisme di UIN Jakarta. Sejak 2009. Ada tiga mahasiswa (alumni) berinisial AR, SJ, dan FF terlibat dalam kasus rangkaian terorisme Bom Mega Kuningan (bom bunuh diri di JW Merriott dan Ritz Carlton yang sangat menggemparkan dunia), karena terdakwa menyembunyikan dua gembong teroris Bom Mega Kuningan (Syaifudin Zuhri dan Syahrir). Pada September 2010 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, majelis hakim memvonis ketiga tersangka Bom Mega Kuningan dengan 4 tahun 6 bulan penjara yang semula dituntut 7 tahun penjara.

Pada bulan April 2011, peristiwa teror "Bom Buku" terjadi. Dari 17 terduga teroris yang ditangkap diketahui empat (Pepi Fernando, M Fadil, Hendi Suhartono alias Jokaw, dan Muhammad Maulani Sani) di antaranya ternyata merupakan alumni (pernah menempuh kuliah) di UIN Jakarta. Pepi menjadi aktor utama aksi teror bom buku yang dikirimkan kepada Ulil Abshar Abdalla, Ahmad Dhani, Yapto Soerjoseomarno,

dan Gorris Mere, bahkan Pepi dan jaringannya tengah mempersiapkan pengeboman sebuah gereja. Menurut Zaki, diduga kuat berkembangnya pemahaman keberagamaan radikal di UIN Jakarta ini tidak dapat dipisahkan dengan fakta terjadinya perubahan iklim kehidupan kampus yang lebih terbuka pascareformasi politik 1998. Longgarnya kegiatan kemahasiswaan di kampus telah menjadikan perguruan tinggi (UIN Jakarta), sebagai ajang kontestasi berbagai kelompok dan aliran keagamaan yang semakin beragam.

Fenomena keberagamaan radikal yang semakin meningkat di kalangan mahasiswa, dapat dilihat sebagai efek dari tren yang lebih besar atau nasional (makro). Meskipun UIN Jakarta lama dikenal sebagai kampus Islam yang getol mengampanyekan pemikiran keagamaan modern, bahkan dianggap liberal, nyatanya institusi pendidikan Islam ini tidaklah imun dari gelombang perubahan-perubahan tersebut. Pergeseran dari perguruan tinggi umum ke keagamaan dapat membuktikan; Pertama, telah terjadi perubahan di dalam perguruan tinggi berbasis keagamaan itu sendiri.

Kedua, telah terjadi metamorfosis bentuk dan strategi gerakan di internal gerakan-gerakan radikal.³⁴

Melalui penelitian yang dilakukan hingga bulan April 2019 lembaga ini menemukan sekurang-kurangnya 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia telah terpapar faham radikal keagamaan.³⁵ Faham tersebut dibawa oleh kelompok keagamaan yang eksklusif dan monolitik, yakni: kelompok Salafi-Wahabi, Tarbiyah, dan Tahririyah. 3 Kelompok ini menyasar organisasi kemahasiswaan mulai dari Lembaga-lembaga Dakwah Kampus, UKM, Lembaga Kemahasiswaan, hingga masjid kampus.³⁶ Ada tiga wacana keagamaan yang dikembangkan dalam komunitas ini: Pertama, propaganda bahwa keselamatan hidup, baik pribadi maupun bangsa, hanya bisa diraih

³⁴<http://repository.iainbengkulu.ac.id/4826/1/Literasi%20Paham%20Radikalisme%20di%20Indonesia%20fix.pdf>

³⁵ 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tersebut meliputi; Universitas Indonesia (UI), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Riset juga dilakukan di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Mataram (Unram), dan Universitas Airlangga (Unair).

³⁶

<http://repository.radenintan.ac.id/12890/1/radikalisme%20di%20perguruan%20tinggi.pdf>

lewat ketaatan terhadap “jalan Islam”. Kedua, propaganda bahwa Islam sedang dalam ancaman musuh-musuhnya (Kristen, Zionisme, imperialisme Barat, kapitalisme, serta kaum Muslim sekular dan liberal). Ketiga, ajakan untuk melakukan perang pemikiran (*ghazw al-fikr*) dalam rangka melawan berbagai ancaman tersebut demi kejayaan Islam.³⁷

Dampak dari munculnya radikalisme di kampus bukan saja telah mengganggu konsentrasi mahasiswa dalam menekuni kegiatan perkuliahan, secara lebih jauh lagi juga mengganggu hubungan antar sesama komponen bangsa. Mereka yang telah terpapar tidak lagi mau beribadah dengan orang yang tidak sefaham, mengkafirkan orang yang berada di luar kelompoknya, menutup diri dari pergaulan dan bahkan meninggalkan kuliah. Situasi yang demikian ini sudah barang tentu perlu mendapat perhatian semua pihak. Karena jika fenomena ini dibiarkan, akan lahir kelompok-kelompok masyarakat yang radikal eksklusif dan intoleran yang pada gilirannya akan merusak kerukunan antar umat beragama, kebhinekaan dan nilai-nilai Pancasila, serta mengancam keutuhan dan persatuan bangsa.

³⁷ Ibid

Dalam upaya menghadapi maraknya penyebaran paham radikal di lingkungan kampus, sejumlah para pemangku kebijakan baik dari kalangan birokrasi pemerintahan maupun kampus, telah membuat berbagai kebijakan antisipatif, preventif maupun kuratif guna mencegah berkembangnya paham radikal. Kemenristekdikti, misalnya, telah meminta semua perguruan tinggi untuk terus mensosialisasikan Empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dan melakukan pendataan nomor telepon dan pemantauan akun media sosial (medsos) pegawai, dosen, dan mahasiswa guna mencegah radikalisme dan intoleransi yang kerap menyebar melalui media sosial.

Radikalisme merupakan momok yang mengerikan bagi Bangsa Indonesia. Paham radikalisme tumbuh subur dan menyusup melalui lingkungan perguruan tinggi, menancapkan, mendoktrin secara pelan dan perlahan tapi pasti. Mahasiswa menjadi sasaran empuk untuk bisa mendulang kekuatan dalam menebarkan virus ekstrim yang nilai simpatik dan peduli terhadap sesama dilunturkan, kelembutan dan kasih sayang berubah menjadi kekerasan, dan tawuran.

Toleran berubah menjadi intoleran melawan keberagaman yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kebhinneka tunggal ika yang sudah menjadi semboyan sengaja dibenturkan dengan berbagai alasan yang kadang tidak masuk akal.

Radikalisme bisa juga dikatakan suatu faham atau cara berfikir yang menjadi landasan untuk melakukan gerakan kriminal atau teror meskipun dilihat akar sejarahnya radikalisme bersifat positif. Dalam dunia pendidikan tinggi tidak bisa terhindar dari fenomena fenomena kekerasan yang menjadikan tujuan pendidikan tinggi gagal di raih. Radikalisme bisa muncul dari berbagai elemen dalam pendidikan. Secara umum fenomena radikalisme dalam pendidikan tinggi lahir dari dosen kepada mahasiswa, dari mahasiswa kepada dosen dan juga dari orang tua/masyarakat kepada elemen elemen yang ada di dalam pendidikan tinggi.

Bentuk radikalisme dalam pendidikan tinggi tidak semuanya berupa aksi kekerasan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan dan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Sikap yang

berpotensi melahirkan kekerasan tersebut berimplikasi kepada munculnya situasi dan kondisi lingkungan kampus yang tidak menyenangkan bagi mahasiswa dalam belajar. Peran atau fungsi perguruan tinggi Islam yang memiliki fitrah membimbing, mengarahkan, mengkaji ilmu pengetahuan, dan belajar bagi mahasiswa sekarang sudah berubah atau bergeser menjadi lembaga yang menakutkan, mencemaskan, menegangkan, bahkan menyiksa lahir dan batin pada sebagian mahasiswa. Mengapa demikian? karena orientasi pendidikan sudah berkurang yang awalnya sebagai bagian dari proses penyadaran menjadi proses pemaksaan dalam mengetahui, memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Perubahan situasi dan lingkungan serta suasana pendidikan yang melahirkan perubahan orientasi tersebut bukanlah tanpa sebab. Justru perubahan atau pergeseran itu merupakan akibat dari perkembangan atau dinamika budaya yang menerpa masyarakat. Artinya masing masing elemen dalam pendidikan tidak mampu mengambil nilai nilai positif atau manfaat akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Mayoritas masyarakat justru mengambil

makna negatif dari perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Misalnya, gerakan reformasi yang tujuannya sangat mulia untuk menegakkan aturan dan keadilan malah menjadi ajang saling “pembantaian” sosial. Transparansi yang dimaksudkan untuk sarana pertanggung jawaban tugas dan perannya malah berubah menjadi ajang mencari cari kesalahan orang lain yang akhirnya menyengsarakan pihak pihak tertentu. Sikap humanis atau memanusiaan orang lain yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya saling menghargai dan menghormati malah berubah menjadi realitas saling menyepelkan yang berujung tidak ada kepatuhan satu dengan lainnya.³⁸

Etika dan sopan santun yang seharusnya dijunjung tinggi semua pihak, tetapi di lembaga pendidikan tinggi seakan akan tidak ada lagi saling hormat antar dosen, antara mahasiswa kepada dosen dan antara dosen dengan pimpinan. Mahasiswa instan, kampus serba mudah, cepat dan meraih hasil yang memuaskan. Dosen juga selalu mengharap pekerjaan

³⁸ M. Saekan Muchith, *Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan*, Addin, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, 173-174

yang serba mudah sehingga terkesan tidak mau repot dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Orang tua yang seharusnya mendukung penuh proses pendidikan dan pembelajaran anaknya juga terkesan kurang perhatian atau kurang mendukung sehingga seolah olah perguruan tinggi dibiarkan menjalankan tugas tugas pendidikan.

H. Faktor Penyebab Radikalisme di Perguruan Tinggi

Berdasarkan fakta tumbuh dan berkembangnya radikalisme di Perguruan Tinggi, menyebabkan teori besar selama ini menyatakan bahwa potensi radikalisme kerap kali dimotivasi dan dilatari oleh konteks sosiopolitik gerakan anti-Barat, maka penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendalaman kualitatif mutakhir justru menunjukkan kecenderungan berbeda. Pertama, potensi radikalisme di kalangan mahasiswa justru timbul karena faktor internalisasi pemahaman keagamaan yang cenderung ideologis dan tertutup dan tidak semata-mata beriringan dengan gerakan radikalisme yang bermotif politik anti Barat; Kedua, potensi radikalisme yang berbasis pada pemahaman ideologis yang cenderung kaku dan hitam-

putih itu terjadi di semua agama, baik di lingkungan mahasiswa Muslim, Katolik, Kristen, Hindu, maupun Buddha.

Menarik untuk melihat pendapat Yusuf al-Qardawi dalam bukunya yang berjudul *al-Shahwah al-Islamiyah Bayn al-Juhud wa al-Tattarruf* bahwa, setidaknya ada tujuh faktor yang mempengaruhi kemunculan Radikalisme di Perguruan Tinggi di antaranya adalah:

- a. Pengetahuan agama yang setengah-setengah melalui proses belajar yang terdoktriner.
- b. Literal dalam memahami teks-teks agama sehingga kalangan radikal hanya memahami Islam dari kulitnya saja akan tetapi sangat minim pengetahuannya tentang wawasan tentang esensi agama.
- c. Tersibukkan oleh masalah-masalah sekunder seperti menggerak-gerakkan jari ketika tasyahud, memanjangkan jenggot dan meninggikan celana sembari melupakan masalah-masalah primer.
- d. Berlebihan dalam mengharamkan banyak hal yang justru memberatkan umat.

- e. Lemah dalam wawasan sejarah dan sosiologi sehingga fatwafatwa mereka sering bertentangan dengan kemaslahatan umat, akal sehat dan semangat zaman.
- f. Radikalisme tidak jarang muncul sebagai reaksi terhadap bentuk-bentuk Radikalisme yang lain seperti sikap radikal kaum sekular yang menolak agama.³⁹

Selain faktor tersebut dapat juga dilihat masifnya perkembangan organisasi mahasiswa yang dikenal dengan organisasi ekstra kampus, seperti KAMMI dan lain-lain. KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) adalah sebuah organisasi mahasiswa muslim yang lahir di era reformasi yaitu tepatnya pada tanggal 29 Maret 1998 di Malang. Lahirnya organisasi ini didasari oleh keprihatinan yang mendalam terhadap krisis nasional tahun 1998 yang melanda negara Indonesia. Salah satunya adalah krisis kepercayaan terutama pada sektor kepemimpinan. Kemudian para pimpinan aktivis berinisiatif untuk membangkitkan kepekaan pemimpin

³⁹ Al-Qardhawi, Yusuf. *“al-Shahwah al-Islamiyah bayn al-Juhud wa al-Tatarruf”*. Bank al-Taqwa: Cairo, 1406 H

aktivis dan berkumpul di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) untuk mendirikan organisasi KAMMI.⁴⁰

Sebagai sebuah organisasi yang terlahir dari antitesa pengekangan orde baru terhadap kebebasan sosial politik dunia kampus. KAMMI seperti menjadi sebuah pelarian bagi aktifis dakwah kampus yang hanya beraktivitas di dalam masjid. Pasalnya kemunculannya yang tak terduga sebelumnya merupakan sebuah inisiatif yang lahir dari kalangan muslim kampus. Dalam perkembangannya lebih dari 19 tahun KAMMI lahir di Indonesia mengalami banyak dinamika. Mengingat pada awal berdirinya KAMMI merupakan organisasi ekstra kampus berlandaskan Islam sebagai organisasinya. Kemudian pada saat ini KAMMI tidak hanya menjadi organisasi ekstra kampus melainkan menjadi OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda).

Selain KAMMI dikenal juga Gema Pembebasan. Sejarah mencatat pergerakan mahasiswa di Indonesia dimulai pada tahun 1908 yang menandai

⁴⁰ Amrullah, Taufik. *“KAMMI Menuju Muslim Negarawan, Meretan Kebangkitan Indonesia”*. Muda Cedikia: Bandung, 2008.

munculnya pergerakan nasional sampai mencapai klimaksnya pada tahun 1998 ketika mahasiswa bersama buruh, tani, rakyat, miskin kota bersatu padu merebut demokrasi menumbangkan pemerintahan yang dianggap diktator, rezim Presiden Soeharto (Orde Baru). Kemudian pada orde baru tidak hanya agenda reformasi yang tidak tercapai, didekade terakhir pasca reformasi, gerakan mahasiswa pun dianggap stagnan dan bahkan mengalami kemunduran.

Pada tanggal 28 Februari 2004 resmi dibentuk sebuah gerakan mahasiswa yang diberi nama Gema Pembebasan. Tujuan berdirinya organisasi ini tak lain untuk menjadikan idiologi Islam sebagai arus utama meskipun hal sedemikian sangat bertentangan dengan mayoritas umat Islam pada umumnya. Kemudian munculnya Gerakan Mahasiswa Pembebasan di Indonesia tidak terlepas dari peran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Walaupun Hizbut Tahrir menganggap bahwa dirinya adalah partai politik tetapi di Indonesia HTI terdaftar di Depertemen hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Ormas Islam.

HTI yang melihat permasalahan mahasiswa dan bangsa Indonesia serta melihat potensi gerakan

mahasiswa yang strategis tersebut. Kemudian membuat sebuah divisi khusus untuk mahasiswa, yaitu divisi mahasiswa (Lajnah Mahasiswa) yang disebut dengan “HTI Chapter”. Namun dalam implementasinya HTI Chapter mendapatkan kendala dalam melakukan aktivitas perekrutannya di kalangan mahasiswa. Kendala tersebut adalah persepsi mahasiswa pada umumnya menganggap bahwa HTI merupakan kelompok keagamaan yang terdiri atas ulama-ulama dan ustadz yang hanya membahas persoalan-persoalan agama saja. Melihat persoalan tersebut, aktivis HTI yang bersatus mahasiswa di Kota Surabaya kemudian berinisiatif membentuk sebuah organisasi di kalangan mahasiswa untuk membantu HTI dalam melakukan infiltrasi di kalangan mahasiswa tanpa menggunakan nama HTI secara langsung.

Pada awal tumbuh kembangnya organisasi ekstra kampus tersebut, dapat dikatakan luput dari perhatian petinggi kampus yang bertugas membina mahasiswa. Fokus pembinaan mahasiswa lebih tertuju kepada organisasi kemahasiswaan (ORMAWA) yang internal kampus. Di sisi lain, kesan religius yang ditampakkan aktifis mahasiswa yang terdidik dari organisasi ekstra

kampus tadi, turut membentuk persepsi positif terhadap mereka dari pimpinan kampus.

BAB II

KEPEMIMPINAN PADA PERGURUAN TINGGI

A. Pendahuluan

Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Pemimpin bukan sekadar memerintah orang di bawahnya. Sosok pemimpin membantu diri mereka sendiri dan orang lain untuk melakukan hal yang benar. Mereka menetapkan arah, membangun visi yang menginspirasi, dan menciptakan sesuatu yang baru.

Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan melalui proses yang panjang. Kepemimpinan sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Richard H. Hall dalam bukunya berjudul *Organizations: Structure and Proses*, dikatakan bahwa di dalam situasi tertentu

kepemimpinan dirasakan penting, bahkan amat penting (*critical*). Oleh karena itu dapat dikatakan kepemimpinan memiliki peran sentral dalam organisasi. Kepemimpinan adalah tentang memetakan ke mana Anda harus pergi untuk berhasil sebagai tim atau organisasi. Kepemimpinan pada dasarnya adalah sesuatu yang berkenaan dengan penggunaan pengaruh dan kekuasaan. Ketika menyangkut berbeda jenis kelompok, maka memerlukan model kepemimpinan yang berbeda. Disamping itu kontribusi pribadi tidak bisa dipisahkan dengan mudah dari total kinerja kelompok. Hal tersebut menyiratkan bahwa setiap kelompok membutuhkan hubungan yang berbeda dimana pemimpin menggunakan kekuasaan dan pengaruh.⁴¹

Dengan melihat betapa pentingnya kepemimpinan pada perguruan tinggi, maka perlu kiranya melihat pendapat Stogdil (1981) bahwa “Kepemimpinan merupakan sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu

⁴¹ Fiedler. F.E. *A Theory Of Leadership Effectiveness*. McGraw-Hill Book. Co. 1967.375

jabatan administratif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Selanjutnya Tannenbaum, Weshler dan Massarik, (1961) mengemukakan *“Leadership in interpersonal influence exercised in a situation, and directed, through the communication process, toward the attainment of a specified goal or goals”*. Dan ketika seorang pemimpin menetapkan tujuan, mereka juga harus menggunakan keterampilan manajemen mereka untuk membimbing orang-orang mereka ke tujuan yang tepat, dengan cara yang efektif dan efisien.

Demikianlah esensi kepemimpinan, maka dalam situasi tertentu kepemimpinan dirasakan penting, bahkan amat penting (*critical*). Sedikitnya ada empat alasan mengapa pemimpin diperlukan: (a) karena banyak orang yang memerlukan figur pemimpin, (b) dalam beberapa situasi seorang pemimpin perlu tampil mewakili kelompoknya, (c) sebagai tempat pengambil alihan resiko bila terjadi tekanan terhadap kelompoknya dan (d) sebagai tempat untuk meletakkan kekuasaan.⁴²

⁴² Rivai, Veithzal. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, 2

B. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan mempunyai arti yang berbeda pada orang-orang yang berbeda. Kata ini merupakan suatu kata yang diambil dari kamus umum dan dimasukkan ke dalam teknis sebuah disiplin ilmiah tanpa didefinisikan dengan tepat. Kepemimpinan pada dasarnya adalah sesuatu yang berkenaan dengan penggunaan pengaruh dan kekuasaan. Ketika menyangkut berbeda jenis kelompok, maka memerlukan model kepemimpinan yang berbeda. Disamping itu Kontribusi pribadi tidak bisa dipisahkan dengan mudah dari total kinerja kelompok. Hal tersebut menyiratkan bahwa setiap kelompok membutuhkan hubungan yang berbeda dimana pemimpin menggunakan kekuasaan dan pengaruh.⁴³

Kepemimpinan adalah suatu proses dimana individu mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan umum⁴⁴. Pengertian ini dipertajam oleh Dubrin bahwa kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk

⁴³ Fiedler. F.E. *A Theory Of Leadership Effectiveness*. McGraw-Hill Book. Co., . 1967, 375

⁴⁴ Northouse, P.G. *Leadership: Theory and Practice*, Third Edition. New Delhi: Response Book, 2003, 3

menanamkan keyakinan dan memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi⁴⁵. *“Leadership is defined broadly to include influence processes involving determination of the group’s or organization’s objectives, motivating task behavior in pursuit of these objectives, and influencing group maintenance and culture. The terms leader and manager are used interchangeably in this book”*. (Kepemimpinan didefinisikan secara luas sebagai proses-proses mempengaruhi, yang mempengaruhi interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa para pengikut, pilihan dari sasaran-sasaran bagi kelompok atau organisasi, pengorganisasian dari aktifitas-aktifitas tersebut untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, motivasi dari para pengikut untuk mencapai sasaran, pemeliharaan hubungan kerja sama dan teamwork, serta perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang yang berada di luar kelompok atau organisasi.⁴⁶

Menurut Ralph M. Stogdill, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan

⁴⁵ Dubrin, A. J. *Leadership: Research Findings, Practices, and Skills*, Third Edition. Boston: Houghton Mifflin Company, 2001, 3

⁴⁶ Yukl, G. *Kepemimpinan Dalam Organisasi (edisi Indonesia)*. Jakarta: Prentice-Hall Inc. 1999, 5

kelompok yang diorganisasi menuju kepada penentuan dan pencapaian tujuan. Sondang P. Siagian, kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari pada semua sumber-sumber, dan alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Mardjin Syam mengartikan kepemimpinan sebagai keseluruhan tindakan guna mempengaruhi serta mengingatkan orang, dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan, atau dengan definisi yang lebih lengkap dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah proses pemberian jalan yang mudah dari pada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kepemimpinan lembaga pendidikan pada abad kedua puluh satu diperlukan mengembangkan dan memelihara hubungan yang sehat dengan semua pemangku kepentingan, memastikan pengajaran yang efektif dan pembelajaran menjadi fokus konsentrasinya. Kapasitas kepemimpinan berbasis luas, membutuhkan partisipasi terampil pemangku kepentingan yang relevan, dan di mana ada kapasitas kepemimpinan yang tinggi, belajar dan instruksional kepemimpinan menjadi

tertanam dalam mozaik professional praktik kepemimpinan.⁴⁷

Dari aspek karakteristik dibedakan antara karakteristik pemimpin (*leader*) dengan karakteristik manajer. Luthans menegaskan bahwa karakteristik pemimpin di Abad XXI adalah: *Innovates* (menciptakan sesuatu yang baru); *An original* (asli dari pemimpin); *Develops* (mengembangkan); *Focuses on people* (terkonsentrasi pada manusia); *Inspires trust* (menghidupkan rasa percaya); *Longrange perspective* (memiliki prespektif jangka panjang); *Asks what and why* (ia menanyakan apa dan mengapa); *Eye on the horizon* (berpandangan sama pada sesamanya); *Originates* (memiliki keaslian); *Challenges the Status quo* (menentang kemapanan); *Own person* (mengakui tanggung jawab ada pada pemimpin); *Does the right thing* (mengerjakan yang benar). Kepemimpinan (*Leadership*) merupakan salah satu yang sangat vital bagi terlaksananya fungsi-fungsi manajemen.

⁴⁷ Naidoo, P. *Perceptions of teachers and school management teams of the leadership roles of public school principals*. South African Journal of Education, 39(2), 1–14. <https://doi.org/10.15700/saje.v39n2a1534>, 2019, 12

Pemimpin memiliki karakteristik selalu memiliki upaya untuk menciptakan hal yang baru (selalu berinovasi). Gagasan-gagasan yang dimiliki oleh pemimpin merupakan gagasan sendiri tidak meniru ataupun menjiplak. Pemimpin selalu berupaya untuk mengembangkan apa yang ia lakukan. Ia percaya pada bawahan, dan selalu menyalakan api kepercayaan pada anggota organisasi. Gagasannya memiliki prespektif jangka panjang. Ia bertanya pada bawahannya dengan pertanyaan apa dan mengapa?. Ia menentang *status quo*, ia tidak puas dengan apa yang ada. Ia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya, dan ia mengerjakan yang benar⁴⁸.

C. Fungsi dan Tugas Kepemimpinan

1. Fungsi Kepemimpinan

Kepemimpinan, kita tahu, punya peran penting dalam organisasi, dan itu karena ia memiliki fungsi-fungsi spesifik yang dijalankan. Secara istilah, fungsi bermakna kegunaan dari sesuatu hal. Dalam konteks organisasi, fungsi berhubungan erat dengan jabatan dan

⁴⁸ Luthans, Fred. *Organizational Behavior*, Ninth Edition. Singapore: McGrawHill International Editions, 2002. 576

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Karena organisasi berisi beberapa atau bahkan banyak orang dan masing-masing memiliki bidang dan spesifikasi kerjanya, maka dibutuhkan seseorang yang bertanggung jawab untuk mengatur dan menghubungkan kesemua bagian itu. Pada titik itulah fungsi kepemimpinan berlangsung. Fungsi kepemimpinan berkaitan erat dengan situasi sosial dalam organisasi masing-masing, karena di dalamnya terdapat banyak orang. Ini artinya pemimpin berada di dalam, bukan di luar situasi sosial. Seorang pemimpin mesti pandai berkomunikasi dengan anggotanya, supaya tercipta iklim kerja yang baik. Karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi kepemimpinan ialah gejala sosial, karena kerja-kerja organisasi menuntut interaksi antar individu.

Di bawah ini adalah beberapa pendapat mengenai fungsi kepemimpinan, di antaranya adalah: Fungsi kepemimpinan, dalam pandangan Rivai (2006: 53), ada dua dimensi: (a) berkaitan dengan taraf kemampuan dan kapasitas pemimpin mengarahkan tindakan sejumlah anggotanya; (b) berkenaan dengan

taraf dukungan dan kontribusi anggota ketika melakukan kerja-kerja yang utama dalam organisasi.

Agar efektifitas kerja organisasi berjalan maksimal, James A.F. Stoner (dalam Wahjosumidjo, 2005: 41) berpendapat bahwa seorang pemimpin paling tidak mesti punya dua fungsi pokok:

- a. *Task related* atau dapat disebut pula problem solving function. Fungsi ini terkait kemampuan pemimpin memecahkan masalah lewat saran, pendapat, atau pun sumbangan informasi yang strategis, taktis, dan tidak bertele-tele.
- b. *Group maintenance function* atau dapat disebut pula social function. Fungsi ini terkait peranan pemimpin dalam mengorganisir kerja organisasi sehingga dapat berjalan lancar. Atau pun juga dalam peran lain: menyetujui pertimbangan tertentu yang diusulkan anggota, melihat celah-celah kekosongan anggota dan lalu melengkapinya, menengahi perselisihan yang berlangsung dalam organ, hingga mendengar pendapat anggota ketika rapat dengan saksama dan bijak. Dua fungsi ini saling melengkapi satu sama lain, dan pemimpin bijak adalah ia yang

mampu menjalankan dua fungsi itu secara berimbang.

Ada lima fungsi yang utama dalam kepemimpinan, lanjut Rivai (2006: 53), yang mempengaruhi secara operasional kerja-kerja organisasi, yaitu:

- a. Fungsi *instruksi*, di mana ini sifatnya sepihak dan peran pemimpin relatif dominan. Sebab pemimpin dapat dikatakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka ia berwenang menginstruksikan soal apa, bagaimana, dan dengan cara apa perintah dilaksanakan. Efektifitas pemimpin dapat diukur dari cara ia Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Pengembangan Sekolah Dasar 9 mempengaruhi dan menggerakkan anggotanya melaksanakan perintah sesuai yang ia kehendaki.
- b. Fungsi *konsultasi*, di mana ini sifatnya dua arah, tidak sepihak, dan relasi antara pemimpin dan anggota relatif imbang. Dalam rangka mengambil keputusan, di fase awal, pemimpin seringkali butuh saran, masukan, dan

pertimbangan. Hal ini bisa ia dapat jika ia berkonsultasi dengan anggota yang dianggap punya informasi tertentu menyangkut keputusan yang akan diambil. Kemudian di fase selanjutnya, konsultasi dapat juga dilakukan ketika keputusan telah dibuat dan sedang dilaksanakan. Ini dilakukan dalam rangka mendapatkan umpan balik dari anggota untuk menilai apa-apa saja yang kurang demi perbaikan dan penyempurnaan ke depannya.

Fungsi *partisipasi*, di mana pemimpin berdaya upaya memacu peran serta anggotanya, baik dalam fase pengambilan keputusan atau pun ketika menjalankan proses keputusan itu. Pada titik ini, partisipasi tidaklah sama artinya dengan kebebasan untuk melakukan apa pun sekehendak hati, melainkan upaya yang dilakukan dengan terstruktur dan sistematis, melalui proses kerja sama yang solid antar anggota dengan masing-masingnya memahami apa tupoksi mereka secara baik dan benar. Adapun peran pemimpin mesti dibatasi sebagaimana layaknya seorang pemimpin yang

mengorganisir anggota, bukan sebagai pelaksana dari kerja-kerja itu.

Fungsi *delegasi*, di mana ini dilakukan lewat pelimpahan otoritas, entah dengan persetujuan atau tanpa persetujuan pimpinan, dalam rangka membuat keputusan. Delegasi, sama artinya dengan memberi kepercayaan pada orang, dan mereka yang ditunjuk untuk itu adalah orang-orang yang dipercaya oleh pemimpin. Karena itu, orang-orang yang didelegasikan mesti punya persepsi, aspirasi, dan prinsip yang sama dengan pemimpinnya.

Fungsi *pengendalian*, di mana ini merupakan kapasitas pemimpin untuk mengarahkan anggotanya pada kerja-kerja organisasi yang terstruktur dan sistematis. Kerja semacam itu diharapkan dapat membawa organisasi mencapai tujuan bersama yang dikehendaki. Untuk menjalankan fungsi pengendalian ini, setidaknya hal-hal yang dapat dilakukan ialah lewat pemberian bimbingan, arahan, koordinasi, hingga pengawasan yang intensif.

Jika kita meneliti ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Hadis, menurut Effendy (1986:267) akan kita temui beberapa ajaran tentang **fungsi** seorang pemimpin, antara lain sebagai:

- a. Teladan yang baik (uswatun hasanah)
- b. Pemersatu
- c. Pemuka
- d. Pelindung
- e. Pemberi nasehat
- f. Pemimpin sebagai pemberi arah (directing)
- g. Pemimpin sebagai penanggung jawab

D. Tugas Kepemimpinan

Istilah lain dari tugas ini adalah *leadership function*, dan ada dua garapan utama di dalamnya, meliputi penyelesaian pekerjaan sesuai tupoksi dan kesolidan sejumlah anggota yang dipimpin. *Task function* adalah sebutan untuk tugas menyangkut penyelesaian pekerjaan, dan *relationship function* menjadi istilah yang merujuk pada tugas terkait kesolidan anggota. Tugas terkait penyelesaian pekerjaan dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan

tim, dan dengan begitu, tim dapat mencapai tujuannya. Terkait tugas kesolidan anggota, ia dibutuhkan untuk memastikan kondisi bahwa hubungan antara orang-orang yang bekerja sama berjalan lancar dan nyaman.

Charles J. Keating (1986) berargumen, tugas kepemimpinan terkait kesolidan kelompok, meliputi:

1. Memulai (*initiating*), di mana ini berkaitan dengan peran pemimpin dalam mengarahkan anggota atau kelompok untuk memulai kerjanya sesuai tupoksi masing-masing. Ini dapat dilakukan dengan, misalnya, memantik diskusi dan melempar suatu masalah tertentu untuk dicari alternatif solusinya oleh anggota kelompok.
2. Mengatur (*regulating*), ini terkait peran pemimpin untuk mengarahkan kegiatan kelompok sesuai dengan bidang kerjanya.
3. Memberitahu (*informing*), berhubungan dengan peran pemimpin dalam berbagi. Tidak hanya itu, pemimpin juga dapat—jika diperlukan—meminta sejumlah data, informasi, fakta, dan pendapat pada anggotanya. Jika itu berjalan efektif dan berkesinambungan, organisasi akan

- memiliki sejumlah data dan informasi yang sangat kaya.
4. Mendukung (*supporting*), ini terkait peran pemimpin dalam mengikutsertakan anggotanya menyumbang ide, saran, pendapat, dan sejenisnya. Si pemimpin lantas menyaring dan menyempurnakan, yang kelak akan digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas bersama dalam organisasi. Tindakan ini akan berdampak sangat besar dan itu pula membuat anggota merasa dihargai eksistensinya dalam organisasi.
 5. Menilai (*evaluating*), berhubungan dengan tindakan yang dilakukan pemimpin untuk mengevaluasi sejumlah ide yang diusulkan anggota, atau pun dalam konteks lain, menilai metode kerja yang digunakan anggota dan menganalisis konsekuensi, kelebihan, dan kekurangannya.
 6. Menyimpulkan (*summarizing*), di mana ini terkait dengan tindakan pemimpin menyatukan, menyaring, dan menarik rumusan dari sejumlah ide dan gagasan yang telah disumbangkan anggota-anggotanya. Kelak, sang pemimpin

akan membuat kesimpulan dan itu dapat dipertimbangkan guna perbaikan dan strategi pengembangan organisasi ke depan.

Selain tugas-tugas seorang pemimpin terkait kesolidan kelompok yang diuraikan di atas itu, ada juga beberapa tugas kepemimpinan lainnya, sebagai berikut.

1. Mendorong (*encouraging*), ini menyangkut sikap sang pemimpin yang berusaha bersahabat dengan anggotanya, dan juga menjalin komunikasi yang hangat dengan mereka semua.
2. Mengungkapkan perasaan (*expressing feeling*), ini terkait tindakan pemimpin dalam mengungkapkan perasaan atas hasil kerja dan kesolidan kelompok. Perasaan ini bisa macam-macam bentuknya, semisal perasaan bangga, senang, puas, dan sejenisnya. Bahkan, pemimpin juga perlu menanggung bersama suka duka, kegagalan, dan kesulitan yang dialami anggotanya, dan itu akan makin mempererat rasa persaudaraan dalam organisasi.
3. Mendamaikan (*harmonizing*), ini menyangkut peran pemimpin sebagai penengah ketika terjadi

- perselisihan, pertengkaran, atau pun perbedaan pendapat yang emosional yang terjadi pada anggotanya, sehingga tidak menimbulkan perpecahan dalam tubuh organisasi.
4. Mengalah (*compromising*), ini terkait kapasitas pemimpin untuk, pada waktu-waktu tertentu, bersikap lunak dengan mengubah sedikit dan menyesuaikan argumen miliknya dengan argumen yang dikemukakan anggota-anggota yang dipimpinya.
 5. Memperlancar (*gatekeeping*), ini menyangkut kemampuan pemimpin untuk mendorong dan mengikutsertakan partisipasi semua anggota kelompok. Dengan semua yang ikut berpartisipasi, akan lebih banyak tenaga dan makin cepat pula pengerjaan sesuatu tertentu dalam organisasi.
 6. Menerapkan aturan main (*setting standards*), ini terkait kapasitas pemimpin untuk merancang dan membakukan prosedur, tata tertib, dan peraturan dalam organisasi.

Paling tidak ada empat tugas penting yang mesti dilakukan pemimpin, menurut Richard H. Hall (dalam Wahjosumijo, 2005: 42), antara lain:

1. Mendefinisikan misi dan peran organisasi, atau dalam istilah lain, (*involves the definition of the institutional organizational mission and role*). Ini tugas penting yang mesti disiapkan sejak awal, apalagi kita sekarang hidup dalam dunia yang makin dinamis dan segala sesuatu nyaris berubah dengan sangat cepat. Peran dan misi ini hanya bisa didefinisikan jika memahami betul apa ranah kerja dan tujuan utama organ. Karena itulah, pemimpin mesti memahami fungsi pokok kepemimpinannya, di mana ia berperan dalam proses perumusan peran dan misi itu, dan juga pemecahan masalah serta pembinaan kelompoknya.
2. Pengimplementasian tujuan organisasi, atau dalam istilah lain, *the institutional embodiment of purpose*. Pada titik ini, seorang pemimpin mesti merancang dan menciptakan aturan main yang berfungsi sebagai sarana atau pun metode dalam pencapaian tujuan. Apa yang ingin

dicapai oleh organisasi itu tentu akan sangat beragam, tergantung apa organisasinya dan untuk alasan apa ia ada. Dalam fungsi pengimplementasian ini, selain dituntut untuk paham apa tujuan pembentukan organisasi, pemimpin juga mesti menghayati sistem terbuka dalam organisasi. Sistem terbuka ini dapat disebut pula sebagai sistem sosial, di mana organisasi membutuhkan sejumlah orang untuk eksis, dan dengan begitu, tujuan organisasi hanya bisa dicapai oleh kesatuan kerja dari sejumlah orang itu. Kesatuan kerja ini kelak mengubah tenaga kerja manusia dan input-input lainnya dari alam dan lingkungan menjadi produk akhir yang dihasilkan, entah itu barang atau pun jasa. Produk akhir itu kemudian ditransfer kembali ke masyarakat sebagai konsumen. Barang-barang atau pelayanan adalah hasil akhir dari suatu proses transformasi sejumlah sumber. Produksi organisasi ini dihasilkan oleh interaksi langsung organisasi dengan lingkungan.

3. Mempertahankan kesatuan dan kesolidan organisasi, atau dengan kata lain, *to defend the organization's integration*. Di titik ini, pemimpin berusaha untuk menghindari masalah dan apa pun hal lain yang dapat merusak dan memecah belah kesatuan dan solidaritas anggotanya.
4. Representasi organisasi, di mana pada titik ini pemimpin adalah gambaran umum yang dilihat oleh khalayak luas terhadap organisasi. Dalam banyak hal, citra organisasi juga bergantung pada citra pemimpin, jika baik citranya maka baik pula citra organisasinya. Pemimpin juga perlu memahami beberapa asumsi pokok ini, antara lain:
 5. Tujuan organisasi dibentuk adalah demi memenuhi keperluan manusia, dan bukan sebaliknya, di mana eksistensi manusia adalah demi memenuhi keperluan organisasi.
 6. Ada saling ketergantungan antara manusia dan organisasi. Organisasi hanya dapat hidup jika di dalam itu terdapat interaksi manusia untuk menuangkan kerja, energi, gagasan, dan

pemikiran. Pun sebaliknya, manusia juga membutuhkan organisasi sebagai tempat menyalurkan kapasitas, pendapatan, karier, dan lain sebagainya.

7. Jika terdapat situasi dan kondisi yang tidak diharapkan dalam hubungan antara individu dan organisasi, akan ada satu di antaranya yang diabaikan. Ini akan mengakibatkan pada tindakan-tindakan yang eksploitatif, entah manusia yang dieksploitasi atau pun manusia yang justru mengeksploitasi organisasi. Dan bisa pula kedua-keduanya saling menegasi dan saling mengeksploitasi satu sama lain.
8. Jika situasi dan kondisi dalam hubungan manusia dan organisasi berjalan sebagaimana yang diharapkan, ini akan menghasilkan keuntungan bagi satu sama lain. Individu akan mendapatkan apa yang diinginkannya dari organisasi, dan sebaliknya, organisasi berjalan lancar dalam mencapai tujuan yang diinginkan karena kontribusi aktif dari individu.

Manajer juga harus menyadari bahwa kehidupan organisasi modern telah menjadi lebih

kompleks dan bahwa berbagai jenis spesialisasi dan pengelompokan telah muncul. Situasi ini membuat sulit untuk menjaga kesatuan organisasi. Karena itu, tanpa koordinasi dan kontrol yang tepat, organisasi akan terfragmentasi dan tidak terarah. Konsep organisasi saat ini sangat beragam baik dari segi struktur, peran, bentuk, dan pengaruh faktor lingkungan, dan karena itu, perlu prinsip interkoneksi untuk menentukan arah saling ketergantungan. Anggota dan unit satuan kerja saling bergantung satu sama lain untuk bekerja. Organisasi mengoordinasikan dan mengendalikan dengan dua cara: secara vertikal melalui wewenang dan aturan, dan secara horizontal lewat koordinasi ad hoc melalui rapat, kelompok kerja, dan aturan.

Pemimpin juga perlu mengatur manajemen konflik internal dalam organisasi, atau dengan kata lain, mengatur internal conflict order. Konflik tidak dapat dihindari dalam organisasi modern. Organisasi didefinisikan sebagai agregat yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki profil berbeda yang mencakup peraturan, tingkat peraturan, sistem komunikasi, dan sistem

insentif. Selain karakteristik khusus, organisasi memiliki berbagai fungsi, termasuk alat perubahan. Perlu juga dicatat bahwa organisasi adalah sistem terbuka yang membuka kemungkinan berbagai perspektif dalam penampilan suatu organisasi, dan ini bisa menjadi sumber konflik.

E. Syarat-Syarat Kepemimpinan

Fungsi kepemimpinan, menurut Hadari Nawawi (1985: 84–91), pada dasarnya dapat dijalankan jika memenuhi persyaratan berikut ini.

1. Mempunyai cukup baik kecerdasan atau intelegensi
2. Punya rasa percaya diri yang tinggi, rasa memiliki, dan juga dapat berkolaborasi dengan anggota lain dalam kelompok
3. Mudah bersosialisasi, ramah, dan pandai bergaul
4. Mesti penuh dengan kreativitas dan inisiatif serta memiliki dorongan untuk berkembang menjadi lebih baik
5. Seorang penyelenggara yang punya kewibawaan besar dan pengaruh yang tinggi

6. Orang yang memiliki pengalaman atau keterampilan di bidang yang relevan.
7. Mereka suka untuk membantu dan mengarahkan, dan tahu bagaimana cara menerapkan aturan secara konsisten dan bijak.
8. Mempunyai emosi yang stabil dan sabar dalam berbagai hal
9. Mempunyai tingkat loyalitas yang tinggi
10. Seseorang yang nekat membuat keputusan berani, namun juga punya rasa tanggung jawab
11. Memiliki kejujuran yang tinggi, tidak angkuh, sederhana dan bisa diandalkan
12. Senantiasa bersikap adil dan bijak dalam segala hal
13. Memiliki kedisiplinan tinggi yang tak dapat ditawar
14. Punya wawasan dan sudut pandang yang luas
15. Memiliki fisik dan psikis yang sehat

Ada beberapa syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin, menurut Heidjrachman dan Suad Husnan (2000: 222-223), antara lain:

1. Kehendak dalam mengemban tanggung jawab

2. Kesanggupan dalam mengasah dan mempertajam kapasitas
3. Kesanggupan dalam bertindak secara objektif
4. Kesanggupan dalam memprioritaskan sesuatu
5. Kesanggupan dalam berinteraksi dengan orang lain

Persyaratan kepemimpinan menurut Fadjar (1993: 26), diperlukan antara lain:

1. Mempunyai sikap dan akhlak yang baik
2. Mempunyai tingkat intelegensia yang mumpuni
3. Mempunyai emosional yang matang danimbang
4. Mempunyai kesehatan fisik dan psikis yang baik serta penampilan jasmaniah yang memadai

Kemudian, syarat-syarat kepemimpinan, menurut Effendi (1986: 227), yang patut dimiliki seorang pemimpin ada tiga: memiliki fisik dan psikis yang sehat, kondisi mental yang stabil, dan daya intelektual yang memadai. Firman Allah dalam QS. An-Nur: 55 dan An-Nahl: 97, di dalamnya menjelaskan bahwa hal lain yang perlu dimiliki seorang pemimpin di samping tiga syarat

itu adalah iman dan amal saleh. Dengan ditambah dua syarat itu, keseluruhannya berjumlah lima, dan akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini.

1. Beriman

Iman adalah landasan hidup, landasan semua perilaku manusia, di mana pun dia berada dan apa pun pekerjaan yang dia lakukan. Orang yang beriman akan bekerja dengan sungguh-sungguh dan melakukan perbuatan baik tanpa pamrih, semua yang dia lakukan adalah untuk menyenangkan Allah. Iman adalah dasar keyakinan dalam hidup, dan itu adalah motivasi kita untuk berbuat baik setiap saat, karena berbuat baik adalah tindakan iman.

2. Keunggulan Mental

Mental seorang muslim mewujudkan sikap hidup yang terpuji, yang harus menjadi pengukur sampai di mana dia boleh berbuat dan dapat bertindak. Mental seorang muslim jika kita perinci akan terwujud dalam sifat yang berikut:

- a) Takwa;
- b) Amanat;
- c) Sungguh-sungguh;
- d) Istiqamah;
- e) Sabar;
- f) Berani;
- g) Pengasih serta Penyayang;
- h) Adil (adalah);
- i) Bertanggung jawab (mas'uliyah);

3. **Keunggulan Fisik**

Rasulullah memberikan contoh, seperti sewaktu pembangunan masjid pertama, masjid Quba, beliau ikut mendahului mengangkat batu sekalipun umur beliau sudah lebih setengah abad. Beliau selalu memelihara kesehatannya. Dengan demikian, beliau kuat menghadapi perjalanan yang jauh dan sukar sewaktu terjadi peperangan. Betapa pentingnya keunggulan fisik ini telah ditunjukkan Allah di dalam Al-Qur'an sewaktu pengangkatan Thalut. Makin rendah tingkat kepemimpinan seorang pemimpin atau manajer, makin perlu ia

mempunyai keunggulan fisik, karena banyak tugasnya di lapangan (*on the field*), jika dibandingkan dengan yang lebih tinggi, karena makin tinggi tingkat kepemimpinannya, makin banyak pekerjaan di atas meja atau di ruang sidang.

4. **Keunggulan Intelektual**

Seorang pimpinan harus memiliki keunggulan intelektual atas orang-orang yang dipimpinnya. Keunggulannya terletak pada kekuatan kecerdasan dan pengetahuan. Seorang pemimpin atau manajer yang baik adalah seseorang yang dapat membuat keputusan, alasan, dan analisis yang baik tanpa seorang penasihat atau asisten. Dia harus selalu menanggapi argumen ilmiah, logis dan masuk akal di setiap pertemuan, seminar atau diskusi. Jika Anda meminta pendapat Anda, Anda harus memunculkan ide atau gagasan baru yang sehat dan ilmiah. Keunggulan intelektual ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

a) Ilmu

- b) Keahlian
- c) Produktif
- d) Efisiensi
- e) Cerdik (fathonah)
- f) Qona'ah

5. **Beramal Saleh**

Setiap pimpinan adalah seorang pemelihara, di mana ia selalu mendorong orang lain untuk berbuat baik, memerintahkan mereka untuk berbuat baik, dan mencegah kejahatan. Untuk itu, pertama-tama ia harus memberi contoh bagi diri mereka untuk selalu melakukan ini, dan selalu melakukan halhal yang saleh. Dosa besar adalah memerintahkan orang untuk berbuat baik dan tidak melakukan kejahatan, tetapi ia melakukannya sendiri dan malah tidak mampu menghindari halhal yang dilarang dan dicela.

F. Peran dan Tanggung Jawab Pemimpin

1. Peranan Kepemimpinan

Menolong anggota tim belajar soal bagaimana membuat keputusan dan melakukan kerja yang efektif., menurut Wiraputra (1973: 3-4), adalah peran utama seorang pemimpin. Seorang pemimpin, ketika menjalankan peran itu, dapat menggunakan halhal berikut ini sebagai bantuan, antara lain:

- a) Pemimpin memberi bantuan untuk membentuk iklim kerja yang efektif
- b) Pemimpin memberi bantuan pada anggota-anggota untuk mengorganisir mereka agar sesuai dengan visi misi
- c) Pemimpin memberi bantuan pada kelompok kerja untuk menentukan metode dan cara kerja
- d) Pemimpin ikut andil dan bertanggungjawab dalam proses pengambilan keputusan bersama dengan kelompok
- e) Pemimpin juga memberikan keleluasaan baik bagi orang perorangan atau pun

kelompok dalam memanfaatkan pengalaman sebagai bahan pembelajaran.

Menurut Stephen P. Robbins (2003: 476-478), peran kepemimpinan adalah:

- 1) Sebagai fasilitator bagi unit-unit dari luar
- 2) Sebagai elemen yang berperan mengatasi problem
- 3) Sebagai pengatur, penengah, dan pemutus masalah
- 4) Sebagai penuntun bagi anggota-anggotanya

Selain peran-peran di atas itu, pemimpin juga berperan memaparkan peranan dan ambisi organisasi ke depannya. Ia juga dapat menjadi guru yang memberi motivasi dan dorongan, membentuk iklim kerja yang membawa suasana kebahagiaan, dan apa pun yang perlu dilakukan untuk mendorong anggotanya dapat melakukan perbaikan kinerjanya. Seorang pemimpin juga mesti menjadi *agent of change* ketika dibutuhkan perubahan dalam organisasi, atau pun ketika keadaan menuntut untuk

dilakukan perubahan. Dalam konteks ini, ia diharuskan menjadi ahli yang memberi bantuan pada anggotanya untuk memulai, menentukan putusan, dan menjalankan sebuah perubahan yang diperlukan.

Dalam mengisi perannya sebagai *agent of change*, ia tidak boleh bersikap pasif dan tertutup pada segala keadaan yang berubah yang sedang terjadi baik dalam internal maupun eksternal organisasi. Ia harus bersikap sebaliknya. Ketika mendapatkan informasi yang berguna bagi organisasi, itu tidak mesti dikabari pada semua anggota. Si pemimpin mesti menyeleksinya: apakah itu perlu atau tidak untuk disampaikan pada anggota dan seberapa signifikan mereka membutuhkan informasi itu. Tentu, informasi itu kelak berguna di masa depan dalam proses penentuan keputusan.

2. Tanggung Jawab Pemimpin

Tanggung jawab pemimpin menurut Oteng Sutisna (1989: 328- 334), adalah mengelola organisasi dengan efektif dan efisien. Mengambil keputusan-keputusan yang efektif, bertanggung

jawab dalam proses kelompok, langkah-langkah dalam partisipasi, dan sebab-sebab mengapa kelompok kadang-kadang berfungsi buruk. Kewajiban kepemimpinan yang disebut terakhir ini menunjuk kepada adanya hubungan erat antara dinamika kelompok dengan kepemimpinan

G. Kepemimpinan di Perguruan Tinggi

Upaya pencapaian tujuan pada perguruan tinggi secara maksimal sangat ditentukan oleh kepemimpinan di organisasi itu. Begitu juga dalam organisasi pendidikan tinggi, peran kepemimpinan sangat menentukan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Pemimpin harus mampu menggerakkan seluruh komponen organisasi untuk bekerja dan bekerja sama guna mencapai tujuan. Pimpinan pada tataran sekolah dasar dan sekolah menengah juga berbeda dengan pimpinan pada perguruan tinggi.

Sebagai organisasi pendidikan, kepemimpinan pada perguruan tinggi berbeda dengan pemimpin organisasi bentuk lainnya. Memimpin sebuah perusahaan bisnis berbeda dengan memimpin perguruan tinggi. Begitu juga memimpin sebuah daerah

seperti camat, bupati atau gubernur juga akan berbeda dengan memimpin sebuah sekolah tinggi atau universitas. Seorang rektor, ketua atau direktur politeknik/ akademi memiliki gaya yang berbeda dengan seorang camat ataupun seorang direktur perusahaan bisnis.

Peran utama seorang pemimpin adalah mengambil keputusan. Kesalahan dalam mengambil keputusan/ kebijakan akan menyebabkan kegagalan organisasi untuk mencapai tujuan secara optimal. Oleh karena itu perlu kecakapan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh data dan informasi yang cukup tentang keputusan yang diambil. Organisasi sebaiknya memiliki sistem informasi yang handal agar pengambilan keputusan oleh pimpinan bisa dilakukan dengan baik. Karena pemimpin merupakan ujung tombak yang menentukan keberhasilan suatu organisasi. Memang, peran dari pihak-pihak di bawahnya tidak luput dari perhitungan. Namun, komando dari pemimpin lah yang akan menuntun arah dan tujuan organisasi. Begitu pula yang terjadi dalam pendidikan tinggi. Peran rektor atau

direktur seakan menjadi kunci dalam keberhasilan suatu perguruan tinggi, sehingga apa yang dihasilkan, baik itu lulusan, riset, dan inovasi dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan nusa dan bangsa. Kendati demikian, dari 4.741 perguruan tinggi di Indonesia, tidak semuanya memiliki seorang pemimpin atau *leader* yang kuat. Di sisi lain, permasalahan utama yang dihadapi pendidikan tinggi saat ini, meliputi akses, kualitas, pemerataan, dan keadilan. Krisis kepemimpinan pun tak jarang justru kian membuat persoalan semakin kompleks karena masalah internal perguruan tinggi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti, Ali Ghufron Mukti menjelaskan, dalam dunia akademik, peran pemimpin perguruan tinggi perlu dilihat dari dua sudut pandang. Jika dilihat dari sudut pandang esensi pekerjaan, maka tugas seorang rektor atau direktur tidak bisa dikatakan sebagai tugas tambahan. Pasalnya, mereka harus memiliki komitmen penuh, termasuk berpikir dan bekerja keras bagi perguruan tinggi yang dipimpin. Namun dilihat dari sudut administrasi, Dirjen Ghufron tak menampik bahwa para rektor sejatinya merupakan dosen yang

memiliki tugas pokok untuk menjalankan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.⁴⁹ Sebagai dosen mungkin dalam satu hari bekerja selama delapan jam, tetapi ketika menjadi rektor minimal bekerja sampai 12 jam dalam sehari. Bahkan sudah di rumah juga harus siap dengan pekerjaan. Artinya secara esensi memang bukan tugas tambahan. Tetapi karena menyangkut tunjangan dan insentif, seperti jika seorang pimpinan perguruan tinggi adalah profesor, dia akan kehilangan tunjangan kehormatan guru besar. Sehingga kesan saya, dari sisi administrasi Kemendikbud-RK menyebut sebagai tugas tambahan karena tugas pokoknya sebagai guru besar.”

Seorang rektor atau direktur di suatu perguruan tinggi, lanjut Dirjen Ghufron, harus mampu memobilisasi dan menggerakkan gerbong universitas yang dipimpinnya ke sebuah titik yang menjadi tujuan. Oleh sebab itu, wajib bagi pemimpin untuk mengetahui visi, misi, serta program-program yang akan dijalankan. Tak hanya itu, pemimpin juga patut memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni untuk

⁴⁹<https://ltdikti13.kemdikbud.go.id/2019/05/23/pola-kepemimpinan-ideal-untuk-pendidikan-tinggi-yang-berkualitas/>

menyampaikan ide-ide dan gagasannya, baik kepada seluruh sivitas akademika maupun di *stakeholder* di luar kampus. “Seorang pemimpin adalah panutan, apa yang diucapkan adalah apa yang dikerjakannya. Mereka harus mampu meramalkan minimal 10 tahun apa yang akan terjadi, dan dia mengerti posisinya sudah berada di mana, lalu akan dibawa ke mana. Tak hanya itu, prediksinya pun harus akurat sehingga dari pandangan tersebut dia dapat memutuskan strategi yang tepat dalam memobilisasi juga mengelola sumber daya yang dimiliki,” ucapnya.

Sehingga sebagai elemen penting yang mengelola berjalannya aktivitas inti dalam perguruan tinggi, Rektor mesti senantiasa sigap dan mampu membaca dan menganalisis tiap fenomena sosial yang berubah dan sedang dihadapi masyarakat. Dalam lingkup internal, seorang rektor diharuskan punya kapasitas menuntun dan memberi arahan pada jajarannya. Ini dapat dikatakan salah satu kecakapan yang harus dimiliki, di mana ia pula secara bersamaan mengorganisir anggotanya sesuai dengan prosedur kerja yang sudah ditetapkan, dan ia mesti siap untuk memimpin sejumlah orang yang memiliki perbedaan

latar belakang dan pengalaman. Sehingga semua itu kelak dapat diharmoniskan ke dalam kesatuan kerja yang punya visi misi bersama. Seringkali kepemimpinan di perguruan tinggi disinyalir sebagai bagian integral dari pelaksanaan transformasi, dan memang itulah keadaannya. Sebab kepemimpinan sangat dapat membawa pengaruh pada semua fungsi organisasi, dan ia mencakup suatu proses kompleks yang berpengaruh pada tujuan di perguruan tinggi, sehingga terlibat dan bertanggung jawab terhadap masalah pengembangan sumber daya manusia. Pemimpin perguruan tinggi akan berhasil jika mereka memahami bahwa perguruan tinggi ada sebagai organisasi yang kompleks dan unik. Ia dapat memainkan peran sebagai pemimpin sebagai orang yang bertanggung jawab menjalankan organisasinya.

Konsep kepemimpinan telah ditelaah dalam banyak macam cara, tergantung pada pola pikir dan pilihan metodologis yang akan diambil. Fakta bahwa penelitian kepemimpinan hanya membahas atau menghadapi aspek-aspek sempit tanpa saling terkait, seperti pengaruh bawahan atau karakteristik dan perilaku individu yang diteliti, sebenarnya merupakan

rangkaian dalam bidang kepemimpinan. Dalam posisinya mengemban jabatan pemimpin pendidikan, rektor jika ditelaah dari status dan metode pengangkatan dapat digolongkan sebagai pemimpin yang resmi (*formal leader*). Untuk menelaah keefektifannya sebagai pemimpin, dapat dilihat dari kapasitasnya dalam meraih suatu pencapaian besar yang berperan dalam pengembangan perguruan tinggi, dan wujudnya bisa macam-macam, entah lewat program internal, eksternal, dan sebagainya. Penting pula menelaah kapasitasnya dalam menjalani tupoksi jabatan yang ia emban, apakah seperti seharusnya atau justru sebaliknya.

Jika ditelaah secara saksama, peran dan tanggung jawab rektor benar-benar luas cakupannya dan beban yang ditanggung tidaklah ringan. Ia mesti menanggung kewajiban untuk memperlancar aktivitas belajar mengajar pada sekolahnya. Seluruh peran dan kewajiban itu, menurut Indrafacrudin (1984), digolongkan atas dua bidang: administrasi dan supervisi. Sedangkan menurut Robbin (1984) serta Wagner dan Hollenbeck (1992), ada beberapa fungsi manajemen yang dijalankan rektor dalam memimpin

institusi pendidikannya, meliputi kerja-kerja: merencana-kan, mengorganisir, melaksanakan, mengoordinir, mengawasi, dan mengevaluasi. Perlu komunikasi yang intens dan solidaritas antara pemimpin dan jajarannya dalam menjalani tugas pokok manajemen itu.

Berdasar pemaparan di atas itu, kita dapat melihat bahwa rektor berperan besar dan sekaligus menduduki posisi sentral dalam kerja pengorganisasian, dan ini juga ditegaskan Davies (1987), bahwa "*A school principal occupies a key position in the schooling system.*" Seirama dengan itu, Dow dan Oakley (1992) juga berpendapat bahwa "*Principal leadership is an essential ingredient in creating and maintaining an effective school.*" Maka itulah, memiliki kapasitas manajerial yang mumpuni adalah syarat wajib yang mesti dipenuhi kepala sekolah, sehingga ia dapat menjalankan pengelolaan institusi secara terstruktur dan sistematis dan memiliki acuan visi mental terkait hari esok. Sebagaimana ditekankan Caldwell dan Spinks (1993), bahwa "*A vision as a mental picture of a preferred future for the school.*" Sebagai seorang yang memimpin suatu universitas, Rektor punya tugas dan

tanggung sebagai kepemimpinan negarawan, kepemimpinan pendidikan, kepemimpinan administrasi, kepemimpinan pengawasan, dan kepemimpinan tim (Sergiovanni, 1987). Blumberg (1980), di sisi lain, menegaskan bahwa kewajiban dan tanggung seorang pemimpin dalam perguruan tinggi sangat terkait dengan kapasitas mengatur dan memimpin institusi pendidikan.

H. Peran Pemimpin Perguruan Tinggi dalam Pencegahan Gerakan Radikalisme

Perguruan Tinggi adalah lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi lembaga yang melahirkan para pemikir, peneliti, seorang yang ahli dalam bidang ilmunya, menguasai IPTEK, akan tetapi juga menjadi manusia yang berpandangan dan berwawasan luas, demokratis, mampu memecahkan permasalahan dan dapat mengikuti perkembangan jaman. Akan tetapi pada sisi lain, Kampus juga menjadi lingkungan yang menjanjikan bagi pengusung paham radikal. Mereka membidik para mahasiswa yang secara psikologis masih dalam proses pencarian jati diri.

Dalam banyak kasus, pegiat paham radikal membidik mahasiswa yang “polos”, artinya yang tidak

memiliki latar belakang keagamaan kuat. Kepolosan mahasiswa ini dimanfaatkan oleh pengusung paham radikal dengan memberikan doktrinasi keagamaan yang monolitik, kaku, dan jauh dari kontekstualisasi. Pada proses inilah radikalisme ditanamkan dan disebarluaskan melalui sistem kaderisasi yang ketat dan cenderung tertutup. Berangkat dari gambaran proses kaderisasi yang dilakukan oleh kelompok radikal keagamaan yang membidik mahasiswa “polos” sebagai generasi penerusnya dan dilakukan tertutup, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Pertama, mahasiswa yang tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kuat, justru merekalah yang memiliki semangat belajar keagamaan yang cukup tinggi. Ironisnya, semangat tersebut justru ditangkap oleh kelompok radikal, sehingga mahasiswa mudah terdoktrinasi dan terjebak dalam ajaran radikal.
2. Kedua, pola tertutup dalam kaderisasi paham radikal menjadi titik penting proses doktrinasi paham radikal itu sendiri, dimana semakin eksklusif suatu perkaderan maka radikalisasi semakin tidak terbendung.

Berdasarkan uraian di atas, maka, upaya yang efektif untuk mencegah kampus dari radikalisasi adalah dengan melakukan strategi yang berlawanan dari dua kesimpulan penting di atas. Pertama, kampus harus memberikan fasilitas belajar keagamaan yang proporsional kepada mahasiswa, terutama untuk menampung mereka yang sesungguhnya memiliki semangat belajar agama cukup tinggi, sekalipun tidak memiliki latar belakang keagamaan yang kental. Sehingga mereka tidak belajar agama kepada kelompok radikal dan eksklusif yang berbahaya. Kedua, kampus secara berkala harus mengupayakan penyebaran ajaran keagamaan dengan suasana terbuka dan menekankan moderatisme. Selain mampu membendung radikalisasi dan mencegah bibit teroris, kedua upaya itu bisa menjadi strategi untuk membangun moralitas mahasiswa yang seimbang dengan keunggulannya secara akademik.

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam), Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Karakteristik ajaran Islam adalah *tawasuth* (moderat). Makna

moderat sendiri adalah tidak ekstrem kiri dan tidak pula ekstrem kanan. Dalil dari sikap moderat telah tercantum di Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 143 dan juga dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa "Sebaik-baik perkara adalah yang paling tengah".⁵⁰ Agama membawa ajaran yang bersifat vertikal ataupun horizontal. Keduanya saling berhubungan dan memberikan pengaruh. Kesadaran teologis (vertikal) harus dimanifestasikan dalam dataran perilaku terhadap sesama makhluk (aspek horizontal) dan sebaliknya perilaku keagamaan horizontal harus memiliki roh teologis yang vertikal. Di sinilah peran pendidikan menjadi sangat penting. Di negara kita, ada tiga lembaga pendidikan, yaitu formal, nonformal, dan informal menjadi penting dalam membentuk mahasiswa agar terbiasa dengan sikap dan perilaku beragama moderat.

Beberapa argumen di antaranya, pertama, lembaga pendidikan formal menjadi sarana tepat dalam

⁵⁰

<https://www.nu.or.id/opini/moderatisme-dan-ekstremisme-dalam-agama-IvozI>

melaksanakan kegiatan moderasi beragama karena melalui pendidikan formal terjadi ruang pembelajaran yang terstruktur, sistemis, dan mudah dievaluasi. Kedua, pembelajaran moderasi beragama di lembaga nonformal. Pembelajaran moderasi di lembaga nonformal itu efektif dalam pengembangan wawasan kebangsaan mengingat lembaga pendidikan nonformal dibangun di atas kesadaran masyarakat dan bercorak doktriner. Ketiga, pelaksanaan pendidikan moderasi beragama di lembaga pendidikan informal juga tidak kalah strategisnya. Hal itu mengingat bahwa lembaga pendidikan informal yang menyatu di lingkungan masyarakat dapat efektif membendung paham keagamaan radikal yang mudah diakses dan dikonsumsi masyarakat. Ketiga jenis pendidikan tersebut memberikan bukti bahwa moderatisme beragama sudah waktunya untuk terus digalakkan dan ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya bagi seluruh lapisan peserta didik. Hal itu karena bangsa yang kuat ialah bangsa yang menjadikan perbedaan warganya sebagai sarana untuk maju dan berkembang kuat. Beragama secara moderat ialah cara terbaik bagi seluruh anak bangsa sehingga agama betul-betul menjadi sarana untuk

kemajuan, bukan menjadi racun bagi kehancuran.⁵¹

⁵¹ <https://mediaindonesia.com/opini/525295/moderatisme-beragama>

BAB III

MODERASI BERAGAMA PADA PERGURUAN TINGGI

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan agama. Salah satu prinsip utama yang dianut bangsa ini adalah "*Bhinneka Tunggal Ika*" atau "berbeda-beda tetapi tetap satu". Dalam konteks keberagaman, moderasi beragama memiliki peran penting untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Moderasi beragama tercermin dalam komitmen kebangsaan yang menjunjung keberagaman, toleransi yang menghargai perbedaan keyakinan, penolakan terhadap segala bentuk kekerasan atas nama agama, serta penerimaan dan akomodasi terhadap kekayaan budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat.

Dari berbagai macam keberagaman yang dimiliki negara Indonesia, keberagaman agama menjadi yang terkuat dalam membentuk radikalisme di Indonesia. Munculnya kelompok-kelompok ekstrem yang kian hari semakin mengembang sayapnya difaktori berbagai hal seperti sensitifitas kehidupan beragama, masuknya aliran kelompok ekstrem dari luar negeri, bahkan permasalahan

politik dan pemerintahan pun turut mewarnai. Maka ditengah hiruk-pikuk permasalahan radikalisme ini, muncul sebuah istilah yang disebut “Moderasi beragama”.

Moderasi beragama biasa dipahami sebagai sikap tengah dalam memahami ajaran agama. Dalam Islam, konsep moderasi ini sering dipadankan dengan istilah Islam wasathiyah. Konsep Islam wasathiyah secara umum juga dijadikan dasar dalam memahami prinsip-prinsip moderasi dalam beragama, terutama dalam perspektif keislaman. Moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, agar terhindar dari perilaku ekstrem atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, karena agama dalam dirinya sudah mengandung prinsip moderasi, yaitu keadilan dan keseimbangan. Bukan agama jika ia mengajarkan perusakan di muka bumi, kezaliman, dan angkara murka. Agama tidak perlu dimoderasi lagi. Namun, cara seseorang beragama harus selalu didorong ke jalan tengah, harus senantiasa dimoderasi, karena ia bisa berubah menjadi ekstrem, tidak adil, bahkan berlebih-lebihan.

Memang, dalam praktiknya, sebagai manusia dengan pengetahuan terbatas, seseorang sangat mungkin

terperosok dalam bentuk pemahaman yang ekstrem dan berlebih-lebihan saat mempelajari ajaran agama. Kini, berkat bantuan teknologi komunikasi, ajaran agama yang berlebih-lebihan itu pun kian mudah tersebar luas, dan lalu berdampak pada rusaknya tatanan sosial kehidupan bersama. Karenanya, moderasi beragama tepat menjadi obat penawar bagi munculnya ekstremitas dalam mempraktikkan ajaran agama.

B. Konsep Moderasi beragama

Secara konseptual, moderasi beragama dibangun dari kata moderasi. Kata moderasi sendiri diadopsi dari bahasa Inggris moderation (Oxford, 2000, 820) yang artinya sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan, dan tidak memihak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2005, 751) kata ‘moderasi’ diambil dari kata moderat yang berarti mengacu kepada makna perilaku atau perbuatan yang wajar dan tidak menyimpang, berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah, pandangannya cukup, dan mau mempertimbangkan pandangan pihak lain. Adalah suatu kepastian bahwa setiap agama di dunia ini memandang benar seluruh ajarannya. Pun setiap agama diam-diam memandang rendah agama

lain. Sikap itu ada dan nyata dalam setiap agama, diakui atau tidak, suka atau tidak. Lalu, bagaimana kita memahami 'moderatisme beragama' sebagai suatu upaya atau kampanye yang akhir-akhir ini getol dilakukan? Apakah mungkin orang yang beragama dengan kuat berperilaku moderat dalam kesehariannya? Adakah suatu hal yang naif bagi para agamawan untuk mengajak umatnya bertindak moderat?⁵²

Kata moderat dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-wasathiyah* sebagaimana terekam dari QS.al-Baqarah [2]: 143. Kata *al-Wasath* bermakana terbaik dan paling sempurna. Dalam hadis yang juga disebutkan bahwa sebaik-baik persoalan adalah yang berada di tengah-tengah. Dalam melihat dan menyelesaikan satu persoalan, Islam moderat mencoba melakukan pendekatan kompromi dan berada di tengah tengah, dalam menyikapi sebuah perbedaan, baik perbedaan agama ataupun mazhab, Islam moderat mengedepankan sikap toleransi, saling menghargai, dengan tetap meyakini kebenaran keyakinan masing-masing agama dan mazhab, sehingga semua dapat

⁵²

menerima keputusan dengan kepala dingin, tanpa harus terlibat dalam aksi yang anarkis⁵³.

Sedangkan Kata “moderasi” berasal dari bahasa latin “*moderatio*” yang memiliki arti ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moderasi dimaknai dengan dua pengertian yaitu pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam artian *average* (rata-rata), *core* (inti), standart (baku), atau *non-aligned* (tidak berpihak). Dari beberapa kata yang disebutkan, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan moral, watak, baik ketika memperlakukan orang lain secara individu ataupun berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa arab, moderasi dikenal dengan kata *wasath* atau *wasathiyah*, yang memiliki padanan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Antonim dari kata wasath adalah *tatharruf* (berlebihan), yang dalam bahasa Inggris disebut dengan kata *extreme*, *radical*, dan *excessive*.⁵⁴

⁵³ Darlis. *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*. (2017). Rausyan Fikr, Vol.13 No. 2 Desember, 225-255.

⁵⁴ Tim Balitbang Kemenag RI, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 16.

Moderasi adalah jalan tengah. Dalam sejumlah forum diskusi kerap terdapat moderator orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapa pun atau pendapat mana pun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti “sesuatu yang terbaik”. Sesuatu yang ada di tengah biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir.⁵⁵ Moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrem dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkannya disebut moderat.

Orang moderat harus berada di tengah, berdiri di antara kedua kutub ekstrem itu. Ia tidak berlebihan dalam beragama, tapi juga tidak berlebihan menyepelekan agama. Dia tidak ekstrem mengagungkan teks-teks keagamaan tanpa menghiraukan akal/ nalar, juga tidak berlebihan mendewakan akal sehingga mengabaikan teks. Pendek

⁵⁵ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragam*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Gedung Kementerian Agama RI Jl.MH. Thamrin No.6 Lt. 2 Jakarta Pusat, 2019, 1

kata, moderasi beragama bertujuan untuk menengahi serta mengajak kedua kutub ekstrem dalam beragama untuk bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia.

Wasathiyah atau moderasi beragama sejatinya adalah esensi dan substansi dari ajaran agama yang sama sekali tidak berlebihan, baik dalam cara pandang atau bersikap. Prinsip moderasi beragama (*wasathiyah*) adalah sikap dan cara pandang yang penuh dengan nilai-nilai keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*). Dengan konsep demikian, dapat dipahami bahwa seseorang dalam beragama tidak boleh ekstrim pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Dengan demikian moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah di tengah keberagaman agama di Indonesia.

Moderasi merupakan budaya Nusantara yang berjalan seiring, dan tidak saling menegasikan antara agama dan kearifan lokal (*local wisdom*). Tidak saling mempertentangkan namun mencari penyelesaian dengan toleran. Dalam konteks beragama, memahami teks agama saat ini terjadi kecenderungan terpolarisasinya pemeluk agama dalam dua kutub ekstrem. Satu kutub terlalu mendewakan teks tanpa menghiraukan sama sekali

kemampuan akal/ nalar. Teks Kitab Suci dipahami lalu kemudian diamalkan tanpa memahami konteks. Beberapa kalangan menyebut kutub ini sebagai golongan *konservatif*. Kutub ekstrem yang lain, sebaliknya, yang sering disebut kelompok *liberal*, terlalu mendewakan akal pikiran sehingga mengabaikan teks itu sendiri.

Jadi terlalu liberal dalam memahami nilai-nilai ajaran agama juga sama ekstremnya. Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman (*inklusivisme*). Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dengan asas kemanusiaan. Meyakini agama Islam yang paling benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan anatar agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah SAW.⁵⁶

Moderasi harus dipahami ditumbuh kembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, dan pilihan politiknya mau

⁵⁶ Ibid

saling mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka. Untuk mewujudkan moderasi tentu harus dihindari sikap inklusif. Menurut Shihab bahwa konsep Islam inklusif adalah tidak hanya sebatas pengakuan akan kemajemukan masyarakat, tetapi juga harus diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif terhadap kenyataan tersebut. Sikap *inklusiv-isme* yang dipahami dalam pemikiran Islam adalah memberikan ruang bagi keragaman pemikiran, pemahaman dan persepsi ke-Islaman. Dalam pemahaman ini, kebenaran tidak hanya terdapat dalam satu kelompok saja, melainkan juga ada pada kelompok yang lain, termasuk kelompok agama sekalipun. Pemahaman ini berangkat dari sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama membawa ajaran keselamatan. Perbedaan dari satu agama yang dibawah seorang nabi dari generasi ke generasi hanyalah syariat saja.⁵⁷

Jadi jelas bahwa moderasi beragama sangat erat terkait dengan menjaga kebersamaan dengan memiliki sikap ‘tenggang rasa’, sebuah warisan leluhur yang mengajarkan kita untuk saling memahami satu sama lain

⁵⁷ Shihab, A. *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan. . 1999.43

yang berbeda dengan kita. Seruan untuk selalu menggaungkan moderasi, mengambil jalan tengah, melalui perkataan dan tindakan bukan hanya menjadi kepedulian para pelayan publik seperti penyuluh agama, atau warga Kementerian agama namun seluruh warga negara Indonesia saja dan seluruh umat manusia, sehingga tidak sampai menimbulkan peristiwa sebagai penembakan di masjid Selandia Baru yang menewaskan 50 jamaah salat jum'at. Berbagai konflik dan ketegangan antar umat manusia dalam keragaman agama, suku, faham dan sebagainya telah memunculkan ketetapan internasional lewat Perserikatan Bangsa Bangsa yang menetapkan tahun 2019 ini sebagai "Tahun Moderasi Internasional" (*The International Year of Moderation*).

Penetapan ini jelas sangat relevan dengan komitmen Kementerian Agama untuk terus menggaungkan moderasi beragama. Agama menjadi pedoman hidup dan solusi jalan tengah (*the middle path*) yang adil dalam menghadapi masalah hidup dan kemasyarakatan, agama menjadi cara pandang dan pedoman yang seimbang antara urusan dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, idealisme dan fakta, individu dan masyarakat. Hal sesuai dengan tujuan agama diturunkan ke dunia ini agar menjadi tuntunan

hidup, agama diturunkan ke bumi untuk menjawab berbagai persoalan dunia, baik dalam skala mikro maupun makro, keluarga (*privat*) maupun negara (*publik*).

Moderasi beragama harus dipahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragamaorang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini niscaya akan menghindarkan kita dari sikap ekstrem berlebihan, fanatik dan sikap revolusioner dalam beragama. Seperti telah diisyaratkan sebelumnya, moderasi beragama merupakan solusi atas hadirnya dua kutub ekstrem dalam beragama, kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain.

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pilihan pada moderasi dengan me-nolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama adalah kunci keseimbangan, demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dalam masyarakat multicultural

seperti Indonesia, moderasi beragama bisa jadi bukan pilihan, melainkan keharusan.

C. Prinsip Dasar Beragama: Adil dan Berimbang

Prinsipnya ada dua: adil dan berimbang, bersikap adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin. Sedangkan sikap berimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajaran-Nya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia. Orang yang ekstrem sering terjebak dalam praktek beragama atas nama Tuhan hanya untuk membela keagungan-Nya saja seraya mengenyampingkan aspek kemanusiaan. Orang beragama dengan cara ini rela membunuh sesama manusia “atas nama Tuhan” padahal menjaga kemanusiaan itu sendiri adalah bagian dari inti ajaran agama.⁵⁸

Mohammad Hashim Kamali (2015) menjelaskan bahwa prinsip keseimbangan (balance) dan adil (justice)

⁵⁸ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragam,.....7*

dalam konsep moderasi (*wasathiyah*) berarti bahwa dalam ber-agama, seseorang tidak boleh ekstrem pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, *wasathiyah* merupakan aspek penting dalam Islam yang acapkali dilupakan oleh umatnya, padahal, *wasathiyah* merupakan esensi ajaran Islam.

Moderasi bukan hanya diajarkan oleh Islam, tapi juga agama lain. Lebih jauh, moderasi merupakan kebijakan yang mendorong terciptanya harmoni sosial dan keseimbangan dalam kehidupan secara personal, keluarga dan masyarakat hingga hubungan antarmanusia yang lebih luas.

Kedua nilai ini, adil dan berimbang, akan lebih mudah terbentuk jika seseorang memiliki tiga karakter utama dalam dirinya: kebijaksanaan (*wisdom*), ketulusan (*purity*), dan keberanian (*courage*). Dengan kata lain, sikap moderat dalam beragama, selalu memilih jalan tengah, akan lebih mudah diwujudkan apabila seseorang memiliki keluasan pengetahuan agama yang memadai sehingga dapat bersikap bijak, tahan godaan sehingga bisa bersikap tulus tanpa beban, serta tidak egois dengan tafsir kebenarannya sendiri sehingga berani mengakui tafsir kebenaran orang

lain, dan berani menyampaikan pandangannya yang berdasar ilmu.

Dalam rumusan lain, dapat dikatakan bahwa ada tiga syarat terpenuhinya sikap moderat dalam beragama, yakni: memiliki pengetahuan yang luas, mampu mengendalikan emosi untuk tidak melebihi batas, dan selalu berhati-hati. Jika disederhanakan, rumusan tiga syarat moderasi beragama ini bisa diungkapkan dalam tiga kata, yakni harus: berilmu, berbudi, dan berhati-hati.

Jika dielaborasi lebih lanjut, maka kita dapat mengidentifikasi beberapa sifat lain yang harus dimiliki sebagai prasyarat moderasi beragama, seperti: keharusan memiliki pengetahuan yang komprehensif terkait ritual ibadah. Pengetahuan komprehensif atas hukum melaksanakan ibadah dalam sebuah agama tentunya akan memudahkan umatnya untuk memilih alternatif andai ia membutuhkannya, meski tentu dengan prinsip bukan untuk menganggap enteng atau ‘memudah-mudahkan’ sebuah praktik ritual keagamaan. Cara ini semata untuk mengedepankan prinsip kemudahan dalam beragama, sejauh dimungkinkan pelaksanaannya. Kondisi ini memang cukup berat dimiliki karena asumsinya sang umat itu harus

benar-benar memahami teks-teks keagamaan secara komprehensif dan kontekstual.

Pemahaman dan pengamalan keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal: Pertama, nilai kemanusiaan; Kedua, kesepakatan bersama; dan Ketiga, ketertiban umum. Prinsip ini juga untuk menegaskan bahwa moderasi beragama berarti menyeimbangkan kebaikan yang berhubungan dengan Tuhan dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.

Prinsip moderat dalam Islam adalah sebagai berikut :

1) *Tawassuth* (mengambil jalan tengah), 2) *Tawazun* (berkeseimbangan), 3) *I'tidal* (lurus dan tegas) , 4) *Tasamuh* (toleransi), 5) *Musawah* (persamaan), 6) *Syura* (musyawarah), 7) *Ishlah* (reformasi) , 8) *Aulawiyah* (mendahulukan yang peroritas), 9) *Tathawur wa ibtikar* (dinamis dan inovatif), dan 10) *Tahadhdhur* (berkeadaban)⁵⁹.

Termaktub dalam *Islam rohmatan lil alamin* memiliki ciri ciri moderasi beragama yang harus tertanan dalam jiwa manusia diantaranya :

⁵⁹ Mustaqim Hasan, *Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa*, Jurnal Mubtadiin, Vol. 7 No. 02 Juli-Desember 2021 <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/mubtadii>, 115-121

1. *Wasathiyah* (Mengambil Jalan Tengah)

Yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebih lebih dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama, jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat. Sehingga "*wasathiyah*" ialah suatu pandangan ataupun perilaku yang senantiasa berupaya mengambil posisi tengah dari 2 perilaku yang berseberangan serta kelewatan sehingga salah satu dari kedua perilaku yang diartikan tidak mendominasi dalam benak serta perilaku seorang. Sebagaimana pendapat Khaled Abou el Fadl dalam *The Great Theft*, kalau "moderasi" merupakan pemahaman yang mengambil jalur tengah, ialah pemahaman yang tidak ekstem kanan dan tidak pula ekstem kiri.⁶⁰

Umat Islam tidak boleh hanya berpedoman teks saja kemudian melupakan konteks sehingga menjadikan pemahaman yang ekstrim , radikal, kaku dan keras (fundamentalis) sehingga bersifat egois menganggap yang lain jika tidak serupa dengan pemahamnaya

⁶⁰ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keutamaan, dan Kebangsaan* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 13

dianggap hal keliru dan salah. Tidak juga pula umat Islam hanya mengedepankan konteks saja mengesampingkan teks ajaran agama sebagai podoman (Al Quran dan hadits) sehingga menjadikan pemahanya (liberalisme). bebas tanpa arah liar liar sesuka hati tak terkendali. Seseorang hamba wajib pantaslah taat kepada Allah SWT sebagai tuhanya, dengan menjalankan ibadah sholat , puasa zakat , haji serta melaksanakan ibadah ibadah sunnah lainnya, namun hendaknya seseorang hamba wajib paham bahwa tidak dibenarkan bila memutuskan aktivitas dunia dan menjauhkan dirinya dengan masyarakat. Keduanya haruslah simbang antara urusan dunia serta urusan akhirat serta tidak mendominasi dari keduanya

2. *Tawazun* (Seimbang)

Tahawzun merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari dari garis yang telah di ditetapkan. Jika di telusuri istilah tawazun berakar dari kata mizan yang berarti timbangan. Tapi dalam pemahaman konteks moderasi mizan bukan diartikan sebagai alat atau benda yang di gunakan untuk menimbang melainkan keadilan dalaam semua aspek kehidupan baik terkait dengan

dunia ataupun terkait dengan kehidupan yang kekal kelak di akhirat. Islam adalah agama yang seimbang, menyeimbangkan antara peranan waku ilahi dengan mendayagunakan akal rasio, serta memberikan bagian tersendiri bagi wahyu dan akal. Dalam menjalanain hidup islam mengajarkan untuk bersikap seimbang antara ruh dengan akal , akal dan hati, hati nurani dan nafsu dan sebagainya.⁶¹

Dari uraian diatas , tawazun pahami dalam konteks moderasi adalah berperilaku adil , seimbang tidak berat sebelah dibarengi dengan kejujuran sehingga tidak bergeser dari garis yang telah ditentukan. Sebab ketidak adilan merupakan cara merusak keseimbangan dan kesesuaian jalanya alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah sang maha kuasa.

3. *I'tidal* (Lurus dan Tegas)

Istilah *I'tidal* berasal dari kata bahasa arab yaitu adil yang berarti sama, dalam kamus besar bahasa Indonesia adil berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang wenang. *I'tidal* merupakan pandangan yang

⁶¹Alif Cahya Setiyadi, *Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisas.*, Jurnal Vol. 7, No. 2, Desember 2012, h.252

menempatkan sesuatu pada tempatnya , membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban.⁶² Sebagai seorang muslim kita diperintahkan berlaku adil kepada siapa saja dalam hal apa saja dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ikhsan dengan siapa saja. Karena keadilan inilah menjadi nilai luhur ajaran agama, omong kosong kesejahteraan masyarakat terjadi tanpa adanya keadilan.⁶³

4. *Tasamuh* (Toleransi)

Tasamuh jika ditinjau dari bahasa arab berasal dari kata *samhun* yang berarti memudahkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia toleransi berarti : bersifat menghargai, membiarkan, membolehkan, sesuatu berbeda ataupun berlawanan dengan pendirian sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan perilaku menghargai pendirian orang lain menghargai bukan berarti membetulkan terlebih bersepakat mengikuti dan membenarkannya. Dalam hal beragama tidak dibenarkan toleransi dalam

⁶² Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012), hlm. 20-2

⁶³ Nurul H. Maarif, *Islam Mengasihi Bukan Membenci*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017), hlm. 143

ranah keimanan dan ketuhanan. tata cara ibadah harus sesuai dengan ritual dan tempatnya masing masing. Moderasi memandang bahwa setiap agama benar menurut kepercayaan bagi para penganutnya penmganutnya masing masing dan tidak dibenarkan menganggap bahwa semua agama itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh dilakukan dalam ranah sosial dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan persatuan.

5. *Musawah* (Persamaan)

Musawah berarti persamaan derajat, Islam tidak pernah membeda bedakan manusia dari segi personalnya semua manusia memiliki derajat yang sama diantara manusia lainnya tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, pangkat karena semuanya telah ditentukan oleh sang pencipta manusia tidak dapat hak untuk merubah ketetapan yang telah di tetapkan. Firman Allah SWT dalam Surat Al Hujurat ayat 13. Yang artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia

diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al Hujurat : 13)

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa semua manusia memiliki personal yang sama diantara manusia hanya disisih tuhanlah manusia berbeda dilihat dari amal dan perbuatan yang dilakukannya. Jika kita meninjau sejarah nusantara bahwa para wali songgo sebagai penyebar agama islam juga sangat intes mengajarkan persamaan derat tidak ada yang lebih tinggi mulia derat seseorang diantara sesama manusia, tidak ada kawula dan tidak ada gusti dirubah menjadi Rakyat yang berasal dari kata Roiyat yang berarti pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama berkerjasama saling bahu membahu sehingga disebut masyarakat dan istilah ini digunakan sampai saat ini.⁶⁴

⁶⁴Emha Ainun Najib, “*Diskontinuitas Sejarah Kepemimpinan Sebagai Akar Masalah*”, <https://www.caknun.com/2017/diskontinuitas-sejarahkepemimpinan-sebagai-akar-masalah/>, Diakses pada Selasa, 14 September 2021, 17.19 WIB

6. *Syuro* (Musyawarah)

Istilah *Syuro* berakar dari kata *Syawara* – *Yusawiru* yang memiliki arti memberikan penjelasan, menyatakan atau mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata *syawara* ialah *tasyawara* yang berarti perundingan, saling berdialog bertukar ide; sedangkan *syawir* memiliki pengertian mengajukan pendapat atau bertukar pikiran.⁶⁵ Jadi *musyawarah* merupakan jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan jalan duduk bersama berdialog dan berdiskusi satu sama lain untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan bersama di atas segalanya. Dalam konteks moderasi, *musyawarah* merupakan solusi untuk meminimalisir dan mengilangkan prasangka dan perselisihan antar individu dan kelompok, karena *musyawarah* mampu menjalin komunikasi, keterbukaan, kebebasan berpendapat, serta sbagai media silaturahmi sehingga akan terjalin sebuah hubungan persaudaraan dan persatuan yang erat dalam

⁶⁵ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, h. 18

ukhuwah islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basariyah dan ukhuwah insaniyah.

7. *Ishlah* (Reformasi)

Ishlah berakar dari kosa kata bahasa arab yang berarti memperbaiki atau mendamaikan. Dalam konsep moderasi, islah memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman atas dasar kepentingan umum dengan berpegang pada prinsip memelihara nilai nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai nilai tradisi baru yang lebih baik demi kemaslahatan bersama. Pemahaman ini akan menciptakan masyarakat yang senantiasa menyebarkan pesan perdamaian dan kemajuan menerima pembaharuan dan persatuan dalam hidup berbangsa.

8. *Awlawiyah* (Mendahulukan Perioritas)

Al-awlawiyyah adalah bentuk jamak dari kata al-aulaa, yang berarti penting atau perioritas. Awlawiyah juga dapat diartikan sebagai mengutamakan kepentingan yang lebihperiritas. Menurut istilah awlawiyah, dari segi implementasi (aplikasi), dalam beberapa kasus yang paling penting adalah

memprioritaskan kasus-kasus yang perlu diprioritaskan daripada kasus-kasus yang kurang utama lainnya tergantung pada waktu dan durasi implementasi.⁶⁶ Awlawiyah dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa harus mampu memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa. Dalam pengertian yang lain awlawiyah berarti memiliki pandangan keluasan menganalisa dan mengidentifikasi hal ihwal permasalahan sehingga mampu menemukan sebuah pokok masalah yang sedang terjadi di masyarakat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran teori sebagai solusi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat /problem solving.

9. *Tathawur Wa Ibtikar* (Dinamis dan Inovatif)

Tathawwur wa Ibtikar merupakan sifat dinamis dan inovatif yang memiliki pengertian bergerak dan pembaharu, selalu membuka diri untuk bergerak aktif partisipasi untuk melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemajuan dan kemaslahatan umat. Jika kita

⁶⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fi Fiqh al-Aulawiyat, Dirasa Jadidah fi Dau' alQur'an wa al Sunnah*, (Jakarta: Rabbani press, 1996)

mundur kebelakang menilik sejarah masa lalu menurut anang solikhudin, bahwa salah satu penyebab umat islam mengalami kemunduran salah satunya di pengaruhi oleh kemunduran berfikir umat Islam.⁶⁷ berdaya menentukan nasibnya sendiri. Doktrin tersebut menyebabkan anggapan bahwa pintu ijtihad untuk berfikir menemukan solusi dari permasalahan tertutup sehingga umat Islam bersifat jumud , taklid buta sulit mendapatkan pembaharuan dan pencerahan. Oleh Karena itu dari perjalanan sejarah kita harus belajar, bahwa moderasi membuka peluang kita sebagai bangsa yang besar untuk terus bergerak dinamis sesuai kapasitas masing masing dan inovatif melakukan pembaharuan dan terobosan baru jangan hanya diam dan menutup diri dari perubahan zaman terlena dengan apa yang sudah kita miliki .

10. Tahadhdhur (Berkeadaban)

Menjunjung tinggi moralitas, kepribadian, budi luhur, identitas dan integrasi sebagai khoiruu

⁶⁷ Anang Sholikhudin, “*Merebut Kembali Kejayaan Islam Analisis Internal Dan Eksternal Penyebab Kemunduran Islam*”, AlMurabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam, Volume 3, Nomor 1, Desember 2017, hal . 136

mmah dalam kehidupan dan peradaban manusia. Berkeadaban memiliki banyak konsep salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan cikal bakal sebuah peradaban semakin tinggi ilmu yang di miliki seseorang maka akan semaking luas memandang , luasnya pandangan menjadikannya melihat segala sudut arah sehingga akan menjadi pribadi yang bijaksana, kebijaksanaan /hikmah tercermin dalam tingkahlaku berupa adab atau moralitas yang tinggi dan mulia. Keberadaban dalam konteks moderasi dalam kehidupn berbangsa menjadi penting untuk di amalkan karena semakin tginggi abab seseorang maka akan semaking tinggi pula toleransi dan penghargaannya kepada orang lain, memandang bukan hanya dalam perspektif dirinya sendiri melainkan melihat dari berbagai macam prespektif.

D. Indikator Moderasi Beragama

Moderasi beragama merupakan pemahaman keagamaan yang mengambil posisi tengah, tidak condong ke kiri maupun ke kanan. Dalam konteks Islam *wasathiyah*, pemahaman ini pada dasarnya juga

mengandung prinsip keagamaan yang mengarah pada upaya untuk mengatur kehidupan yang seimbang. Keseimbangan dalam mengamalkan ajaran Islam menjadi hal amat penting untuk dipahami oleh setiap muslim. Dengan pemahaman Islam yang seimbang seseorang tidak akan condong pada suasana batin keimanan yang emosional karena ia akan dikendalikan oleh sikap dan pemahaman keagamaannya yang berlebihan. Ketika sikap keagamaan ditunjukkan melalui ekspresi kemarahan, akan mudah ditebak bahwa seseorang telah dikuasai oleh nafsu dan amarahnya. Konsekuensinya, karakteristik seperti ini kemudian membuat seseorang kurang bijaksana dalam bersikap dan bertindak, terutama kepada kelompok lain yang dianggap berbeda.

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, moderasi adalah ibarat bandul jam yang bergerak dari pinggir dan selalu cenderung menuju pusat atau sumbu (*centripetal*), ia tidak pernah diam statis. Sikap moderat pada dasarnya merupakan keadaan yang dinamis, selalu bergerak, karena moderasi pada dasarnya merupakan proses pergumulan terus-menerus yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Moderasi dan sikap

moderat dalam beragama selalu berkontestasi dengan nilai-nilai yang ada di kanan dan kirinya. Karena itu, mengukur moderasi beragama harus bisa menggambarkan bagaimana kontestasi dan pergumulan nilai itu terjadi.

Analogi bandul jam ini bisa lebih dijelaskan sebagai berikut: sikap keberagamaan seseorang sangat dipengaruhi oleh dua hal, yakni: akal dan wahyu. Keberpihakan yang ke-bablasan pada akal bisa dianggap sebagai ekstrem kiri, yang tidak jarang mengakibatkan lahirnya sikap mengabaikan teks. Sebaliknya, pemahaman literal terhadap teks agama juga bisa mengakibatkan sikap konservatif, jika ia secara ekstrem hanya menerima kebenaran mutlak sebuah tafsir agama.

Seorang yang moderat akan berusaha mengkompromikan kedua sisi tersebut. Ia bisa bergerak ke kiri memanfaatkan akalnya, tapi tidak diam ekstrem di tempatnya. Ia berayun ke kanan untuk berpedoman pada teks, dengan tetap memahami konteksnya.

Lalu apa indikator moderasi beragama itu?

Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan

apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Namun, untuk kepentingan buku ini, indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah empat hal, yaitu: 1) komitmen kebangsaan; 2) toleransi; 3) anti-kekerasan; dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia, dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita bisa menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama, untuk lebih jelasnya bisa menyimak penjelasan sebagai berikut.

1. Komitmen Kebangsaan

Merupakan indikator yang sangat penting untuk melihat sejauh mana cara pandang dan ekspresi keagamaan seseorang atau kelompok tertentu terhadap ideologi kebangsaan, terutama komitmennya di dalam menerima Pancasila sebagai dasar dalam bernegara. Persoalan komitmen kebangsaan saat ini sangat penting

untuk diperhatikan terutama ketika dikaitkan dengan kemunculan paham-paham baru keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya yang sudah lama terpatrit sebagai identitas kebangsaan yang luhur. Pada tingkat tertentu, kemunculan paham keagamaan yang tidak akomodatif terhadap nilai-nilai dan budaya bangsa tersebut akan mengarah pada sikap mempertentangkan antara ajaran agama dengan budaya karena ajaran agama seolah-olah menjadi musuh budaya. Pemahaman keagamaan seperti ini kurang adaptif dan tidak bijaksana karena sejatinya ajaran agama mengandung spirit dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

Pada saat yang sama, persoalan komitmen kebangsaan saat ini juga sangat penting untuk diperhatikan adalah ketika muncul paham-paham baru keagamaan yang bersifat transnasional yang memiliki orientasi untuk mewujudkan cita-cita pembentukan sistem negara yang tidak lagi mau bertumpu pada konsep nation-state, atau negara yang berbasis bangsa karena ingin mendirikan sistem kepemimpinan global yang enggan mengakui kedaulatan kebangsaan. Ketika narasi-narasi tersebut bermunculan di tengah-tengah

masyarakat, tentu akan mengkhawatirkan bagi keutuhan bangsa Indonesia. Orientasi gerakan dan pemikiran keagamaan yang memiliki cita-cita untuk mendirikan sistem negara seperti mencitacitakan bentuk negara dengan sistem khilafah, daulah islamiyah, maupun imamah yang berseberangan dengan prinsip negara bangsa Indonesia tentu tidak dibenarkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan komitmen kebangsaan yang telah disepakati bersama oleh para pejuang dan pendiri bangsa Indonesia. Untuk itu, pemahaman keagamaan dan kebangsaan harus diletakkan dalam nafas keseimbangan. Dalam hal ini indikator moderasi beragama bisa dilihat dari komitmen pemahaman keagamaan seseorang yang sekaligus dibungkus dalam bingkai kebangsaan. Segala bentuk paham keagamaan yang memiliki ideologi untuk menjauhkan. Individu maupun kelompok masyarakat dari komitmen kebangsaan dengan cita-cita mendirikan negara di luar sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dianggap tidak sesuai dengan indikator moderasi beragama.

2. Toleransi

Merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinannya, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Dengan demikian, toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Toleransi selalu disertai dengan sikap hormat, menerima orang yang berbeda sebagai bagian dari diri kita, dan berpikir positif.

Sebagai sebuah sikap dalam menghadapi perbedaan, toleransi menjadi fondasi terpenting dalam demokrasi, sebab demokrasi hanya bisa berjalan ketika seseorang mampu menahan pendapatnya dan kemudian menerima pendapat orang lain. Oleh karena itu, kematangan demokrasi sebuah bangsa, antara lain, bisa diukur dengan sejauh mana toleransi bangsa itu. Semakin tinggi toleransinya terhadap perbedaan, maka bangsa itu cenderung semakin demokratis, demikian juga sebaliknya. Aspek toleransi sebenarnya tidak hanya terkait dengan keyakinan agama, namun bisa

terkait dengan perbedaan ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, suku, budaya, dan sebagainya.

Toleransi beragama yang menjadi tekanan adalah toleransi antaragama dan toleransi intra agama, baik terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Hal ini bukan berarti toleransi di luar persoalan agama tidak penting, tetapi buku ini hanya fokus pada moderasi beragama, di mana toleransi beragama menjadi intinya. Melalui relasi antaragama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut.

Dalam konteks yang lebih luas, toleransi tidak hanya berhubungan dengan keyakinan beragama, namun juga mengarah pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, dan lain sebagainya. Islam merupakan ajaran yang toleran karena menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajaran Islam menuntun manusia untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Islam sangat menghormati setiap hak

asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong menolong. Ajaran Islam bukan untuk menundukkan kelompokkelompok lain yang berbeda, namun menjadi pelindung bagi peradaban dunia. Pada dasarnya, toleransi tidak hanya terkait dengan intra agama dan toleransi antar agama, namun juga terkait dengan toleransi sosial maupun politik. Dengan demikian, indikator dari moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan di dalam menunjukkan sikap dan ekspresi keagamaan dengan sesungguhnya untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Meskipun ruang lingkup toleransi bersifat umum, namun dalam konteks buku ini lebih ditekankan pada toleransi dalam memahami dan menghormati perbedaan yang diilhami oleh faktor pemahaman keagamaan.

3. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul sebagai akibat dari pemahaman keagamaan yang sempit. Sikap dan ekspresi yang muncul dari ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin melakukan perubahan dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan politik dengan

menggunakan cara-cara kekerasan. Kekerasan yang muncul dari sikap dan ekspresi keagamaan radikal tidak hanya pada kekerasan fisik, namun juga pada kekerasan non-fisik, seperti menuduh sesat kepada individu maupun kelompok masyarakat yang berbeda paham dengan keyakinannya tanpa argumentasi teologis yang benar.

Ajaran agama, terutama Islam sebagaimana telah disinggung di atas pada hakikatnya sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Islam hadir di muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta (rahmatan lil'alamin). Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri pada saat ini masih terjadi fenomena lain yang menjauh dari misi kerasulan tersebut karena faktor pemahaman keagamaannya yang konservatif. Tidak bisa dinafikan bahwa masih ditemui ekspresi keagamaan yang muncul dari sebagian umat Islam pada saat ini yang terlihat kurang bijaksana karena kaku dan eksklusif dalam beragama. Akibatnya, wajah Islam yang muncul dipermukaan publik dipandang oleh pihak di luar Islam terkesan angker. Wajah Islam di ruang publik menjadi tidak ramah, ekstrem, dan diskriminatif. Tentu saja, pernyataan ini tidaklah tepat karena wajah Islam yang

sesungguhnya adalah penuh kasih sayang sebagaimana misi keislaman itu sendiri sebagaimana yang telah disebutkan, yaitu untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta.

Selain faktor pemahaman yang kaku tersebut, radikalisme dan kekerasan juga muncul dari pemahaman keagamaan yang mengusung ideologi revivalisme dengan cita-cita untuk mendirikan negara Islam semacam daulah islamiyah seperti khilafah, darul Islam, dan imamah. Varian-varian ideologi keagamaan seperti ini yang kemudian semakin menambah rumit suasana dalam menciptakan kondisi harmonis dalam masyarakat. Sebagian kelompok ada yang sibuk dalam mengoreksi ibadah saudaranya yang seiman. Pada saat yang sama, sebagian kelompok yang lain ada yang dikendalikan oleh rasa benci secara berlebihan terhadap kelompok yang memiliki keyakinan berbeda dengan mengaitkannya sebagai musuh keimanan yang membahayakan, dan bahkan tidak menutup kemungkinan selanjutnya terdorong untuk mengafirkan pada kelompok seiman yang mengakui keragaman dan menghormati kepercayaan agama lain. Untuk itu, indikator moderasi beragama dalam hubungannya

dengan paham radikalisme terletak pada sikap dan ekspresi keagamaannya yang seimbang dan adil, yaitu sikap dan ekspresi keagamaan yang mengutamakan keadilan, menghormati, dan memahami realitas perbedaan di tengah-tengah masyarakat.

Radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme, karena kelompok radikal dapat melakukan cara apa pun agar keinginannya tercapai, termasuk menyorot pihak yang tidak se-paham dengan mereka. Walaupun banyak yang mengaitkan radikalisme dengan agama tertentu, namun pada dasarnya radikalisme tidak hanya terkait dengan agama tertentu, tetapi bisa melekat pada semua agama. Radikalisme bisa muncul karena persepsi ketidakadilan dan keterancaman yang dialami seseorang atau sekelompok orang. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam memang tidak serta merta melahirkan radikalisme. Ia akan lahir jika dikelola secara ideologis dengan memunculkan kebencian terhadap kelompok yang dianggap sebagai pembuat ketidakadilan dan pihak-pihak yang mengancam identitasnya. Ketidakadilan mempunyai dimensi yang luas, seperti ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, dan

sebagainya. Ketidakadilan dan perasaan ter-ancam bisa muncul bersama-sama, namun juga bisa terpisah. Persepsi ketidakadilan dan perasaan terancam tersebut bisa memunculkan dukungan pada radikalisme, bahkan terorisme, meskipun belum tentu orang tersebut bersedia melakukan tindakan radikal dan teror.

4. Akomodatif terhadap Budaya Lokal

Perjumpaan antara agama, khususnya Islam, dan budaya kerap mengundang perdebatan yang cukup panjang dan menyisakan beberapa persoalan. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang setelah nabi wafat sudah tidak turun lagi, sementara budaya adalah hasil kreasi manusia yang dapat berubah sesuai kebutuhan hidup manusia. Hubungan antara agama dan budaya merupakan sesuatu yang ambivalen. Di titik ini, kerap kali terjadi pertentangan antara paham keagamaan, terutama keislaman dengan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat setempat.

Dalam Islam, peleraian ketegangan antara ajaran keagamaan dan tradisi lokal dijembatani oleh fiqh. Fiqh yang merupakan buah ijtihad para ulama membuka ruang untuk menjadi “tool” dalam melerai ketegangan.

Sejumlah kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh seperti al-‘adah muhakkamah (tradisi yang baik bisa dijadikan sumber hukum) terbukti ampuh untuk mendamaikan pertentangan antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisi di satu sisi dan ajaran Islam di sisi lain, yang memang secara tekstual tidak diberikan dasar hukumnya.

Dari peleraian ketegangan ini membuktikan bahwa hukum Islam itu bersifat fleksibel dan dinamis. Ia bisa menyesuaikan dengan ruang dan zaman. Oleh karenanya, Islam akan terus relevan dalam konteks apapun dan di manapun. Dalam konteks Islam di Indonesia, penyesuaian ajaran agama dengan masyarakat Indonesia dan tradisi serta kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat menjadi ciri khas dari keislaman masyarakat di Indonesia, yang dalam bahasa lainnya disebut sebagai Pribumisasi Islam.

Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan ditambah

lagi masukan anak-anak sungai cabang sehingga sungai itu makin membesar. Artinya adalah bahwa pribumisasi merupakan bagian dari proses pergulatan dengan kenyataan sejarah yang sama sekali tidak mengubah substansi Islam itu sendiri.

Dalam konsep pribumi Islam ini pengejawantahan ajaran-ajaran Islam agar tidak bertentangan dengan tradisi dan kebudayaan lokal. Pribumisasi bukan berarti meninggalkan norma-norma keislaman demi budaya, tetapi agar norma-norma tersebut menampung kebutuhan-kebutuhan budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash (Al-Quran dan Hadis). Perpaduan di antara keduanya menjadi saling melengkapi, di mana Islam lahir dari perintah Allah, sedangkan budaya merupakan hasil dari kreasi manusia. Dalam pribumisasi Islam nampak bagaimana Islam diakomodasikan ke dalam tradisi dan budaya yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitas masing-masing, sehingga tidak ada pemurnian Islam atau

penyeragaman praktik keagamaan dengan budaya Timur Tengah⁶⁸.

Pribumisasi Islam bukan untuk memunculkan perlawanan dari kekuatan tradisi-tradisi setempat, akan tetapi memperteguh eksistensi dari budaya tersebut. Dengan demikian, reformasi paham keislaman yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya kearifan lokal merupakan pemikiran keislaman yang kaku yang menjauh dari semangat moderasi beragama karena semangat moderasi adalah semangat keagamaan yang kritis, akomodatif, dan kontekstualis untuk melepaskan kebekuan dalam memahami ajaran agama menuju pemahaman yang mencair dan membuka ventilasi pemikiran yang lebih luas. Sikap keagamaan yang tidak akomodatif terhadap tradisi dan budaya merupakan bentuk yang kurang bijaksana.

Sikap keagamaan ini menjauh dari prinsip dan nilai agama karena akan menggerus nilai-nilai kearifan lokal bangsa. Pandangan bahwa agama menjadi musuh budaya, atau sebaliknya budaya menjadi musuh agama, sebagaimana disinggung di atas tidak sesuai dengan moderasi beragama. Di dalam moderasi ini tidak

⁶⁸ Jurnal Tashwirul Afkar: 2003

dipertentangkan antara keduanya dalam bentuk dualisme yang saling menjaga jarak, melainkan antara agama dan budaya, keduanya saling mengisi. Konsep pemahaman keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya tersebut sejalan dengan konsep Islam.

Fakta tentang adanya usaha “*Pribumisasi Islam*” merupakan jejak peninggalan dan warisan dakwah generasi awal pembawa Islam seperti Wali Songo yang masih terlihat sampai hari ini dalam bentuk penyesuaian ajaran Islam semisal penggunaan bahasa lokal sebagai ganti dari bahasa Arab. Sejumlah bahasa lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah berbahasa Arab, misalnya dalam penggunaan sebutan “Gusti Kang Murbeng Dumadi” sebagai ganti dari Allah Rabb al-‘Alamin; Kanjeng Nabi untuk menyebut Nabi Muhammad SAW; susuhunan atau sunan untuk menyebut hadrat alshaikh; puasa untuk mengganti istilah shaum; sembahyang sebagai ganti shalat, dan masih banyak lainnya.

Praktik dan perilaku keagamaan yang akomodatif terhadap tradisi dan budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana pemahaman

tersebut bersedia untuk menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan prinsip dasar agama. Pemahaman keagamaan yang tidak kaku ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran paradigma keagamaan normatif, namun juga paradigma kontekstualis yang positif.

Sedangkan praktik dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Orang-orang yang moderat memiliki kecenderungan lebih ramah dalam penerimaan tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaannya, sejauh tidak bertentangan dengan pokok ajaran agama. Tradisi keberagaman yang tidak kaku, antara lain, ditandai dengan kesediaan untuk menerima praktik dan perilaku beragama yang tidak semata-mata menekankan pada kebenaran normatif,

melainkan juga menerima praktik beragama yang didasarkan pada keutamaan, tentu, sekali lagi, sejauh praktik itu tidak bertentangan dengan hal yang prinsipil dalam ajaran agama. Sebaliknya, ada juga kelompok yang cenderung tidak akomodatif terhadap tradisi dan kebudayaan, karena mempraktikkan tradisi dan budaya dalam beragama akan dianggap sebagai tindakan yang mengotori kemurnian agama. Meski demikian, praktik keberagaman ini tidak bisa secara serta merta menggambarkan moderasi pelakunya.

Hal ini hanya bisa digunakan untuk sekadar melihat kecenderungan umum. Pandangan bahwa seseorang yang semakin akomodatif terhadap tradisi lokal, akan semakin moderat dalam beragama memang masih harus dibuktikan. Bisa jadi, tidak ada korelasi positif antara sikap moderat dalam beragama dengan akomodasi terhadap tradisi lokal dalam beragama.⁶⁹

⁶⁹ Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Moderasi Beragama / oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

E. Landasan Moderasi dalam Tradisi Berbagai Agama

Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia menjadi hambahanya bagi Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain, dan juga tidak diperhambakan oleh yang lain. Di sinilah esensi nilai keadilan antarmanusia sebagai sesama makhluk Tuhan.

Indonesia merupakan negara multikultural, artinya mempunyai keanekaragaman budaya, suku dan ras. Indonesia negara yang majemuk memiliki penduduk yang banyak, wilayah yang luas, kekayaan alam melimpah, beserta kekayaan bahasa dan juga budaya yang begitu beragam. Jika dilihat, Indonesia mempunyai potensi yang besar dan sekaligus juga memiliki permasalahan yang cukup besar juga. Dapat diartikan Indonesia selain besar arah positifnya, besar juga arah negatif atau berbagai permasalahan yang dihadapi. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Berdasarkan keterangan ini, di Indonesia sangat rentan terjadi konflik antar sesama warga negara yang

mendasari perbedaan tersebut. Sebagai negara yang berdasarkan Tuhan yang Esa, memiliki tanggung jawab atas segala dinamika keagamaan yang terjadi pada wilayah ini. Mengenai konsep keragaman, hal ini bukan hanya karena faktor teritorial atau hukum alam namun adalah fitrah. Pembentukan berbagai kelompok beragama, kelompok lintas agama sampai pada pembuatan lembaga khusus yang memiliki fokus kajian moderasi beragama adalah langkah konstruktif untuk merancang dan membuat kehidupan yang damai dalam bingkai moderasi beragama.

Di Indonesia kepercayaan atau agama masyarakat Indonesia yang resmi diakui oleh negara yaitu ada enam agama. Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, Buddha, Hindu dan Khonghucu. Namun, di luar dari keenam agama resmi tersebut, masih ada paham-paham atau aliran-aliran kepercayaan lainnya. Menganalisis besarnya jumlah tersebut disertai dengan bentang wilayah yang luas, maka tugas selanjutnya adalah menjaga dan merawat kekayaan immaterial tersebut agar tetap eksis namun tetap menyesuaikan juga dengan pergerakan dan perkembangan zaman.

Manusia juga menjadi hamba Tuhan yang diberi mandat untuk memimpin dan mengelola bumi, sebagai

makhluk yang diciptakan dengan keunggulan budi pikir. Bumi perlu dikelola agar tercipta kemaslahatan bersama. Inilah salah satu visi kehidupan terpenting dan terkuat yang diajarkan agama. Karena keterbatasan manusia, maka bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini: bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal, agar tercapai kemaslahatan bersama yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa.

Moderasi beragama menjadi muatan nilai dan praktik yang paling sesuai untuk mewujudkan kemaslahatan bumi Indonesia. Sikap mental moderat, adil, dan berimbang menjadi kunci untuk mengelola keragaman kita. Dalam berkhidmat membangun bangsa dan negara, setiap warga Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang seimbang untuk mengembangkan kehidupan bersama yang tenteram dan menentramkan. Bila ini dapat kita wujudkan, maka setiap warga negara dapat menjadi manusia Indonesia seutuhnya, sekaligus menjadi manusia yang menjalankan agama seutuhnya.

Seperti telah dikemukakan, ajaran untuk menjadi moderat bukanlah semata milik satu agama tertentu saja, melainkan ada dalam tradisi berbagai agama dan bahkan dalam peradaban dunia. Adil dan berimbang, yang telah dijelaskan sebelumnya, juga sangat dijunjung tinggi oleh semua ajaran agama. Tidak ada satu pun ajaran agama yang menganjurkan berbuat aniaya/zalim, atau mengajarka sikap berlebihan.

Ajaran *wasathiyah*, seperti telah dijelaskan pengertiannya, adalah salah satu ciri dan esensi ajaran agama. Kata itu memiliki, setidaknya, tiga makna, yakni: pertama bermakna tengah-tengah; kedua bermakna adil; dan ketiga bermakna yang terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau tidak saling berkaitan satu sama lain, karena sikap berada di tengah-tengah itu seringkali mencerminkan sikap adil dan pilihan terbaik.

Di Indonesia, diskursus *wasathiyah* atau moderasi sering dijabarkan melalui tiga pilar, yakni: moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan moderasi perbuatan. Terkait pilar yang *pertama*, pemikiran keagamaan yang moderat, antara lain, ditandai dengan kemampuan untuk memadukan antara teks dan konteks, yaitu pemikiran keagamaan yang tidak semata-mata bertumpu pada teks-

teks keagamaan dan memaksakan penundukan realitas dan konteks baru pada teks, tetapi mampu mendialogkan keduanya secara dinamis, sehingga pemikiran keagamaan seorang yang moderat tidak semata tekstual, akan tetapi pada saat yang sama juga tidak akan terlalu bebas dan mengabaikan teks.

Pilar *kedua* adalah moderasi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini, gerakan penyebaran agama, yang bertujuan untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemunkaran, harus didasarkan pada ajakan yang dilandasi dengan prinsip melakukan perbaikan, dan dengan cara yang baik pula, bukan sebaliknya, mencegah kemunkaran dengan cara melakukan kemunkaran baru berupa kekerasan.

Pilar *ketiga* adalah moderasi dalam tradisi dan praktik keagamaan, yakni penguatan relasi antara agama dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Kehadiran agama tidak dihadapkan secara diametral dengan budaya, keduanya saling terbuka membangun dialog menghasilkan kebudayaan baru.

Diskursus moderasi tentu saja tidak hanya milik tradisi Islam, melainkan juga agama lain, seperti Kristen. Apalagi dalam konteks Indonesia, karakter keagamaan

Kristen juga mengalami ‘penyesuaian’ dengan atmosfer kebangsaan ke-Indonesiaan. Dengan berbagai tantangan dan dinamikanya, tafsir ideologis kekristenan pun kemudian menemukan konteksnya di Indonesia dan mengakar menjadi bagian dari masyarakat multikultural Indonesia.

Umat Kristiani yakin bahwa Pancasila adalah yang terbaik, yang dapat menempatkan umat Kristiani sejajar di mata hukum dengan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, menghindarkan dari diskriminasi, tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Umat Kristiani meyakini bahwa Pancasila dan UUD 1945 menjadi pegangan dalam berbangsa dan bernegara yang telah memberikan jaminan bahwa masing-masing pemeluk agama diberikan keleluasaan untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya masing-masing.

Sesungguhnya moderasi beragama menjadi signifikan tidak hanya bagi penciptaan relasi-relasi konstruktif di antara agama-agama secara eksternal, tetapi juga penting secara internal untuk menciptakan harmoni di antara berbagai aliran di dalam satu agama. Konflik internal agama tidak lebih ringan dari konflik eksternal. Karena itu, moderasi beragama secara internal juga penting

untuk dikembangkan melalui langkah-langkah strategis dengan melibatkan dan memaksimalkan peran semua pihak.

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, dalam istilah moderasi beragama harus dipahami bahwa yang dimoderasi bukan agamanya, melainkan cara kita beragama. Hal ini karena ajaran agama sudah pasti moderat. Hanya saja ketika agama membumi, lalu hakikatnya menjadi sesuatu yang dipahami oleh manusia yang terbatas dan relatif. Agama kemudian melahirkan aneka ragam penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda. Oleh karena itu, moderasi beragama merupakan keniscayaan untuk menghindari penafsiran yang berlebihan dan paham keagamaan yang ekstrem, sehingga tidak akan menimbulkan konflik antar umat beragama.

F. Moderasi di antara Radikalisme dan Liberalisme

Membahas tentang moderasi beragama berarti mendudukan ajaran agama yang seimbang dan adil. Pemahaman ini memiliki konsekuensi penting bahwa sikap moderasi beragama bukan berada dalam posisi yang serba berlebihan. Sikap moderasi beragama memilih untuk konsisten dalam memegang prinsip-prinsip keagamaan tanpa terjebak dalam kotak liberalisme maupun kotak ekstremisme. Begitu pula ketika mengambil posisi tengah dalam sikap ber-Islam tidak bisa

diartikulasikan sebagai sikap kebingungan atau tidak memiliki semangat (ghiroh) dalam beragama.

Pemahaman tentang moderasi beragama identik digunakan untuk menangani masalah konservatisme beragama, terutama yang sering disebut sebagai kelompok ekstrem kanan. Karena itu, pemahaman tentang moderasi beragama yang hanya cenderung diarahkan kepada gerakan ultra konservatif belum dikatakan memenuhi pemahaman yang utuh tentang moderasi beragama itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa moderasi beragama adalah paham keagamaan yang berimbang, yaitu pemahaman keagamaan yang berada di tengah-tengah yang tidak condong ke kanan atau ke kiri, sehingga moderasi beragama tidak tepat kalau hanya diarahkan untuk menengahi paham keagamaan konservatif yang radikal.

Moderasi beragama, selain digunakan sebagai pengimbang paham radikalisme, juga memiliki peran penting sebagai pengimbang paham keagamaan yang cenderung mengarah pada ideologi liberalisme. Moderasi beragama atau yang dalam Islam dikenal sebagai Islam wasathiyah dalam posisi pemahaman keagamaan Islam tidak lebih condong untuk mengikuti ekstrem kiri dan ekstrem kanan, karena akan berat sebelah dan tidak seimbang, sehingga apabila pemahaman keagamaan tersebut tidak seimbang, maka akan membentuk sikap tidak adil dalam memahami esensi ajaran agama itu sendiri.

Dalam konteks keislaman, sikap dan ekspresi seperti ini akan mendorong pemeluknya untuk tidak mau menerima pandangan orang lain yang berbeda. Kelompok ini akan bersikukuh dengan tafsir kebenarannya sendiri. Untuk itu, sikap dan ekspresi keagamaan manapun yang merasa paling benar sendiri ini, termasuk pemahaman keislaman yang sempit dan memaksakan tafsir kebenarannya tersebut lebih dikenal sebagai paham keislaman "garis keras" yang mengarah pada ideologi radikalisme. Pemahaman keagamaan yang cenderung hitam putih bukan moderasi beragama karena mengandung unsur pemaksaan dan merasa paling benar dengan cara resisten terhadap individu atau kelompok lain yang berbeda.

Perlu diperjelas kembali mengenai pemahaman moderasi beragama yang komprehensif karena pada saat ini masih sering dijumpai kesalahpahaman dari sekelompok orang maupun kelompokkelompok gerakan keagamaan, terutama gerakan keagamaan Islam tertentu yang belum jernih di dalam memahami konsep moderasi beragama. Pandangan yang sering muncul mengenai moderasi beragama dikesankan masih terjebak pada pandangan liberal. Kondisi ini karena di dalam pemaknaan moderasi tersebut mengandung prinsip toleransi, sehingga dalam

konteks moderasi beragama yang serba tanpa batas norma atau tidak didasarkan pada nilai-nilai etika tersebut bukan termasuk dari moderasi beragama. Pemahaman tersebut lebih tepat dikatakan sebagai paham kebebasan atau liberalisme.

Persoalan radikalisme yang mengatasnamakan paham keagamaan menjadi isu terpenting bagi bangsa Indonesia. Selain akan mengancam keharmonisan hubungan dalam kehidupan masyarakat, radikalisme agama juga akan mengancam eksistensi kebangsaan. Kelompok-kelompok radikal memiliki kecenderungan militan-reaksioner dalam melakukan aksi tuntutan di lapangan. Kelompok-kelompok ini mengkhawatirkan bagi keberlangsungan kehidupan yang berdasarkan pada tatanan sosial masyarakat yang harmonis. Paradigma keagamaan yang diyakininya tidak mau beradaptasi dengan kelompok lain yang berbeda, bahkan dalam melakukan aksi gerakannya, kelompok ini hampir berhasil menekan pemerintah untuk melegalkan aksi diskriminatifnya terhadap kelompok yang dianggap bertentangan dengan mazhab atau pilihan keyakinannya, terutama aksi diskriminatif kepada beberapa kelompok minoritas.

Dalam rangka menghilangkan kesan negatif dari ideologi radikalisme ini, moderasi beragama muncul sebagai strategi yang tepat dalam menutup paham radikalisme tersebut. Mengapa kedua kata ini selalu bertemu dalam diskursus pemikiran keagamaan? Bukankah di dalam agama, terutama Islam selalu mengedepankan perdamaian dan harmoni. Tentu saja, agama, khususnya Islam menjunjung tinggi perdamaian dan keselamatan.

Sebenarnya dalam moderasi beragama tidak ada pembatasan dalam memegang prinsip kebenaran sejati dalam pilihan keimanannya karena prinsip beragama memang terletak pada keimanan seseorang terhadap pilihan agamanya. Yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana cara seseorang yang beriman dengan keteguhan hati untuk meyakini agamanya tersebut, namun tetap menghormati dan menghargai pilihan keimanan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Pilihan paham moderasi beragama berada di tengah-tengah dari sikap yang berlebihan dan kaku. Pada saat yang sama, sikap tengah-tengah tersebut juga tidak berarti mengaitkan moderasi beragama untuk lebih condong kepada pemikiran kiri atau lebih condong kepada paham keagamaan liberalisme.

G. Respon Terhadap Kebijakan Pendirian Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan

Studi ini menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki pertimbangan akademik dan sosial yang berbeda mengenai kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan kampus menyebabkan perubahan di sektor lain yang saling terkait. Ada kebijakan untuk mendirikan Rumah Moderasi Keagamaan, ada universitas yang melakukannya dan ada yang tidak. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa universitas memiliki berbagai kekuatan sumber daya. Kebijakan pendirian rumah mediasi keagamaan di perguruan tinggi membuat perbedaan dalam sistem pendidikan. Ini termasuk mendeklarasikan kurikulum ketenangan beragama untuk mahasiswa KKN, menerapkan mata kuliah baru “Islam dan ketenangan beragama” untuk mahasiswa baru, dan menguji langkah-langkah ketenangan beragama. Selain itu, ada Teknik Moderasi Keagamaan, Leaflet, dan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Moderat.⁷⁰

⁷⁰ Abdul Rosyid, Tarbawi, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN 2715-4777 p-ISSN 2088-5733

Pendirian Rumah Moderasi Keagamaan memiliki nilai strategis. Namun saat ini, pendirian Lembaga Moderasi Keagamaan masih menjadi wacana yang sering diperdebatkan. Hal ini dikarenakan fungsi Lembaga Tuning Religi yang didirikan di lingkungan perguruan tinggi masih bersifat formal dan belum dilaksanakannya sehingga menimbulkan perbedaan tanggapan dari pihak PTKI. Apakah sebagai mata pelajaran mandiri atau bagian dari mata pelajaran yang sudah.

Perbedaan sikap yang ditunjukkan oleh masing-masing (PTKI) dapat dilihat pada hasil masing-masing. Strategi pengembangan Islam moderat di PTKI tentu berbeda. Setiap PTKI memiliki metode tersendiri yang dianggap lebih efektif dan efisien. Beberapa PTKI sudah mulai mengenalkan Islam moderat ke kampusnya sejak dini, sejak mahasiswa baru masuk universitas, termasuk saat orientasi akademik dan pengenalan kampus di PTK. Hal ini perlu dilakukan agar dapat terus mengikuti penanaman nilai-nilai moderasi beragama di PTKI kedepannya. Kami juga dapat menawarkan berbagai program seperti mini diskusi

Sebab keterbatasan manusia, jadi negara serta bangsa menjadi konteks tujuan dari tugas ini: bagaimana

manusia mengelola tanah yang mereka tinggali untuk mencapai kebaikan bersama yakni berbangsa serta bernegara yang adil, sejahtera serta damai. Cara pandang ini terdapat pada setiap agama dalam model keyakinan cinta tanah air merupakan bagian dari iman. Keseimbangan antara kebangsaan serta keagamaan sebenarnya merupakan asset berharga untuk kebaikan bangsa. Moderasi beragama memiliki nilai serta penerapan yang tepat untuk mewujudkan kebaikan di bangsa ini. Prilaku mental yang adil, moderat, serta seimbang menjadi strategi untuk mengelola pluralitas kita.

Dengan semangat membangun negara serta bangsa, setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban dan hak yang sama untuk bersama sama membangun kehidupan yang damai dan tentram.⁷¹

⁷¹ Indonesia, & Indonesia (Eds.). *Moderasi beragama* (Cetakan pertama). Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI. 2019

BAB IV
MENANGKAL RADIKALISME DI PERGURUAN
TINGGI STUDI ATAS RELASI PERAN
KEPEMIMPINAN DALAM PENGARUS UTAMAAN
MODERASI BERAGAMA

A. Konsep Kebijakan Pendidikan

Jika dilihat dari sudut pandang pendidikan, maka kebijakan pendidikan menyangkut penanganan masalah-masalah publik tentang pendidikan, atau masalah-masalah yang menjadi kepentingan umum sekolah-sekolah dan masyarakat dan pemerintah. Di dalam melaksanakan tugas pendidikan tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu, sehingga tujuan pendidikan yang diharapkan *stakeholders* lembaga pendidikan itu dapat tercapai. Di sinilah dibicarakan mengenai kebijakan pendidikan.⁷²

Akdon memahami bahwa pengertian kebijakan dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu manajemen, proses operasi dan sitemik. Lebih lanjut Akdon

⁷² Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho, 2008, *Kebijakan Pendidikan, Pengantar untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelahar, h. 92

menjelaskan, sudut pandang manajemen lebih menekankan pada proses perencanaan *input* dan *output*, sehingga bersifat lebih umum. Sudut pandang proses operasi lebih menekankan proses pengendalian bagaimana merubah input menjadi output, sehingga sifatnya lebih rinci. Gabungan antara pengertian kebijakan dari sudut pandang manajemen dan proses operasi menghasilkan perspektif yang menyeluruh atau sistemik, sehingga pengertian kebijakan merupakan tindakan mempengaruhi, menjamin, mengendalikan kerja system untuk mencapai kinerja system yang diinginkan atau direncanakan.⁷³

Menuntut Howlet dan Ramesh kebijakan memberi garis-garis pedoman untuk menyalurkan pemikiran seorang manajer ke arah tertentu. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah suatu pedoman yang menetapkan parameter-parameter untuk membuat keputusan.⁷⁴ Secara lebih sederhana First merumuskan: “*Policy can be simple defined as a vision*

⁷³ Akdon, 2006. *Strategic Mngement For Educational Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan)*. Bandung: Alfabeta, h.57

⁷⁴ Howlet dan Ramesh, 1995, *Studying Public Policy*, Oxford University, h. 50

of where we want to go and guidelines for getting there". Artinya, bahwa kebijakan adalah suatu visi kemana kita ingin pergi dan sebagai pedoman untuk mencapainya.⁷⁵

Senada dengan pendapat diatas, Bates, Eldredge & David, menyatakan bahwa kebijakan itu merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan organisasi ataupun masyarakat, dalam pencapaian sasaran, tujuan, misi, visi dapat berlangsung dengan lancar atau terpadu.⁷⁶ Anderson berpendapat kebijakan merupakan bagian dari perencanaan yang mempersiapkan seperangkat keputusan baik yang berhubungan dengan dana, tenaga, maupun waktu untuk mencapai tujuan.⁷⁷

⁷⁵ Firs, P.F. 1992, *Educational Policy for School Administrations*, Boston: Allyn Bacon, h. 14

⁷⁶ Bates, D.L., Eldredge dan David, L., 1980. *Strategy and Policy, Analysis, Formulation, and Implementation*. Iowa: Wim C. Brown Company Publishers, h.20

⁷⁷ Anderson, J.E., 1979. *Public Policy Making*. New York: Halt, Rinehart & Wisnston, h. 11

dan menurut Patton, keputusan tersebut memiliki esensi batas-batas tertentu.⁷⁸

Selanjutnya, Akdon memetakan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan bagi tindakan-tindakan tertentu berdasarkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran. Kebijakan berisikan kumpulan keputusan-keputusan untuk: (1) menentukan secara teliti bagaimana strategi akan dilaksanakan; (2) mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran; (3) menciptakan kebijakan dimana setiap pejabat dan pelaksana dalam organisasi mengetahui apakah memperoleh dukungan untuk bekerja dan mengimplementasikan keputusan.⁷⁹

Dalam buku SAKIP (LAN-RI) disebutkan bahwa elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan, dan tidak hanya baik secara teoritis. Bagi para pejabat menengah mereka tidak hanya memutuskan perubahan strategi, tetapi yang lebih penting adalah

⁷⁸ Patton, C.V., dan Sawicki, D.S., 1986, *Basic Methodes of Policy Analysis and Planning*. Englewood Cliffs, N.J:Prentice-Hall,Inc, h. 26

⁷⁹ Akdon, *Strategic Mnagement For*h.58

bagaimana strategi baru tersebut dapat dilaksanakan, kapan dilaksanakan, dan bagaimana dilaksanakannya secara efektif dan efisien.⁸⁰ Menurut Smith, kekuatan kebijakan sebagai sebuah system terletak pada sumber daya manusia sebagai unsure pelaku yang terlibat dari tingkat manajer sampai dengan pelaksana, selain itu ditentukan pula oleh upaya manajer dalam melakukan pembaruan yang berkelanjutan.⁸¹

Sagala menjelaskan disisi lain, istilah kebijakan (*policy*) seringkali dicampuradukkan dengan istilah kebijaksanaan (*wisdom*). Sesungguhnya kedua istilah tersebut mempunyai makna yang berbeda, meskipun keduanya memiliki kata dasar yang sama, yaitu “bijak” yang berarti mahir menggunakan akal budi untuk bertindak dalam mengatasi kesulitan.⁸² Tilaar & Nugroho menegaskan, bahwa dalam istilah kebijakan pertimbangan akal manusia merupakan landasan utama atau unsur yang dominan di dalam mengambil

⁸⁰ LAN, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2004, *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: LANRI, h. 11

⁸¹ Smith, G.D., Danny R, dan Bobby G.B., 1991, *Business Strategy and Policy*. Boston: Houghton Mifflin Company, h. 77

⁸² Sagala. S, 2000, *Administrasi Pendidikan Kontemporer*, Bandung : Alfabeta, h. 95

keputusan dari berbagai opsi dalam pengambilan keputusan kebijakan.⁸³ Dalam pengetahuan ini, istilah kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia, namun ada juga unsure-unsur lain yang mendasarinya. Sedangkan suatu kebijaksanaan lebih menekankan factor-faktor emosional dan irasional dengan tetap memperhatikan factor-faktor rasional. Dengan demikian, kebijakan adalah kepandaian menggunakan akal budi, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran.

Secara rinci, Guba (dalam Duke & Canady) mengidentifikasi delapan konsep kebijakan, sebagai berikut: (1) kebijakan adalah suatu pernyataan tentang tujuan-tujuan; (2) kebijakan adalah sejumlah keputusan yang diakumulasikan dari susunan pengaturan yang

⁸³ Tilaar, H.A.R. dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*.....h. 93

digunakan untuk sejumlah aturan, pengawasan, promosi, pelayanan, dan hal-hal lain yang mempengaruhi otoritas; (3) kebijakan adalah suatu panduan untuk kebebasan bertindak; (4) kebijakan adalah suatu strategi yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah; (5) kebijakan adalah perilaku yang diberi sanksi; (6) kebijakan adalah suatu norma sebagai cirri yang konsisten dan keteraturan dalam sejumlah lingkup tindakan substantive; (7) kebijakan adalah hasil dari sistem pembuatan kebijakan; dan (8) kebijakan adalah pengaruh dari system pembuatan kebijakan dn implementasi kebijakan sebagaimana yang dikenal kebijakan itu ⁸⁴.

Rich mengemukakan bahwa kebijakan tidak hanya mengatur system operasi secara internal, tetapi juga menyajikan pengaturan yang berhubungan dengan fungsi secara definitive diantara system ⁸⁵. Implikasi kebijakan menurut Mann mempersyaratkan dua hal. *Pertama*, sekelompok persoalan dengan karakteristik tertentu. *Kedua*, implikasi dari karakteristik pembuatan

⁸⁴ Duke D.L. & Canady, R.L., 1991, *School Policy*, New York : McGraw Hill, Inc, h. 203

⁸⁵ Rich, J. Martin, 1974, *New Direction in Educational Policy*, Lincoln, Nebraska: Profesional Educators Publications, h. 102

kebijakan sebagai suatu proses. Jika dilihat dari sudut pembangunan pendidikan, maka implikasi kebijakan pendidikan nasional adalah upaya peningkatan taraf dan mutu kehidupan bangsa dalam mengembangkan kebudayaan nasional. Karenanya, dalam pengambilan kebijakan selalu ditemukan problem. Karakteristik problem tersebut pada dasarnya adalah bersifat public, sangat konsekuensial, sangat kompleks, didominasi ketidakpastian, dan mencerminkan ketidaksepakatan tentang tujuan yang dicapai⁸⁶.

Mengacu pada beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan adalah merupakan proses atau serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan berdasarkan keputusan-keputusan atau pedoman yang dibuat oleh seorang atau kelompok orang pelaku pendidikan dalam menyikapi suatu permasalahan yang terjadi dalam konteks atau lingkungan kerja atau sistem politiknya⁸⁷.

⁸⁶ Mann, D., 1975, *Policy Decision Making in Education* New York: Teachers college Press, Columbia University, h. 67

⁸⁷ Ni Putu Suwardani, 2009, *Implementasi Kebijakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, (Studi Multisitus pada Tiga Sekolah Menengah Atas Negeri Di Bali)*, Disertasi tidak dipublikasikan, UM: PPS, h. 31

B. Kebijakan Pemimpin dalam Menangkal Radikalisme di Perguruan Tinggi

Faham radikalisme mulai masuk ke lingkungan kampus, khususnya kampus-kampus PTKIN, sulit untuk disimpulkan secara pasti. Yang jelas, gejala keberadaan faham ini diperkirakan telah muncul sejak tahun 2014 bersamaan dengan gencarnya aksi-aksi solidaritas mahasiswa terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya di Palestina. Pada masa itu, seruan untuk menentang zionisme yang didukung oleh negara-negara Barat dan Amerika sedemikian gencar dan menggema di hampir seluruh kampus, baik di kampus umum maupun Kampus keagamaan (Islam). Slogan-slogan anti Barat dan seruan untuk aksi solidaritas membantu kaum Muslim Palestina terus bergaung disertai propaganda bahwa Islam sedang berada di bawah ancaman musuh (Kaum Zionis dan negara-negara Barat) sekaligus ajakan untuk melakukan perang pemikiran (ghazw al-fikr)

melawan imperialisme, kapitalisme, sekularisme dan liberalisme Barat.⁸⁸

Secara berangsur-angsur propaganda tersebut berhasil menarik perhatian mahasiswa yang kemudian memutuskan untuk ikut bergabung, baik sebagai simpatisan maupun sebagai aktivis. Mereka yang bergabung ini kebanyakan di antaranya berasal dari mahasiswa Prodi umum, atau yang latar belakang pendidikannya berasal dari sekolah-sekolah umum. Dari titik inilah kemudian terbentuk kelompok-kelompok diskusi dan pengajian terbatas yang melibatkan pendakwah dari luar kampus berhaluan Salafi-Wahabi, Tarbiyah, dan Tahririyah. Meski tidak banyak dihadiri oleh mahasiswa, namun kegiatan-kegiatan pengajian (*liqo/dauroh*) tersebut tetap berlangsung secara kontinyu dan intens serta tidak jarang mengikut sertakan pengelola Lembaga-lembaga Dakwah Kampus (LDK), UKM, hingga masjid kampus.

Sedangkan di kalangan mahasiswa PTKIN sendiri, isu adanya radikalisme menjadi menarik setelah seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, BahrumSyah, muncul menjadi seorang pelopor ISIS di Indonesia, dan

88

beberapa orang alumni dari kampus yang sama, yakni: Pepi Fernando alias M Romi alias Ahya, Hendi Suhartono Alias Hendi alias Zokaw, Muhammad Maulana Sani alias Maulana alias Alan alias Asaf, Muhammad Fadil alias Fadil yang ditangkap oleh Densus 88 karena terlibat dalam kasus Bom Buku tahun 2011.⁸⁹

Saifuddin, orang yang pertama kali mengungkap tentang fenomena radikalisme di kalangan mahasiswa melalui penelitian yang dilakukannya di Yogyakarta pada tahun 2011. Berdasarkan temuannya, Syaifuddin menyimpulkan bahwa perguruan tinggi umum lebih mudah menjadi target rekrutmen gerakan radikal ketimbang perguruan tinggi berbasis keagamaan. Kalaupun ternyata faktanya menunjukkan bahwa gerakan radikal juga sudah marak dan subur di kampus-kampus berbasis keagamaan, maka ini dapat membuktikan dua hal. Pertama, telah terjadi perubahan di dalam perguruan tinggi berbasis keagamaan itu sendiri. Kedua, telah terjadi metamorfosa bentuk dan strategi gerakan di internal gerakangerakan radikal.⁹⁰

⁸⁹ <https://nasional.tempo.co/read/330514/inilah-para-tersangka-bom-buku/full&view=ok>

⁹⁰ Saifuddin, "Radikalisme di Kalangan Mahasiswa, Sebuah Metamorfosa Baru" dalam Analisis Jurnal Studi Keislaman, IAIN Raden Intan Lampung, Vol XI No 1 Juni 2011, hlm.28-29.

Bentuk radikalisme dalam perguruan tinggi tidak semuanya berupa aksi kekerasan, tetapi juga dapat diwujudkan dalam bentuk ucapan dan sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan yang tidak sesuai dengan norma-norma pendidikan. Sikap yang berpotensi melahirkan kekerasan tersebut berimplikasi kepada munculnya situasi dan kondisi lingkungan kampus yang tidak menyenangkan bagi mahasiswa dalam belajar. Peran atau fungsi perguruan tinggi Islam yang memiliki fitrah membimbing, mengarahkan, mengkaji ilmu pengetahuan, dan belajar bagi mahasiswa sekarang sudah berubah atau bergeser menjadi lembaga yang menakutkan, mencemaskan, menegangkan, bahkan menyiksa lahir dan batin pada sebagian mahasiswa. Mengapa demikian? karena orientasi pendidikan sudah berkurang yang awalnya sebagai bagian dari proses penyadaran menjadi proses pemaksaan dalam mengetahui, memahami dan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Perubahan situasi dan lingkungan serta suasana pendidikan yang melahirkan perubahan orientasi tersebut bukanlah tanpa sebab. Justru perubahan atau pergeseran itu merupakan akibat dari perkembangan atau dinamika budaya yang menyerpa masyarakat. Artinya masing masing elemen dalam pendidikan tidak mampu mengambil nilai

nilai positif atau manfaat akibat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Mayoritas masyarakat justru mengambil makna negatif dari perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan. Misalnya, gerakan reformasi yang tujuannya sangat mulia untuk menegakkan aturan dan keadilan malah menjadi ajang saling “pembantaian” sosial. Transparansi yang dimaksudkan untuk sarana pertanggung jawaban tugas dan perannya malah berubah menjadi ajang mencari cari kesalahan orang lain yang akhirnya menyengsarakan pihak pihak tertentu. Sikap humanis atau memanusiaan orang lain yang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya saling menghargai dan menghormati malah berubah menjadi realitas saling menyepelkan yang berujung tidak ada kepatuhan satu dengan lainnya.⁹¹

Melihat fenomena diatas dalam menghadapi maraknya penyebaran paham radikal di lingkungan kampus, sejumlah para pemangku kebijakan baik dari kalangan birokrasi pemerintahan maupun kampus, telah membuat berbagai kebijakan antisipatif, preventif maupun kuratif guna mencegah berkembangnya paham radikal.

⁹¹ M. Saekan Muchith, *Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan*, Addin, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, 173-174

Kemenristekdikti, misalnya, telah meminta semua perguruan tinggi untuk terus mensosialisasikan Empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika dan melakukan pendataan nomor telepon dan pemantauan akun media sosial (medsos) pegawai, dosen, dan mahasiswa guna mencegah radikalisme dan intoleransi yang kerap menyebar melalui media sosial.⁹² Seirama dengan itu, Universitas Jember (Unej) telah melakukan pemetaan terhadap kondisi mahasiswanya dan melakukan pendekatan persuasif kepada para mahasiswanya yang dicurigai telah terpapar paham radikal.⁹³ Sementara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, melalui Kalijaga Institute for Justice (KIJ) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta meluncurkan Modul yang menawarkan model pembelajaran dan gambaran suasana sekolah yang kondusif dalam upaya menciptakan proses pembelajaran yang optimal, terhindar dari kekerasan dan

⁹² <https://www.suara.com/news/2019/06/03/135655/menristek-sebut-sudah-lama-10-perguruan-tinggi-terpapar-radikalisme>

⁹³ dikutip dari laman Unej, Jumat, 26 Juli 2019.

sikap intoleransi terhadap perbedaan dan keragaman sosial.⁹⁴

Menurut hasil penelitian Asriani yang berjudul “Pola Penyebaran dan Strategi Pencegahan Faham Radikalisme Di Perguruan Tinggi Agama Islam” hasil penelitiannya menjelaskan bahwa karakteristik kebijakan yang telah diambil para pemimpin/pemangku kebijakan, dapat digolongkan kepada 4 Kategori: 1) melakukan pemantauan dan pengawasan kebijakan ini telah diterapkan di semua UIN yang menjadi objek penelitian. Bentuknya adalah dengan cara mengidentifikasi mahasiswa yang ditengarai telah terpapar faham radikal, termasuk para mahasiswa yang diketahui pernah menjadi aktivis atau ikut sebagai anggota HTI. Proses identifikasi itu dilakukan dengan menggunakan bantuan dari sesama mahasiswa. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan itu, pengelola kampus lalu mengawasi aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa yang menjadi target agar ia tidak memiliki kesempatan untuk menyebarkan faham radikalnya ke mahasiswa-mahasiswa yang lain, atau menggunakan kampus sebagai media kegiatannya. Kebijakan semacam

⁹⁴ https://jogja.suara.com/read/2019/08/21/040000/antisipasi-radikalisme-sejak-dini-kij-luncurkan-modul-integrasi-nilai-keren?utm_campaign=popupnews

ini telah mulai berjalan di lingkungan 4 (empat) kampus UIN yang diteliti. 2) mendesain Program Pencegahan Program pencegahan dimaksud antara lain berupa: (a) membuat Pacta Integritas bagi Mahasiswa Baru agar tidak terjerat oleh propaganda Radikalisme. (b) melakukan sosialisasi untuk mengingatkan/menyadarkan mahasiswa tentang bahaya radikalisme dalam setiap event kemahasiswaan. 3) mengundang penceramah-penceramah moderat pada acara-acara keagamaan kampus. 4) melakukan penataan organisasi dan kegiatan masjid kampus agar tidak mudah disusupi faham radikal.

Semua kebijakan di atas telah berjalan di 4 (empat) Kampus UIN yang diteliti. Menyebarluaskan gerakan Islam damai dan moderasi Islam. Kebijakan semacam ini telah berjalan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Melakukan Penggalangan Kerjasama - Melakukan kerjasama dengan pihak luar, khususnya kepolisian, BIN, BNPT dan FKPT provinsi, dalam rangka penanggulangan/pencegahan penyebaran faham radikal di Kampus. Kebijakan ini telah berjalan di 3 (tiga) kampus UIN, yakni UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan UIN Raden Fatah Palembang.

C. Model Pendidikan Moderasi Beragama di Indonesia

Dunia pendidikan menjadi tumpuan harapan untuk penguatan kembali nilai-nilai moderasi beragama. Partisipasi masyarakat Indonesia yang tinggi dalam mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan berbasis agama, perlu diarahkan untuk menguatkan gagasan ini. Pendidikan moderasi beragama perlu dikembangkan beriringan dengan pembangunan karakter peserta didik. Dalam konteks inilah, orasi ini disampaikan.

Pendidikan moderasi beragama diharapkan menjawab sasaran revolusi mental yang menghendaki lahirnya karakter diri peserta didik yang berintegritas, memiliki etos kerja, dan berjiwa gotong royong; serta terwujudnya budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur, dan sejahtera.

Muncul perbedaaan sikap di kalangan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) terhadap kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang moderasi agama, apakah dengan model *isolated subject* (mata kuliah tersendiri) atau *integrated subject* (bagian mata kuliah yang sudah ada). Beberapa penelitian terdahulu telah memaparkan bahwa setiap

perguruan tinggi mempunyai suasana dan budaya akademik yang unik dan tidak sama satu sama lain. Keunikan tersebut lahir dari kondisi sosio-kultural, visi-misi, dan kurikulum yang diterapkan. Senada dengan hal tersebut, perguruan tinggi tidak dapat mengimplementasikan kebijakan pemerintah tanpa pertimbangan akademik yang matang, karena akan berefek pada perubahan sektor dalam perguruan tinggi lainnya. Namun demikian, di sisi lain, perguruan tinggi diperkaya dengan adanya sumber daya yang bermacam-macam yang berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dan sikap.

Ada perbedaan disposisi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) dalam menjawab strategi pembinaan pengawasan ketat yang diberikan Kementerian Agama. Perbedaan ini tercermin dari adanya pembuatan strategi yang tampak dalam dua hal, yaitu formalisasi sarana untuk melaksanakan latihan keseimbangan yang ketat sebagai lembaga yang berbeda di dekatnya; dan kedua, cara perguruan tinggi menyesuaikan kemungkinan kontrol ketat ke dalam tridharma pendidikan tinggi. Terkait formalisasi metodologi pelaksanaan, perguruan tinggi tidak semua dapat tanggap secara cepat memutarbalikkan surat Dirjen

Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pendirian Rumah Moderasi Umat Beragama. Dari total Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang tersebar di seluruh Nusantara hingga 58 organisasi, 32 PTKI telah mendirikan Rumah Moderasi Keagamaan. Sedangkan, 26 perguruan tinggi belum memiliki organisasi Rumah Moderasi Keagamaan yang layak. Selaras dengan itu, pengembangan nilai keseimbangan yang ketat juga dilakukan dengan cara yang berbeda, di mana beberapa alasan mengingatnya untuk rencana pendidikan dan menjadi salah satu mata pelajaran ujian dan administrasi daerah untuk guru dan siswa. Mengingat reaksi yang tidak konsisten dan cara mengatur teknik, tinjauan diharapkan untuk menilai perbedaan strategi yang diambil oleh perguruan tinggi dalam menerapkan gagasan kontrol yang ketat.

Hingga saat ini, kajian moderasi keagamaan yang dilakukan melalui penelitian difokuskan pada bagaimana mensosialisasikan dan mengkaji moderasi non-sekuler di lembaga pendidikan. Sedangkan kajian tentang unsur-unsur penyebab variasi olahraga, konsep moderasi di lembaga akademik, dan ukuran pilihan yang dibuat dalam metode pembiasaan sekolah banyak siswa unggulan. Berdasarkan

hal tersebut, ada 3 pendekatan yang digunakan dalam pembahasan moderasi di atas, terutama dalam memperoleh pengetahuan tentang metode, strategi sosialisasi dan kontekstualisasi: Pertama, Lihat moderasi beragama menggunakan jenis topik tertentu⁹⁵. Kedua, Lembaga pendidikan giat menyelenggarakan kegiatan untuk mempromosikan moderasi⁹⁶ Ketiga, Penelitian tentang lahirnya politik seputar pembelajaran moderasi beragama terkait dengan isu radikalisme yang merambah dunia pendidikan⁹⁷.

⁹⁵ Yedi Purwanto, Qowaid Qowaid, and Ridwan Fauzi, "*Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*," Edukasi 17, no. 2 (2019): 294708; Caswita Caswita, "Kurikulum Tersembunyi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan 17, no. 3 (2019); Kasinyo Harto and Tastin, "Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiyah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik," At-Ta'lim, no. 1 (2019); Hani Hiqmatunnisa, "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning," JIPIS 29, no. 1 (2020): 27–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jipis.v29i1.546>.

⁹⁶ Yoga Irama and Mukhammad Zamzami, "*Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020*," KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin 11, no. 1 (2021): 65–89; Agus Akhmadi, "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia," Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan 13, no. 2 (2019): 45–55.

⁹⁷ Alexander R Arifianto, "*Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?*," Asian Security 15, no. 3 (2019): 323–42; Ekawati Ekawati, Mundzier Suparta, and Khaeron Sirin, "Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia," Istiqro 16, no. 01 (2018): 139–

Seperti yang dijelaskan oleh Saihu dan Marsiti, materi moderasi yang diberikan melalui pembelajaran karakter penting dalam memerangi ide-ide radikal. Berdasarkan ketiga kecenderungan di atas, diketahui bahwa belum banyak kajian tentang moderasi beragama yang membahas tentang perbedaan pilihan lembaga pendidikan dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya ketimpangan dalam penerapan pemikiran moderasi beragama.

Berbagai penelitian telah dilakukan yang membahas tentang penerapan konsep moderasi beragama (PT) di perguruan tinggi. Pertama, internalisasi nilai-nilai moderat melalui pendidikan agama Islam di perguruan tinggi negeri, yang dilakukan oleh Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa'diyah Ma'arifataini dan Ridwan Fauzi⁹⁸. Kajian ini membahas internalisasi nilai-nilai Islam moderasi melalui Pendidikan Agama Islam (PAI) di

78; Saihu Saihu and Marsiti Marsiti, "Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme Di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 23–54

⁹⁸ Yedi Purwanto, Qowaid Qowaid, and Ridwan Fauzi, "*Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*," *Edukasi* 17, no. 2 (2019): 294708

Perguruan Tinggi Negeri (PTU). Penting untuk menginternalisasi moderasi beragama, termasuk Islam, dalam masyarakat Indonesia yang majemuk dengan semboyan *Binneka Tunggal Ika*, dan dalam lingkungan yang dinamis di mana kesalahpahaman dapat merusak sendi-sendi persatuan. Tulisan ini menunjukkan pola internalisasi nilai moderasi melalui mata kuliah PAI di UPI Bandung. Materi disesuaikan dengan masukan mahasiswa, target kompetensi instruktur, dan dukungan dari lingkungan kampus UPI. Kurikulum dirancang sesuai dengan ketentuan pendidikan pasca sekolah menengah (PT). Metode internalisasi disampaikan secara tatap muka dalam bentuk ceramah, tutorial, dan seminar. Penilaian dilakukan dengan mengkaji wawasan keislaman lisan dan tulisan berdasarkan laporan berkala dari dosen dan tutor.

Penelitian moderasi beragama di PTKIN sebelumnya pernah dilakukan oleh Hani Hiqmatunnisa dan Ashif Az Zafi dengan judul *Menerapkan Nilai Moderasi Islam pada Pembelajaran Fiqh di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Based Learning*.⁹⁹Dalam

⁹⁹ Hani Hiqmatunnisa, *“Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqh Di PTKIN Menggunakan Konsep Problem*

artikel ini, nilai-nilai moderat atau Wasatiya penting untuk dipertahankan sebagai kesadaran kolektif umat Islam Indonesia. Hal ini karena nantinya menjadi ikatan kesopanan dalam menghadapi kemajemukan tubuh muslim itu sendiri dan kebhinekaan pihak lain. Pembelajaran fiqih menjadi wadah untuk menanamkan nilai moderasi Islam dengan menghadirkan konsep pembelajaran berbasis masalah yang menuntut siswa untuk membuka wawasan yang luas tentang perbedaan hukum Islam yang berlaku di masyarakat. Berada di antara diri sendiri dan bersikap moderat dalam menghadapi perbedaan yang muncul. Ada Dengan menanamkan nilai-nilai kesopanan, diharapkan PTKIN akan mempersiapkan umat Islam Indonesia dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan, toleransi dan non-ekstremisme.¹⁰⁰

Studi lain adalah karya tulis Ekawati, Mundzier Suparta dan Khaeron Sirin, “Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam dalam Deradikalisasi Agama di

Basic Learning,” JIPIS29, no. 1 (2020): 27–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jipis.v29i1.546>

¹⁰⁰ Kartikowati Triasih, “*Nilai-Nilai Moderasi Islam Perspektif Ahmad Syafii Maarif Dalam Buku Tuhan Menyapa Kita Dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam*”, IAINPurwokerto, 2020

Indonesia”.¹⁰¹ Karya tulis berupa artikel ini menjelaskan berkembangnya fenomena radikalisme di beberapa kelompok Muslim telah membuat pihak lain mengkritik Islam, menuduhnya memupuk kekerasan, ekstremisme, berteori dan tindakan subversif lainnya. Bahkan lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang sarat dengan kaum intelektual tidak terlepas dari serangan doktrin radikalisme. Maraknya aksi-aksi ini di dunia dan di Indonesia menempatkan Islam sebagai partai politik yang harus disalahkan. Islam, di sisi lain, adalah agama yang mempromosikan moderasi dan toleransi dan menawarkan kenyamanan bagi para pengikutnya. Apa yang diuraikan dalam artikel ini dengan demikian memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena radikalisme agama dan upaya perguruan tinggi Islam untuk mencapai deradikalisasi di Indonesia. Moderasi kurikulum dalam deradikalisasi paham keagamaan di tiga perguruan tinggi Islam di Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, IAIN Surakarta, dan STAIN Kediri, terbukti efektif dalam

¹⁰¹ Ekawati Ekawati, Mundzier Suparta, and Khaeron Sirin, “Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam dalam Deradikalisasi Agama di Indonesia,” *Istiqro* 16, no. 01 (2018): 139–78

mencegah dan melawan ekstremisme serta kelembagaan kelembagaan. sistem kurikulum pendidikan.

Lebih lanjut, penelitian Saihu dan Marsiti, fokus pada “Pendidikan Karakter dalam Upaya Menangkal Radikalisme di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat”.¹⁰² Penelitian ini mengkaji pendidikan Karakter untuk memerangi radikalisme di Negeri 3 Kota Depok menggunakan praktik pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam kurikulum formal dan tersembunyi. Kurikulum formal biasanya diprogram dan dibuat selama IHT di sekolah pada awal tahun ajaran, sedangkan kurikulum tersembunyi tidak dapat memisahkan keduanya untuk pencapaian tujuan pembelajaran seperti penanaman nilai. Oleh karena itu, ikuti ketentuan yang menerapkan kurikulum formal. Sifat keteraturan ditentukan oleh wali kelas di setiap kelas induk. penanaman nilai-nilai karakter disiplin dilakukan pada saat jam pelajaran dengan persetujuan guru mata pelajaran, dan pada saat ulangan atau ulangan harian penanaman nilai karakter kejujuran, penanaman nilai-nilai keramahan, kesopanan, kesopanan

¹⁰² Saihu Saihu and Marsiti Marsiti, “*Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat*,” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 23–54

Karakter yang benar dipraktikkan dalam salam di dalam dan di luar kelas, dan pengembangan nilai-nilai pribadi Pendidikan agama dimulai dengan berdoa, membiasakan siswa membaca kitab suci masing-masing agama yang dianut, dan menanamkan nilai-nilai pribadi. Menyanyikan lagu wajib kebangsaan setelah sholat dan menanamkan nilai-nilai karakter cinta kebersihan dan peduli lingkungan menyampaikan cinta tanah air. Menjadwalkan pembersihan kelas, belajar tidak dimulai jika kelas kotor, dll. Ini semua adalah bagian dari kurikulum tersembunyi untuk mencapai kurikulum formal berbasis pendidikan karakter.

Sejalan dengan hal ini, Caswita, melihat dari perspektif yang berbeda, yaitu “Kurikulum Tersembunyi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan kurikulum yang mengintegrasikan: SD al-Muttaqin Tasikmalaya Kurikulum Tertulis (Written Curriculum) dan Kurikulum Tersembunyi (Hidden Curriculum). Hasil penelitian ini menunjukkan sekolah pertama Kurang memperhatikan kurikulum tersembunyi pembelajaran PAI, padahal kurikulum tersembunyi sangat penting Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembelajaran PAI. Kedua, PAI belajar bahwa Pembelajaran diperoleh dengan

menggabungkan kurikulum tertulis dengan kurikulum tersembunyi lebih tepat dan kontekstual.

Kajian lain yang fokus pada sosialisasi dilakukan oleh Alexander R. Arifianto. Studi ini berjudul “Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?”¹⁰³ Artikel ini mengeksplorasi apakah organisasi dakwah intramural seperti Persatuan Islam Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya radikalisme, atau apakah mereka mempromosikan moderasi politik dan mendorong radikalisasi. sebagai embaga pencegahan. Perilaku di kalangan muda Muslim di perguruan tinggi. Berdasarkan wawasan dari makalah Moderasi Inklusi, disimpulkan bahwa jawaban atas pertanyaan pertanyaan ini tergantung pada kesediaan kelompok-kelompok ini untuk merangkul sistem politik demokrasi Indonesia. Ini menentukan taktik yang telah dipilih kelompok untuk mempromosikan agenda mereka kepada calon anggota. Sementara KAMMI bersedia memoderasi strateginya, HTI

¹⁰³ Alexander R Arifianto, “*Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?*,” *Asian Security* 15, no. 3 (2019): 323–42;

tidak mau melakukannya dan Meskipun secara formal menolak ideologi dan ekstremisme, KAMMI secara diam-diam terus memajukan agendanya.

Penelitian tentang telaah atas formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020 dilakukan oleh Yoga Irama dan Mukhammad Zamzami.¹⁰⁴ Artikel ini merupakan jawaban atas keprihatinan masyarakat bahwa saat ini banyak gerakan radikal yang terus melakukan propaganda dan terorisme. Telah diketahui bahwa kesalahan dalam pemahaman agama mengarah pada sikap dan tindakan yang ekstrim. Jika hal ini dibiarkan, niscaya akan menimbulkan keretakan sosial di kemudian hari. Fenomena ini menjadi isu yang patut ditelaah agar tidak menimbulkan kerancuan di kalangan umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah studi tentang upaya dan langkah resmi yang digunakan Kementerian Agama untuk mengarusutamakan moderasi beragama di Indonesia. Dalam kajian ini, rumusan moderasi beragama Depag dikembangkan Kementerian Agama RI dalam

¹⁰⁴ Yoga Irama and Mukhammad Zamzami, “Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020,” KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin 11, no. 1 (2021): 65–89

beberapa hal, antara lain penguatan moderasi beragama melalui seks pranikah, penguatan pemahaman beragama moderat dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. dilaksanakan melalui jalur tersebut. Sebuah program bimbingan untuk calon pengantin. Moderasi Keagamaan kemudian diperkuat melalui pelatihan kader Penyuluh Moderasi Religi bagi para ustadz muda, mahasiswa, dosen, dan tokoh agama lainnya.

Perubahan yang terjadi dimasyarakat merupakan sikap pengulangan tingkah laku yang dipakai manusia dengan manusia lainnya. Di Indonesia terdapat beraneka ragam aktivitas yang dilaksanakan bersama antar penganut Islam, katolik, kristiani dan Hindu, diantaranya kegiatan agama. Kegiatan masyarakat desa maupun kota misalnya acara kesenian yang mana hal tersebut menjadikan terbentuknya moderasi beragama yang baik. Sebab di negara Indonesia terdapat keberagaman adat istiadat, suku, budaya dan juga agama yang pada hakikatnya tidak dapat dilepas karena merupakan karakteristik bangsa Indonesia. Keberagaman tersebut tidak lepas dari letak geografis Indonesia yang dari Aceh sampai Papua terdiri berdasarkan pulau-pulau yang terpisah. Bangsa Indonesia yang masyarakatnya terbiasa berkelompok dan dengan beraneka

budaya memiliki keinginan menunjukkan identitas agama yang dianut masing-masing masyarakat, sehingga dapat berpotensi menimbulkan konflik.¹⁰⁵

Keberagaman ada dimasyarakat yang majemuk tidak dapat ditolak. Karena pluralitas adalah sunatullah, maka keberadaannya harus diakui setiap manusia. Tetapi, penerimaan terhadap keberagaman ini dalam kenyataannya belum secara utuh seiring dengan penerimaan secara teoritik serta masalah masih sering ditemukan di lapangan. Bersamaan dengan perubahan zaman, pluralitas yang berarti heterogen kemudian berubah arti menjadi kesamaan. Pemaknaan ini tidak bisa diterima apabila yang disamakan yaitu agama. Maka kesadaran yang tulus terhadap keberagaman sangat perlu untuk dimengerti oleh setiap beragama. Maka, pemahaman pada pluralitas ini sudah membentuk komponen yang erat dalam aktifitas pemeluk agama untuk menjadikan kehidupan yang damai.¹⁰⁶

Agama sebenarnya bisa menjadi unsur perkuat serta bisa juga menjadi unsur pembelah, berdasar pada bagaimana penganutnya menempatkan agama yang

¹⁰⁵ Noor, N. M. *Manual etika lintas agama untuk Indonesia*. 2015

¹⁰⁶ Ngainun, N. *Islam dan Pluralisme Agama–Dinamika Perebutan Makna*. 2014.

dianutnya dalam tumpuan berfikir, berperilaku, dan bersikap dalam berinteraksi bersama kelompok lain. Kedudukan agama sebagai unsur perkuat berisi pesan perdamaian dalam kondisi dan keadaan bangsa sekarang ini, yang mana masalah konflik bermotif agama dan etnik belum sepenuhnya hilang, akhir-akhir ini, konflik yang terjadi di beberapa daerah disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan sebagai umat beragama atas ajaran agama lain, selain ajaran agamanya sendiri. Situasi yang seperti ini bisa membawa dampak penganut beragama yang bersangkutan memiliki pemikiran keagamaan yang sempit, akhirnya gampang menyalahkan agama yang berbeda. Maka dari itu kedudukan agama sebagai unsur perkuat dirasa sangat penting disamping untuk menyadarkan lagi sebenarnya damai merupakan pesan mendasar dari dogmadogma.¹⁰⁷

Setiap agama mengajarkan kepada kepada Tuhan sang Maha Pencipta. Pengabdian kepada Tuhan diperlihatkan dengan taat mengikuti petunjuk-Nya dalam kehidupan. Manusia diberi tugas buat memimpin serta

¹⁰⁷ Muhaimin, A. G. *Damai di dunia, damai untuk semua: Perspektif berbagai agama. Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Puslitbang, 2004.

mengelola bumi, sebagai ciptaan tuhan yang diciptakan dengan kelebihan akal, manusia diwajibkan memelihara bumi untuk kepentingan bersama. Inilah tujuan kehidupan yang paling penting tentang kehidupan yang diajarkan oleh agama.

Beberapa kajian tentang moderasi beragama untuk generasi milenial juga dilakukan di luar Jakarta. Salah satunya di Sulawesi tengah (Palu). Seorang Guru Besar IAIN Palu, Zainal Abidin, menyebutkan ada enam prinsip yang perlu dikembangkan dalam pendidikan moderasi beragama yaitu sikap humanis, realistis, inklusif, adil, kerjasama dan toleran. Dia juga menawarkan empat langkah mengembangkan moderasi beragama untuk generasi milenial. Pertama, manfaat perkembangan teknologi media sosial dalam menyebarkan luaskan moderasi beragama; kedua, melibatkan generasi milenial dalam kegiatan positif di masyarakat; ketiga, perlu ada ruang dialog yang memadai bagi generasi milenial baik di lembaga pendidikan, di rumah dan di masyarakat; keempat, mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lembaga peminaan karakter yang positif.¹⁰⁸

¹⁰⁸ <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/menakar-moderasi-beragama-di-perguruan-tinggi>

Kementrian Agama bahkan sudah merumuskan indikator moderasi beragama. Dimulai dari komitmen kebangsaan bahwa dengan pemahaman keagamaan semakin meneguhkan hubungan kuat agama serta negara." "Kemudian sikap toleransi memberikan ruang pada orang lain beragama sesuai keyakinannya," ungkap Menag, saat peluncuran pusat studi moderasi beragama di Kampus Unwahas baru-baru ini. Hal lain bagian dari moderasi beragama adalah anti kekerasan serta ramah tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. "Terdapat kearifan lokal yang bisa dijadikan contoh moderasi beragama. Diterapkan sejak ratusan tahun lalu umat Islam di Kudus tidak pernah menyembelih hewan kurban berupa sapi. Kearifan lokal ini untuk menghormati keyakinan saudara kita. Dekan Fakultas Agama Islam Iman Fadhilah mengatakan banyak riset menyebutkan potensi radikalisme ditemui di kalangan muda dan mahasiswa. Karenanya penting untuk melakukan penguatan dan internalisasi nilai-nilai agama. Iman mengatakan, pemahaman dan sikap moderasi beragama perlu ditanamkan sejak awal, sebagai benteng ketika berselancar di dunia digital menghadapi ajaran dan ideologi radikalisme.

Dalam konteks Indonesia, *al wasathiyah* meniscayakan keseimbangan antara beragama menurut teks Kitab Suci dengan penerapannya secara kontekstual. Pertimbangan konteks dalam beragama berangkat dari prinsip maqashid atau tujuan ditetapkan hukum Islam (Syari'ah). Moderasi Islam menjadi paham keagamaan keislaman yang mengejewantahkan ajaran Islam yang sangat esensial. Ajaran yang tidak hanya mementingkan hubungan baik kepada Allah, tapi juga yang tak kalah penting adalah hubungan baik kepada seluruh manusia. Bukan hanya pada saudara seiman tapi juga kepada saudara yang beda agama.¹⁰⁹

Moderasi ini mengedepankan sikap keterbukaan terhadap perbedaan yang ada yang diyakini sebagai sunnatullah dan rahmat bagi manusia. Selain itu, moderasi Islam tercerminkan dalam sikap yang tidak mudah untuk menyalahkan apalagi sampai pada pengkafiran terhadap orang atau kelompok yang berbeda pandangan. Moderasi Islam lebih mengedepankan persaudaraan yang berlandaskan pada asas kemanusiaan, bukan hanya pada

¹⁰⁹ Kementerian Agama RI. (2015). *Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Jakarta

asas keimanan atau kebangsaan.¹¹⁰ Pemahaman seperti itu menemukan momentumnya dalam dunia Islam secara umum yang sedang dilanda krisis kemanusiaan dan Indonesia secara khusus yang juga masih mengisahkan sejumlah persoalan kemanusiaan akibat dari sikap yang kurang moderat dalam beragama. Konsekuensinya, perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan sesuai zaman.¹¹¹ Pendekatan kultural juga dapat diterapkan. Kearifan lokal berasal dari dua kata : arif berarti cerdas, pandai dan bijaksana (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan awalan "ke" dan akhiran "an" maka berarti kearifan atau kebijaksanaan yang tumbuh yang berbeda antara satu dengan lainnya perlu diperhatikan. Kearifan lokal bermakna kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal seperti tradisi, pepatah pepitih dan semboyan hidup' juga perlu diperhatikan, sehingga menjadi modal dalam membangun keharmonisan. Dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal atau local wisdom, maka beragam bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman dan wawasan serta

¹¹⁰ Fahrudin. (2019). *Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama. Republika.*

¹¹¹ Mas'ud, A. (2018). *Strategi Moderasi Antarumat Beragama.* jakarta: Kompas

adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas perlu juga diperhatikan.

Namun yang perlu diperhatikan, bahwa wacana kearifan lokal juga bersandingan dengan wacana perubahan, modernisasi dan relevansinya. Hal ini karena kearifan lokal terkait dengan ekspresi kebudayaan asli dalam konteks geografis dan kultural juga selalu dituntut untuk mampu merespon perubahan-perubahan masyarakat. Untuk itu, upaya yang dilakukan sesuai pendapat Mas'ud, (2018) perlunya mengembangkan wawasan multikultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat,serta peningkatan dialog dan kerja sama intern dan antarumat beragama dengan pemerintah dalam pembinaan kerukunan umat beragama.

D. Implementasi Pendidikan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan

Pendidikan merupakan cara yang tepat untuk mewujudkan gagasan moderasi beragama. Pendidikan menurut Goodlad, pakar pendidikan Kanada, mempunyai dua fungsi, pertama, tujuan personal (*private goals*), yaitu pendidikan untuk mengembangkan kompetensi peserta

didik yang meliputi vokasi, sosial, intelektual, dan personal; kedua, tujuan kolektif (*public goals*), yaitu tujuan yang terikat dengan kepentingan kolektivitas masyarakat tertentu, seperti negara.¹¹²

Pendidikan dalam konteks kolektif (baca: negara), menurut Thomas F. Green, teorikus dan filosof pendidikan Amerika, melayani dua kepentingan utama. Pertama, pembangunan kewarganegaraan (*citizenship*) yang meliputi tempat sosialisasi, transmisi kebudayaan, dan pengembangan identitas individu. Kedua, pendidikan kompetensi warga negara secara standar dan memberikan surat pengakuan (sertifikat) yang dibutuhkan dalam konteks administrasi public.¹¹³

Pemikiran pendidikan moderasi beragama hendaknya hadir untuk melayani kepentingan membangun karakter kewarganegaraan (*citizenship*) manusia Indonesia. Untuk itu, pendidikan moderasi beragama sejaris dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu pembentukan karakter manusia Indonesia. Pendidikan karakter menurut salah satu

¹¹² Goodlad J. A, 1984, *Place Called School*. New York: McGraw-Hill Book Company;

¹¹³ Green TF. 1971, *Citizenship or certification*. Dalam: Wax ML, Diamond S, Gearing FO, editor. *Anthropological perspectives on education*. New York: Basic Books Inc. Publisher.

penggagasnya, Thomas Lickona, merupakan usaha sadar untuk mewujudkan kebajikan, yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif, bukan hanya baik bagi individu, tetapi juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan.¹¹⁴

Perguruan Tinggi Kegamaan Islam (PTKI) menyelenggarakan pendidikan tinggi agama Islam sebagai kelanjutan pendidikan menengah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan memiliki kemampuan akademik, professional, yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik di bidang ilmu agama Islam maupun ilmu lain yang diintegrasikan dengan agama Islam. Secara formal PTKI berada di dalam pengelolaan Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam disebutkan bahwa kualifikasi kemampuan sikap, lulusan PTKI adalah

¹¹⁴ Lickona T. 2015, *Character matters: Persoalan karakter, bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas dan kebajikan penting lainnya*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

memiliki kemampuan yang meliputi: a). berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat; b). beribadah dengan baik dan sesuai dengan ketentuan agama Islam; dan c). berakhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial. Beberapa kata kunci yang terkait dengan pengembangan moderasi beragama di dalam keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tersebut dengan jelas seperti kata ‘inklusif’, ‘toleran’ dan ‘moderat’. Moderasi beragama memang menjadi orientasi di dalam pelaksanaan pendidikan di lingkungan lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

Seperti disinggung di atas, persoalan moderasi hampir selalu berkaitan dengan pemahaman ajaran Islam yang mendalam. Pemahaman ajaran agama Islam yang mendalam pada diri seorang muslim akan menyebabkan ia menjadi moderat. Sebaliknya pemahaman ajaran Islam yang kurang mendalam, tekstual, fanatik buta akan menyebabkan kesalahpahaman terhadap berbagai aspek di dalam ajaran agama Islam yang pada gilirannya akan menjadi radikalisme atau ekstremisme.

Di lingkungan pendidikan tinggi keagamaan Islam, para mahasiswa telah mendapatkan pendidikan atau materi-

materi keislaman yang cukup mendalam sesuai dengan jurusan atau program studi masing-masing. Dapat dipastikan bahwa di PTKI para mahasiswa sudah mendapatkan muatan moderasi yang cukup baik. Masalahnya memang kurikulum di perguruan tinggi lebih elastis, berbeda dengan kurikulum atau mata pelajaran yang ada di lembaga pendidikan dasar maupun menengah. Faktor dosen atau tenaga pengajar menjadi sangat penting sehingga implementasi moderasi berkaitan dengan bekal perspektif moderasi yang dimilikinya. Pada saat yang sama mahasiswa lebih terbuka dan bebas menyerap semua materi yang disampaikan oleh dosen dan dalam diskusi di dalam kelas. Mereka menyerap materi yang berasal dari luar atau dari referensi yang dibaca atau informasi yang masuk melalui berbagai forum dan media massa maupun media sosial.

Implementasi moderasi di PTKI ini sebenarnya dihadapkan dengan tantangan yang justru berasal dari pihak luar. Mahasiswa adalah peserta didik yang berinteraksi dengan pihak dan memang harus demikian. Tidak mungkin atau tidak ideal jika mahasiswa terisolir dengan dunia luar atau tidak berinteraksi dengan pihak luar untuk mengembangkan diri mereka. Akan tetapi di sinilah

tantangannya, karena pada saat yang bersamaan beberapa pihak luar mempunyai pemahaman keislaman yang tidak moderat.

Kebijakan pembentukan Lembaga Mediasi Keagamaan telah dirumuskan melalui Surat Edaran Nomor B3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 dari Dirjen Pendidikan Agama Islam, Kementerian Agama tanggal 29 Oktober 2019 . perbedaan. Perbedaan ini juga terlihat pada sistem pendidikan perguruan tinggi Islam yang toleran. Hingga 11 Desember 2020, survei menemukan bahwa dari 58 PTKI, 38 rumah mediasi keagamaan telah didirikan. Data untuk penelitian ini, Hasil penelitian menunjukkan 10 data PTKI secara acak, berhasil dihubungi dan mendapat tanggapan terkait perbedaan tanggapan atas Perintah Direktur. Ke-10 PTKI tersebut menunjukkan bahwa tujuh perguruan tinggi telah mendirikan Rumah Moderasi Keagamaan dan tiga lainnya belum. Tentu saja, universitas yang berbeda memiliki latar belakang yang berbeda. Di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memadai, infrastruktur yang buruk, dan bahkan kurangnya ketentuan yang tepat terkait dengan arah pergerakan Lembaga Urusan Agama Moderat. Meski demikian, ketiga PTKI tersebut sangat menyadari nilai strategis Rumah Moderasi Umat

Beragama untuk mengembangkan gerakan Islam Wasatiyah.

Ada perbedaan disposisi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTKIN) dalam menjawab strategi pembinaan pengawasan ketat yang diberikan Kementerian Agama. Perbedaan ini tercermin dari adanya pembuatan strategi yang tampak dalam dua hal, yaitu formalisasi sarana untuk melaksanakan latihan keseimbangan yang ketat sebagai lembaga yang berbeda di dekatnya; dan kedua, cara perguruan tinggi menyesuaikan kemungkinan kontrol ketat ke dalam tridharma pendidikan tinggi. Terkait formalisasi metodologi pelaksanaan, perguruan tinggi tidak semua dapat tanggap secara cepat memutarbalikkan surat Dirjen Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 tentang Pendirian Rumah Moderasi Umat Beragama. Dari total Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang tersebar di seluruh Nusantara hingga 58 organisasi, 32 PTKI telah mendirikan Rumah Moderasi Keagamaan. Sedangkan, 26 perguruan tinggi belum memiliki organisasi Rumah Moderasi Keagamaan yang layak. Selaras dengan itu, pengembangan nilai keseimbangan yang ketat juga dilakukan dengan cara yang berbeda, di mana beberapa alasan mengingatnya untuk rencana pendidikan dan

menjadi salah satu mata pelajaran ujian dan administrasi daerah untuk guru dan siswa. Mengingat reaksi yang tidak konsisten dan cara mengatur teknik, tinjauan diharapkan untuk menilai perbedaan strategi yang diambil oleh perguruan tinggi dalam menerapkan gagasan kontrol yang ketat.

Beberapa PTKI yang mendirikan Rumah Moderasi Keagamaan juga memiliki kebijakan yang berbeda. Misalnya, IAIN Salatiga dan IAIN Kudus tidak menjadikan Rumah Moderasi Keagamaan sebagai fokus penelitian pembelajaran mereka. Demikian juga terkait dengan perbedaan sistem pendidikan toleransi sebagai penguatan nilai-nilai moderasi. Misalnya, pendidikan formal toleransi telah menjadi kurikulum wajib, dengan mata kuliah Islam dan moderasi beragama. Tujuan utama didirikannya Rumah Moderasi Keagamaan adalah untuk menanamkan, mendidik dan memperkuat wacana moderasi beragama sebagai cara untuk mendukung masyarakat sekitar dan berpikir, bertindak dan menerapkan nilai toleransi. Moderasi beragama banyak dipraktikkan dalam dunia pendidikan dan, seperti disebutkan di atas, PTKI sendiri mewajibkan semua perguruan tinggi untuk membentuk badan moderasi beragama. Hal ini dibuktikan dengan data yang ditemukan

bahwa hanya 1 dari 7 perguruan tinggi yang tidak aktif di media sosial. Tapi sayang sekali karena tidak ada aksi nyata di dunia nyata. Tidak jarang para akademisi di kalangan dosen tidak mengetahui keberadaan Lembaga Mediasi Keagamaan di perguruan tinggi mereka. Apalagi pelaksanaan lembaga-lembaga tersebut tidak jelas sasarannya.

Poin utama Lembaga Moderasi Umat Beragama adalah memperkuat nilai toleransi dan mencegah munculnya perilaku radikal. Namun faktanya, berdasarkan data penelitian, sudah banyak yang menerapkan, menanamkan dan menerapkan nilai toleransi sebelum berdirinya Rumah Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi. Mirip dengan UIN Sunan Kalijaga Sebelum terbentuknya Rumah Moderasi Beragama, pantangan beragama pertama kali dipraktikkan oleh Pusat Studi Pancasila 'Pusat Dialog', yang didirikan 15 tahun lalu. Kementerian Agama bahkan sudah merumuskan indikator moderasi beragama. Dimulai dari komitmen kebangsaan bahwa dengan pemahaman keagamaan semakin meneguhkan hubungan kuat agama serta negara." "Kemudian sikap toleransi memberikan ruang pada orang lain beragama sesuai keyakinannya," ungkap Menag, saat

peluncuran pusat studi moderasi beragama di Kampus Unwahas baru-baru ini. Menurut Menag, mengedepankan toleransi maka tumbuh pemikiran positif yang menghargai kesetaraan serta bersedia bekerjasama. Hal lain bagian dari moderasi beragama adalah anti kekerasan serta ramah tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran agama.

"Terdapat kearifan lokal yang bisa dijadikan contoh moderasi beragama. Diterapkan sejak ratusan tahun lalu umat Islam di Kudus tidak pernah menyembelih hewan kurban berupa sapi. Kearifan lokal ini untuk menghormati keyakinan saudara kita Umat Hindu," kata Gus Menteri. yang diusung kementerian Agama bertujuan untuk berfikir inklusif dan mengembalikan semangat kegotong royongan kita sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai moderasi beragama sebagaimana buku yang diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang berjudul Moderasi Beragama (2019) menyebutkan ada 4 nilai utama yang menjadi inti gerakan moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, kerukunan, anti kekerasan dan kearifan terhadap budaya lokal.

H Ahmad Gubaryo, Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI mengatakan Di Indonesia moderasi beragama dimaknai beragama yang

tidak ekstrim, berlebihadikal, excessive, tatharruf. Lagi-lagi itu dilakukan dengan tetap menjaga esensi ajaran agama. Menurutnya, moderasi beragama adalah beragama yang penuh kasih, toleran, anti kekerasan, dan tetap menjaga komitmen kebangsaan. Akomodatif terhadap budaya lokal merupakan ciri lain dari moderasi beragama. Dekan Fakultas Agama Islam Iman Fadhilah mengatakan banyak riset menyebutkan potensi radikalisme ditemui di kalangan muda dan mahasiswa. Karenanya penting untuk melakukan penguatan dan internalisasi nilai-nilai agama. Iman mengatakan, pemahaman dan sikap moderasi beragama perlu ditanamkan sejak awal, sebagai benteng ketika berselancar di dunia digital menghadapi ajaran dan ideologi radikalisme.

Implementasi moderasi beragama di perguruan tinggi melalui pendidikan moderasi agama yang membutuhkan mekanisme yang terukur dalam hal tingkat pendidikan, termasuk proses, hasil, dan manfaat yaitu: a) pengukuran proses, yaitu mengukur aspek kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan moderasi beragama. Pengukuran ini didasarkan pada metode untuk mengevaluasi pengajaran agama dalam pelajaran. b) ukuran pencapaian (*output*), yaitu ukuran kinerja karakter

mahasiswa yang sedang. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan survei kepribadian moderat mahasiswa. c) pengukuran dampak, yaitu mengukur indikator kinerja dari dampak pelaksanaan pendidikan pantang agama. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan menjumlahkan produk produk yang dihasilkan dari dakwah agama. d) utilitas, yaitu nilai utilitas dari kegiatan promosi keagamaan.¹¹⁵

¹¹⁵ M. Hasyim Kamali, *The Middle Path of moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasathiyah* (Oxford: Oxford University Press, 2015), 31

BAB V

STUDI EMPIRIS RADIKALISME PADA PERGURUAN TINGGI

Hasil survei radikalisme di lingkungan sekolah dari berbagai Lembaga/Institusi menunjukkan telah terdapat indikasi adanya pelajar dan guru yang terpengaruh oleh paham radikalisme. Mereka setuju jika dasar Negara Pancasila diganti dengan paham yang lain, setuju dengan gerakan radikal (ISIS), kekerasan dapat dipakai untuk mencapai kehendak, dan tindakan intoleransi lainnya. Lembaga/intitusi tersebut yakni:

Pada tahun 2012, sebagaimana dikemukakan oleh Masnun Tahir, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Kementerian Agama RI melakukan penelitian tentang Potensi Radikalisme di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama. Penelitian ini menemukan fakta yang berbeda dengan kesimpulan *mainstream* dan teori besar (*grand theory*) radikalisme selama ini yang menyatakan bahwa radikalisme umumnya dimotivasi dan dilatar belakangi oleh konteks sosiopolitik gerakan anti Barat. Fakta yang diperoleh menunjukkan bahwa potensi

radikalisme di kalangan mahasiswa justru timbul karena faktor internalisasi pemahaman keagamaan yang cenderung ideologis dan tertutup, tidak semata-mata beriringan dengan gerakan radikalisme yang bermotif politik anti Barat.¹¹⁶

Zusiana Elly dkk, yang meneliti tentang pola penyebaran dan penerimaan paham radikal terorisme di kalangan mahasiswa di Kota Mataram, menemukan fakta bahwa lahirnya kelompok-kelompok Islam radikal dikarenakan dua hal: pertama, para penganut Islam garis keras tersebut mengalami semacam kekecewaan dan alienasi kerana “ketertinggalan” dari masyarakat Barat. Kedua, dangkalnya pemahaman agama dari kalangan umat Islam terutama di kalangan muda yang berlatar belakang pendidikan eksakta dan ekonomi. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa kelompok mahasiswa dari perguruan tinggi umum (LDK Universitas Mataram dan LDK IKIP Mataram) memiliki karakteristik yang berbeda dalam memahami fenomena radikalisme dan bahwa LDK IAIN

¹¹⁶ Masnun Tahir, ‘Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB’, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol. 49, No. 2, Desember 2015 Baca pula Nuruddin, “Basis Nilai-nilai Perdamaian Sebuah Antitesis Radikalisme Agama di Kalangan Mahasiswa” dalam *Harmoni, Jurnal Multikultural & Multireligius*, Vol. 12, Nomor 3, September-Desember 2013, hlm. 68-69.

Mataram yang memiliki latarbelakang keagamaan cukup kuat dan tidak menyetujui konsep khilafah secara keseluruhan, ternyata mulai terpengaruh dengan term-term khilafah dan memandang bahwa perlawanan terhadap Amerika merupakan salah satu bentuk jihad.¹¹⁷

Penelitian lain Masnun Tahir, tentang gerakan spiritualitas baru dan pergeseran identitas mahasiswa IAIN Mataram menemukan fakta bahwa mereka yang gagal dalam studinya di Perguruan Tinggi, bukan karena ketidakmampuan Intelektual (IQ), akan tetapi karena kegagalan menata emosinya, baik secara intrapersonal apalagi secara interpersonal. Dengan kondisi “*moral panic*” (kepanikan moral) semacam itu, mahasiswa menjadi sangat rentan untuk terbawa arus globalisasi dan faham radikalisasi.¹¹⁸ Sedangkan Husnul Hidayati yang meneliti tentang persepsi mahasiswa UIN Mataram terhadap Radikalisme, menemukan fakta bahwa mayoritas mahasiswa memandang bahwa gerakan radikal di Indonesia identik dengan pemikiran dan pandangan suatu agama (Islam). Sementara

¹¹⁷ Zusiana Elly dkk, “*Laporan Penelitian Pola Penyebaran dan Penerimaan Radikalisme dan Terorisme di Mataram*”, Nusa Tenggara Barat, LPM UIN Mataram 2013, hlm. 37.

¹¹⁸ Masnun Tahir, ‘*Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB*’, hal. 303

kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang non-Muslim, ambil contoh: Pembakaran masjid di Papua, cenderung tidak dianggap sebagai bentuk radikalisme.¹¹⁹

Pada tahun 2017, Badan Intelijen Negara (BIN) menyebutkan ada tujuh perguruan tinggi negeri (PTN) yang terpapar radikalisme. Selain itu, ada 39% mahasiswa di 15 provinsi menunjukkan ketertarikannya pada paham radikal yang dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yakni: rendah, sedang, dan tinggi.¹²⁰ Setara institute menemukan fakta yang lebih mengejutkan lagi. Melalui penelitian yang dilakukan hingga bulan April 2019, lembaga ini menemukan sekurangnya 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia telah terpapar paham radikal keagamaan. 20 Faham tersebut dibawa oleh kelompok keagamaan yang eksklusif dan monolitik, yakni: kelompok Salafi-Wahabi, Tarbiyah, dan Tahririyah, 21 yang menyasar organisasi kemahasiswaan mulai dari Lembaga lembaga Dakwah

¹¹⁹ Husnul Hidayati, *Pandangan Mahasiswa UIN Mataram Terhadap Radikalisme*, el-HiKMAH, Vol. 11, No. 1, Juni 2017.

¹²⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/20/23070271/bin-7-perguruan-tinggi-negeri-terpapar-paham-radikal>

Kampus, UKM, Lembaga Kemahasiswaan, hingga masjid kampus.¹²¹

SETARA *Institute for Democracy and Peace* (SIDP) : Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta & Bandung Raya, 2016¹²² dan 2015¹²³; Dalam Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta dan Bandung Raya 2016, SIDP menemukan bahwa 5,8% siswa mendukung mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, 3,9% siswa menganggap kelompok lain kafir dan sesat, 6,8% siswa menggunakan kekerasan dalam memperjuangkan keyakinan, 4,6% siswa melarang pendirian rumah ibadah. Survei tersebut juga menemukan bahwa 30,8% siswa setuju Ketua Kelas/OSIS harus satu agama, 38,0% memilih Bupati/Walikota/Gubernur yang satu seagama, dan 11.3% siswa menganggap Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini.

Wahid Foundation: *“Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di Kalangan Muslim*

¹²¹ <https://tirto.id/setara-institute-sebut-10-kampus-terpapar-paham-radikalisme-d9nh>

¹²² SETARA Institute,. *Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta & Bandung Raya*. Jakarta, Stara Institue. 2016.

¹²³ SETARA Institute,. *Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta & Bandung Raya*. Jakarta, Stara Institue, 2015.

Indonesia”, 2016; Tahun 2016 Wahid Foundation melakukan survei Potensi Intoleransi dan Radikalisme Sosial Keagamaan di kalangan Muslim Indonesia. Responden survei tersebut adalah umat Islam berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah. Hasil survei menyebutkan bahwa 59,9 % memiliki kelompok yang dibenci, yakni mereka yang berlatar belakang agama non muslim, kelompok Tionghoa, komunis, dan selainnya, dari jumlah 59,9 persen itu, sebanyak 92,2 persen tak setuju bila anggota kelompok yang mereka benci menjadi pejabat pemerintah di Indonesia, dan 7,7 % bersedia melakukan tindakan radikal bila ada kesempatan dan sebanyak 0,4 persen justru pernah melakukan tindakan radikal. Pada tahun yang sama Wahid Foundation juga menerbitkan laporan Riset “*Potensi Radikalisme di kalangan Aktivis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri*”. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa 33% responden mengartikan jihad sebagai berperang dan mengangkat senjata melawan orang kafir; 78% responden mendukung ide kekhilafahan; 17% responden setuju bahwa orang murtad dibunuh; 10% responden mendukung bom Sarinah; dan 6% responden mendukung ISIS¹²⁴.

¹²⁴ Wahid Foundation, 2016. *RI Masih Rentan Intoleransi*, Wahid

Maarif Institute, 2017. Penelitian Penguatan Institusi Sekolah Melalui Kebijakan Internal Sekolah yang Mengokohkan Kebinekaan: Kota Banda Aceh, Kabupaten Lebak, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Mataram, dan Kota.¹²⁵ Puslitjak Dikbud (2016): *Kajian Pendidikan Kebhinekaan Pada Satuan Pendidikan Menengah*; Senada dengan survei SIDP tersebut, Kajian Pendidikan Kebhinekaan Pada Satuan Pendidikan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud menunjukkan bahwa 8,2 % siswa setuju-sangat setuju Ketua OSIS dari agama yang sama, 6,8% siswa merasa menganggap sebaiknya Ketua OSIS dari Etnis yang sama. Namun demikian kajian tersebut juga menemukan adanya praktik baik pendidikan baik yang dilakukan melalui kebijakan sekolah maupun peran guru. Beberapa praktik baik tersebut diantaranya adalah pembauran antar siswa yang bhineka, memberikan ruang/wadah aktualisasi budaya agama

Foundation Sampaikan Enam Rekomendasi. <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/RIMasih-Rentan-Intoleransi-Wahid-FoundationSampaikan-Enam-Rekomendas>. August 2016.

¹²⁵ Maarif Institute, 2017. *Ringkasan Eksekutif Penelitian Penguatan Institusi Sekolah Melalui Kebijakan Internal Sekolah yang Mengokohkan Kebinekaan: Kota Banda Aceh, Kabupaten Lebak, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Mataram, dan Kota Makassar*.

pembiasaan penumbuhan budi pekerti, program afirmasi lintas etnis, pembelajaran menarik, dan pemahaman kebangsaan dan aktualisasi¹²⁶.

Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP, 2011): Hasil Survei LaKIP tentang kekerasan bermerek agama di kalangan pelajar¹²⁷. Agus Akhmadi, 2019, *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity*, Hasil penelitiannya bahwa dalam kehidupan multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran multi-budaya yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Diperlukan sikap moderasi beragama berupa pengakuan atas keberadaan pihak lain, memiliki sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Diperlukan peran pemerintah, tokoh masyarakat, dan para penyuluh agama untuk mensosialisasikan, menumbuh kembangkan moderasi

¹²⁶ Puslitjak Dikbud. 2016/ *Kajian Pendidikan Kebhinekaan Pada Satuan Pendidikan Menengah*.

¹²⁷ LaKIP, 2011. *Hasil Survei LaKIP tentang kekerasan bermerek agama di kalangan pelajar*. <http://sccollection.blogspot.co.id/2011/05/hasil-survei-lakip-tentang-kekerasan.html>.

beragama kepada masyarakat demi terwujudnya keharmonisan dan kedamaian.¹²⁸

Wildani Hefni, 1978, *Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*, hasil penelitiannya bahwa dunia digital menyediakan prasmanan narasi keagamaan yang bebas akses dan kerap kali dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyuburkan konflik dan menghidupkan politik identitas yang ditandai dengan pudarnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, bergesernya otoritas keagamaan, menguatnya individualisme, dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme. Pengarusutamaan moderasi beragama di ruang digital menemukan momentumnya. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagai laboratorium perdamaian kemudian menguatkan konten-konten moderasi beragama melalui ruang digital sebagai penyeimbang dari arus informasi yang deras di ruang media sosial. Penyeimbang yang dimaksud adalah kontra narasi untuk melahirkan

¹²⁸ Agus Akhmadi, *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity*, Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 13, no. 2, Pebruari - Maret 2019

framing beragama yang substantif dan esensial yaitu moderat dan toleran¹²⁹.

Nur Salamah dkk, 2020, *Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan*, ditemukan adanya tiga langkah strategi penyemaian moderasi beragama berparadigma Islam Terapan di Institut Agama Islam Negeri Kudus diantaranya dengan menjadikan Ilmu Islam Terapan sebagai mata kuliah, membangun Rumah Moderasi, dan menyelenggarakan Kelas IT. Hasil yang diperoleh dari kajian ini adalah paradigma Ilmu Islam Terapan merupakan pondasi utama dalam menjalankan setiap program kegiatan. Melalui paradigma Islam Terapan dan ketiga strategi penyemaian moderasi beragama tersebut diharapkan dapat membentuk mahasiswa yang berpikir moderat dan bertoleransi tinggi.¹³⁰

Sahri, 2016, *Radikalisme Islam Di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam*, hasil penelitian di antara penyebab

¹²⁹ Wildani Hefni, *Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*, Jurnal Bimas Islam Vol 13 No. 1 ISSN 2657-1188 (online) ISSN 1978-9009

¹³⁰ Nur Salamah dkk, *Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan*, QUALITY Volume 8, Nomor 2, 2020, 269-290

radikalisme adalah konversi dari IAIN ke UIN yang membuka peluang yang sangat besar bagi alumni-alumni yang berasal dari SMA/SMK/STM untuk menjadi mahasiswa perguruan tinggi agama tersebut, kebanyakan dari mereka baru menemukan *ghirah* atau semangat beragamanya di kampus, terlebih ketika mereka berjumpa dengan aktifis-aktifis lembaga dakwah dan organisasi-organisasi tertentu. Latar belakang yang demikian menjadi lahan empuk untuk membangun dan membangkitkan sikap militansi keagamaan di dalam diri mereka. Kondisi ini ditambah dengan adanya kebijakan kampus yang tidak memberi ruang kepada mahasiswa untuk menuangkan ide-ide kritis dan kreatifnya, maka sangat mungkin mahasiswa mencari *escapisme* (pelarian) terhadap gerakan-gerakan radikal yang menurut mereka memberikan kebebasan berekspresi. Perilaku radikalisme dalam Islam, bertentangan dengan konsep jihad. Dari ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep jihad, tidak ada satupun yang berkonotasi untuk berperang dan melegalkan tindak kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sebaliknya konsep jihad, justru semata-mata diperuntukkan meningkatkan nilai ibadah kepada Allah, baik ibadah

vertikal transendental maupun ibadah *horizontal*, yang dikenal dengan ibadah sosial.¹³¹

Askar Nur, 2021, *Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam*, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis memiliki beberapa pendefinisian berbeda di beberapa kalangan khususnya perbandingan antara agama-agama yang diakui oleh Negara padahal Islam secara generik merupakan sikap hidup untuk tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT dengan senantiasa menyebarkan kebaikan dimanapun berada. Semangat keIslaman demikian telah mengalami proses redefinisi di berbagai organisasi khususnya organisasi yang berasaskan Islam.¹³²

Jalwis, 2021, *Sosialisasi Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa*, hasil penelitian radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir

¹³¹ Sahri, *Radikalisme Islam Di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 6, Nomor 1, April 2016; Issn 2089-0109

¹³² Askar Nur, *Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam*, jurnal Al Ubudiyah, jurnal Pendidikan dan ilmu keislaman, 2021, Vol. 2.No. 1

balikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ada tiga institusi sosial yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda. Antara lain pendidikan, keluarga dan komunitas: melalui peran tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat dalam menciptakan ruang kondusif bagi terciptanya budaya perdamaian di kalangan generasi muda. Selain peran yang dilakukan secara institusional melalui kelembagaan pendidikan, keluarga dan lingkungan masyarakat, generasi muda juga dituntut mempunyai imunitas dan daya tangkal yang kuat dalam menghadapi pengaruh dan ajakan radikal terorisme. Upaya efektif untuk mencegah kampus dari radikalisasi adalah memberikan fasilitas belajar keagamaan yang proporsional kepada mahasiswa. Serta mengupayakan penyebaran ajaran keagamaan dengan suasana terbuka dan menekankan moderatisme¹³³.

Penelitian tentang telaah atas formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020 dilakukan oleh Yoga Irama dan

¹³³ Jalwis, *Sosialisasi Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa*, Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Volume 1, No 1, Tahun 2021

Mukhammad Zamzami.¹³⁴ Artikel ini merupakan jawaban atas keprihatinan masyarakat bahwa saat ini banyak gerakan radikal yang terus melakukan propaganda dan terorisme. Telah diketahui bahwa kesalahan dalam pemahaman agama mengarah pada sikap dan tindakan yang ekstrim. Jika hal ini dibiarkan, niscaya akan menimbulkan keretakan sosial di kemudian hari. Fenomena ini menjadi isu yang patut ditelaah agar tidak menimbulkan kerancuan di kalangan umat beragama di Indonesia. Oleh karena itu, fokus penelitian dalam penelitian ini adalah studi tentang upaya dan langkah resmi yang digunakan Kementerian Agama untuk mengarusutamakan moderasi beragama di Indonesia. Dalam kajian ini, rumusan moderasi beragama Depag dikembangkan Kementerian Agama RI dalam beberapa hal, antara lain penguatan moderasi beragama melalui seks pranikah, penguatan pemahaman beragama moderat dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. dilaksanakan melalui jalur tersebut. Sebuah program bimbingan untuk calon pengantin. Moderasi Keagamaan kemudian diperkuat

¹³⁴ Yoga Irama and Mukhammad Zamzami, "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020," KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin 11, no. 1 (2021): 65–89

melalui pelatihan kader Penyuluh Moderasi Religi bagi para ustadz muda, mahasiswa, dosen, dan tokoh agama lainnya.

Daftar Rujukan

- Abdul Syatar, Muhammad Majdy Amiruddin, Islamul Haq, Arif Rahman, 2020, *Darurat Moderasi Beragama di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*, *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* Vol. 13 No.1, h.1-13
- Abdul Rosyid, Tarbawi, Vol. 5 No. 2 Agustus 2022 e-ISSN 2715-4777 p-ISSN 2088-5733
- Agus Akhmadi, 2019, *Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation In Indonesia's Diversity*, *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol. 13, no. 2, Pebruari - Maret
- Askar Nur, 2021, *Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam*, *jurnal Al Ubudiyah, jurnal Pendidikan dan ilmu ke-Islaman*, Vol. 2.No. 1
- Anang Sholikhudin, “Merebut Kembali Kejayaan Islam Analisis Internal Dan Eksternal Penyebab Kemunduran Islam”, *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2017
- Alif Cahya Setiyadi, *Pendidikan Islam Dalam Lingkaran Globalisas.*, *Jurnal* Vol. 7, No. 2, Desember 2012,
- Al-Qardhawi, S., Y. (1986). *Al-Shahwah al-Islamiyah bayn al-Juhud wa al-attarruf*. Bank al-Taqwa. Cairo.

Amien Rais, 1996, *Cakrawala Islam*, Bandung: Mizan.

Amrullah, Taufik. 2008. “KAMMI Menuju Muslim Negerawan, Meretan Kebangkitan Indonesia”. Muda Cedikia: Bandung.

Ariwidodo, E. (2017) Shifting Paradigm of Modern Islam Fundamentalism as Islamized Space Autonomy in Indonesia, *Kars Journal of Social and Islamic Culture*, 249-283.

Asrori, A. (2015) Radikalisme Di Indonesia: Antara Historisitas Dan Antropisitas. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. (2), 253-268. 5.

Agus Akhmadi, “Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia,” *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan* 13, no. 2 (2019): 45–55.

Alexander R Arifianto, “Islamic Campus Preaching Organizations in Indonesia: Promoters of Moderation or Radicalism?,” *Asian Security* 15, no. 3 (2019): 323–42;

Bakir,M.,& Othman,K. (2017). A Conceptual Analysis of Wasatiyyah (Islamic Moderation-IM) from Islamic Knowledge Management (IKM)Perspective. *Revelation and Science*, 7(1)

Bogdan, R. C. Bicklen, Sari Knoop.1982.*Qualitative research for education and introduction to theory and methiode*. Boston: Allyn and Bacon.

- Bogdan, R.C. & Taylor, S.J. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Terjemahan oleh Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional, h.28
- Buku panduan, 2019 *Preventing Radicalisme in Campus, UNESA Anti Radikalisme*, Pusat Pembinaan Ideologi Universitas Negeri Surabaya,
- Caswita Caswita, “Kurikulum Tersembunyi Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam,” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 17, no. 3 (2019);
- Cohen, L. & Manion, L. 1994. *Research Methods in Education*. London: Rautledge.
- Darlis, 2017, *Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural*. Rausyan Fikr, Vol.13 No. 2 Desember, 225-255.
- Departemen Agama RI, *Moderasi Islam*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2012)
- Dubrin, A. J. 2001. *Leadership: Research Findings, Practices, and Skills*, Third Edition. Boston: Houghton Mifflin Company.3
- Emha Ainun Najib, “Diskontinuitas Sejarah Kepemimpinan Sebagai Akar Masalah”, <https://www.caknun.com/2017/diskontinuitas-sejarahkepemimpinan-sebagai-akar-masalah/>, Diakses pada Selasa, 14 September 2021, 17.19 WIB

- Ekawati Ekawati, Mundzier Suparta, and Khaeron Sirin, "Moderasi Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Dalam Deradikalisasi Agama Di Indonesia," *Istiqro* 16, no. 01 (2018): 139–78;
- Fahrudin. (2019). *Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama*. Republika.
- Fauzi, Ahmad. "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan." *Jurnal Islam Nusantara* 2.2 (2018), hlm, 233\
- Glasser, B.G., & Strauss, A.L. 1974. *The Discovery of grounded Theory Strategies for research*. Chicago: Aldine Publishing Company.
- Gorton, R.A., 1976. *School Administration: Challenge and opprtunity for Leadership*. Dubuque Iowa. Wm.C. Brown Company.
- Hafid, W. (2020) Geneologi Radikalisme Di Indonesia (Melacak Akar Sejarah Gerakan Radikal). *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law, Fakultas Agama Islam UMI* 1(1). 31-46.
- Hanafi, H. (2000). *Islam in the Modern World: Tradition, Revolution and Culture*. Dar Kebaa Bookshop. Cairo.
- Hani Hiqmatunnisa, "Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam dalam Pembelajaran Fiqih di PTKIN Menggunakan Konsep Problem Basic Learning," *JIPIS* 29, no. 1 (2020): 27–35, <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jipis.v29i1.546>.

- Hasani, I. & Naipospos, B. T. (2010). *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan*. Pustaka Masyarakat, Jakarta.
- Huda, U. (2019). *Strategi Penanggulangan Radikalisme di Perguruan Tinggi*. Jurnal An-Nidzam, 5(1), 52.
- Jalwis, 2021, *Sosialisasi Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa*, Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Volume 1, No 1
- Indonesia, & Indonesia (Eds.). (2019). *Moderasi beragama (Cetakan pertama)*. Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI.
- Yedi Purwanto, Qowaid Qowaid, and Ridwan Fauzi, "Internalisasi Nilai Moderasi Melalui Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum," *Edukasi* 17, no. 2 (2019): 294708;
- Yoga Irama and Mukhammad Zamzami, "Telaah Atas Formula Pengarusutamaan Moderasi Beragama Kementerian Agama Tahun 2019-2020," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 11, no. 1 (2021): 65–89;
- Kartodirdjo, S. (1985). *Ratu Adil*. Sinar Harapan, Jakarta.
- Kementrian Agama RI. (2015). *Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan*. Jakarta

- Khammami, Z. (2002). *Islam Radikal, Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Teraju. Jakarta.
- Kasinyo Harto and Tastin, “Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasatiah: Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik,” *At-Ta’lim*, no. 1 (2019);
- LaKIP, 2011. Hasil Survei LaKIP tentang kekerasan bermerek agama di kalangan pelajar. <http://sccollection.blogspot.co.id/2011/05/hasil-survei-lakip-tentang-kekerasan.html>.
- Lincoln, Y.S., & Guba, E.G., 1985, *Naturalistic Inquiry*, New Delhi: Sage Publication, Inc. h.123
- Luthans, Fred. 2002. *Organizational Behavior*, Ninth Edition. Singapore: McGrawHill International Editions, 576
- Maarif Institute, 2017. Ringkasan Eksekutif Penelitian Penguatan Institusi Sekolah Melalui Kebijakan Internal Sekolah yang Mengokohkan Kebinekaan: Kota Banda Aceh, Kabupaten Lebak, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Mataram, dan Kota Makassar.
- Masduqi, I. (2013) Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam* 2(1). 1-20.
- Mas’ud, A. (2018). Strategi Moderasi Antarumat Beragama. Jakarta: Kompas

- Mantja, W. 2003, *Etnografi Disain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, Malang: Wineka Media, h. 65
- Miles, M.B & Huberman, A.M. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press, 1992, h. 11
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1992.*Analisis Data Kualitatif*.Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Muchith, M. Saekan, 2007, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kudus: STAIN Kudus Press, , 34
- Muhaimin, A. G. (2004). Damai di dunia, damai untuk semua: Perspektif berbagai agama. Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, Puslitbang
- M. Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman
- M. Saekan Muchith, 2016, *Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan*, Addin, Vol. 10, No. 1, Februari, 173-174
- M. Hasyim Kamali, 2015, *The Middle Path of moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasathiyah* (Oxford: Oxford University Press.), 31
- Nurul H. Maarif, Islam Mengasihi Bukan Membenci, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2017)

- Northouse, P.G. 2003. *Leadership: Theory and Practice*, Third Edition. New Delhi: Response Book, 3
- Ngainun, N. (2014). Islam dan Pluralisme Agama–Dinamika Perebutan Makna.
- Noor, N. M. (2015). Manual etika lintas agama untuk Indonesia.
- Nur Salamah dkk, 2020, *Upaya Menyemai Moderasi Beragama Mahasiswa IAIN Kudus Melalui Paradigma Ilmu Islam Terapan*, QUALITY Volume 8, Nomor 2, 269-290
- Patton, M.Q., 1980, *Qualitatif Evaluation Methods*, London: Sage Publications, h. 85
- Rubaidi, A. (2007). *Radikalisme Islam, Nahdatul Ulama Masa depan Moderatisme Islam di Indonesia*. Logung Pustaka.
- Said Aqiel Siradj, Tasawuf Sebagai Basis Tasamuh: Dari Social Capital Menuju Masyarakat Moderat, Al-Tahrir vol.13 No.1 (Mei 2013)
- Siti Aminah, Merajut Ukhuwah Islamiyah Dalam Keanekaragaman Budaya dan Toleransi Antar Agama, (Jurnal Cendekia Vol. 13 No. 1 Januari 2015)
- Sahri, 2019, *Radikalisme Islam Di Perguruan Tinggi Perspektif Politik Islam*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 6, Nomor 1, April 2016; ISSN

- Saihu Saihu and Marsiti Marsiti, “Pendidikan Karakter Dalam Upaya Menangkal Radikalisme Di SMA Negeri 3 Kota Depok, Jawa Barat,” *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2019): 23–54
- SETARA Institute, 2016. Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta& Bandung Raya. Jakarta, Stara Institue.
- SETARA Institute, 2015. Laporan Survey Toleransi Siswa SMA Negeri Di Jakarta& Bandung Raya. Jakarta, Stara Institue. SIDP. 2015)
- Shihab, A. 1999, *Islam Inklusif. Bandung*: Mizan, 43
- Tim Balitbang Kemenag RI, 2019, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), 16.
- Turmudi, E. (2005). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*, Jakarta:LIPI Press.
- Wahid Foundation, 2016.RI Masih Rentan Intoleransi, Wahid Foundation Sampaikan Enam Rekomendasi. <http://wahidfoundation.org/index.php/news/detail/RIMasih-Rentan-Intoleransi-Wahid-Foun-dationSampaikan-Enam-Rekomendas>.August 2016.
- Wildani Hefni, *Moderasi Beragama dalam Ruang Digital: Studi Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*, Jurnal

Bimas Islam Vol 13 No. 1 ISSN 2657-1188
(online) ISSN 1978-9009

Zuhairi Misrawi, Hadratussyaiikh Hasyim Asy'ari Moderasi,
Keutamaan, dan Kebangsaan (Jakarta: PT Kompas
Media Nusantara, 2010)